



**KABUPATEN MANOKWARI SELATAN  
PROVINSI PAPUA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN  
NOMOR : 6 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN  
TAHUN 2005 - 2025**



**TAHUN 2016**



**BUPATI MANOKWARI SELATAN  
PROVINSI PAPUA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

**NOMOR 6 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN  
MANOKWARI SELATAN TAHUN 2005-2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MANOKWARI SELATAN,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin agar pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran diperlukan perencanaan pembangunan yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan;
- b. Bahwa untuk menciptakan integrasi, sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dalam kurun jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;

- c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2005-2025.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 2. Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  - 4. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
  - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232; Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5365);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor No 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

**dan**

**BUPATI MANOKWARI SELATAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN MANOKWARI  
SELATAN TAHUN 2005-2025**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Manokwari Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Manokwari Selatan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Manokwari Selatan untuk periode 5 (lima) tahunan.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

## **BAB II**

### **ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) RPJPD disusun berdasarkan asas.
  - a. manfaat;
  - b. berkeadilan;
  - c. keterpaduan;
  - d. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
  - e. tatakelola pemerintahan yang baik;
  - f. berkelanjutan;
  - g. berwawasan lingkungan;
  - h. efektif dan efisien;
  - i. kemandirian
- (2) Kebijakan dalam RPJPD dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan, dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan:
  - a. RPJPN Tahun 2005-2025;
  - b. RPJPD Provinsi Papua Barat 2005-2025;
  - c. RTRW Kabupaten Manokwari Selatan 2015-2035;
  - d. Kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

### **Pasal 3**

Tujuan penetapan RPJPD adalah:

- 1 Memberikan pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon Bupati/Wakil Bupati.
- 2 Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang bersinergis dan terpadu dengan pembangunan Nasional dan Provinsi Papua Barat.
- 3 Sebagai pedoman dalam:
  - a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun selama periode berkenaan;
  - b. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun; dan
  - c. Penyusunan RKPD setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

## **BAB III RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA RPJPD**

### **Pasal 4**

- (1) RPJPD memuat visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Sistematika RPJMD terdiri atas:
  - BAB I Pendahuluan;
  - BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
  - BAB III Analisis Isu-Isu Strategis;
  - BAB IV Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang;
  - BAB V Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang;
  - BAB VI Kaidah Pelaksanaan;
  - BAB VII Penutup.
- (3) Isi dan uraian sistematika RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IV**  
**VISI DAN MISI**  
**Pasal 5**

- (1) Visi RPJPD Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2005-2025 adalah “**TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MANOKWARI SELATAN YANG BERDIKARI, BERMARTABAT DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN**”
- (2) Misi RPJPD Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2005-2025 adalah:
  - a. Mewujudkan SDM yang berdaya saing
  - b. Mewujudkan Kesejahteraan Seluruh Lapisan Masyarakat
  - c. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)
  - d. Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup yang berkualitas
- (3) Visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dijelaskan lebih lanjut dalam dokumen RPJPD.

**BAB V**  
**PENGENDALIAN, EVALUASI DAN SANKSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Pengendalian dan Evaluasi**  
**Pasal 6**

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah untuk mewujudkan sasaran pokok RPJPD.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati.



## **Bagian Kedua**

### **Sanksi**

#### **Pasal 7**

- (1) Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) berupa pertimbangan dari landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi terhadap hasil musrenbang RPJPD Kabupaten Manokwari Selatan, sinkronisasi dan sinergi dengan RPJPN, RTRW Kabupaten Manokwari Selatan dan RPJPD provinsi Papua Barat dan RTRW provinsi dan kabupaten/kota lainnya.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) melaporkan hasil pemantauan rencana pembangunan kepada Bupati, dapat disertai dengan rekomendasi dan/atau sanksi yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **Pasal 8**

- (1) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
  - d. merugikan kepentingan nasional;
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya:
  - a. bencana alam;
  - b. guncangan politik;
  - c. krisis ekonomi;
  - d. konflik sosial budaya;
  - e. gangguan keamanan;
  - f. pemekaran daerah;
  - g. perubahan kebijakan nasional.

- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat terjadi apabila bertentangan dengan kebijakan nasional;
- (4) Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### **Pasal 9**

- (1) Dalam hal pelaksanaan RPJPD terjadi perubahan capaian sasaran 5 (lima) tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang, maka perubahan tersebut dituangkan dalam RPJMD periode berkenaan melalui Peraturan Bupati.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Arah Kebijakan pembangunan daerah;
  - b. Sasaran Pokok Pembangunan Daerah;
  - c. Struktur Organisasi Perangkat Daerah;

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 10**

- (1) Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJPD Kabupaten Manokwari Selatan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD periode sebelumnya.
- (2) Untuk optimalisasi pelaksanaan musrenbang RPJPD Kabupaten Manokwari Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tata tertib pelaksanaan ditetapkan dengan peraturan Bupati.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 11**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Selatan.

Ditetapkan di Ransiki  
pada tanggal, 21 September 2016  
BUPATI MANOKWARI SELATAN,

TTD

MARKUS WARAN


Diundangkan di Ransiki  
pada tanggal 21 September 2016  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

TTD

Ir. CONSTAN MAMPIOPER

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN  
TAHUN 2016 NOMOR 6

SALINAN YANG SYAH SESUAI ASLINYA  
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

  
DEREK DOMINGGUS RUMBARAR, SH, MH  
PEMBINA / IVa  
NIP. 19621201 198803 1 020

Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat : (3/2016)



# BAB I

## PENDAHULUAN

Manokwari Selatan merupakan salah satu kabupaten yang terletak Provinsi Papua Barat barat. Kabupaten yang memiliki ibu kota di Boundij Distrik Ransiki ini, merupakan kabupaten baru yang dibentuk dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012, sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Manokwari. Di samping untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Provinsi Papua Barat pada umumnya, pemekaran wilayah tersebut dimaksudkan agar meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Manokwari Selatan.

Kabupaten Manokwari Selatan yang sebagian besar berbatasan langsung dengan laut merupakan suatu tantangan tersendiri dalam pengembangan wilayah. Diperlukan sebuah perencanaan pembangunan yang komprehensif, terpadu dan terintegrasi, serta relevan dan berkorelasi positif terhadap pemecahan berbagai isu strategis dan permasalahan pokok yang dihadapi masyarakat agar pembangunan ke depan dapat lebih memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya.

### 1.1. Latar Belakang

Perubahan sistem tata kelola pemerintahan dan pola penyelenggaraan negara serta amandemen UUD 1945 pasca krisis ekonomi dan moneter tahun 1997 berimplikasi pada munculnya paradigma dan perubahan dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal tersebut ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan perlunya disusun perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang bahwa pembangunan Provinsi Papua barat khususnya Kabupaten Manokwari



bukan saja diharapkan mampu menurunkan kesenjangan sosial, namun juga harus dapat mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal serta mampu mengafirmasi Orang Papua Asli sebagai subyek dalam proses politik dan pembangunan. Dengan keleluasaan tersebut, pemerintah daerah memiliki kesempatan yang cukup untuk memahami dan memberikan solusi nyata terhadap permasalahan-permasalahan penting yang dihadapi oleh masyarakat secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Meskipun demikian, untuk efektivitas dan efisiensi pencapaian sasaran pembangunan, pemerintah daerah perlu bersinergi dan berkoordinasi secara positif dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat agar tercipta keselarasan kebijakan pembangunan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai acuan kebijakan pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun serta dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) setiap kurun waktu 5 (lima) tahun. RPJPD ini bersifat makro dan dinamis dengan tujuan memandu (arah) pembangunan jangka menengah dalam mencapai tujuan pembangunan jangka panjang.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dokumen RPJPD ini adalah produk bersama yang merupakan hasil integrasi dari berbagai rujukan. Adapun rujukan dasarnya adalah Visi dan Misi daerah untuk kurun waktu 20 tahun, yang selanjutnya diselaraskan dengan dokumen perencanaan lainnya seperti: RPJPN, RPJPD Provinsi Papua Barat dan RTRW. Dalam rangka penajaman relevansi kebutuhan pembangunan di Kabupaten Manokwari Selatan 20 tahun ke depan, muatan RPJPD ini sangat terkait dengan kondisi umum dan potensi Kabupaten Manokwari Selatan, serta kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu, proses penyusunannya juga dilakukan secara partisipatif dan demokratis dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat dan pemerintahan. Untuk itu, RPJPD Kabupaten Manokwari Selatan tahun 2005-2025 harus menjadi acuan utama bagi setiap Bupati dan wakil Bupati (terpilih), sehingga setiap dokumen perencanaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan menjadi satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, RPJP Daerah harus disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional sesuai karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya



RPJP Daerah dijabarkan lebih lanjut dalam RPJM Daerah. Mengingat RPJP Nasional menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah, Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah yang disusun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda).

Sistem perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah), serta tahunan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan melibatkan masyarakat. Sebagai satu kesatuan sistem, masing-masing dokumen saling terkait dan konsisten, dimana RPJPD memayungi arah kebijakan bagi RPJMD dalam 4 (empat) periode lima tahunan. Sedangkan, RPJMD memberi pedoman bagi RKPD melalui arah kebijakan tahunan selama 5 (lima) tahun. RPJMD juga menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai pedoman perencanaan lima tahun masing-masing Perangkat Daerah. Selanjutnya, Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang menjadi masukan bagi penyusunan RKPD. Kelima dokumen rencana pembangunan daerah harus diterjemahkan dalam sistem penyelenggaraan birokrasi, terhubung dengan kepemimpinan, sistem pengukuran kinerja, kebijakan kepegawaian.

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Sebagai dasar hukum dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) menggunakan Pancasila dan UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan sebagai landasannya. Sementara landasan operasional yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sistem perencanaan pembangunan daerah.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232; Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5365);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); dan
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);



11. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 73);
12. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat Tahun ... (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun ... Nomor ...);
13. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun ... (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun ... Nomor ...).

### 1.3. Maksud dan Tujuan

RPJPD Kabupaten Manokwari Selatan disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) di Kabupaten Manokwari Selatan dalam mewujudkan cita-cita pembangunan jangka panjang daerah dalam kerangka mencapai tujuan nasional sesuai dengan permasalahan dan isu strategis Kabupaten Manokwari Selatan.

Tujuan penyusunan RPJPD Kabupaten Manokwari Selatan adalah:

1. Mendukung koordinasi antarpelaku dan pemangku kepentingan pembangunan;
2. Menjabarkan visi dan misi daerah dalam agenda-agenda pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun ke depan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu dan antarfungsi pemerintah maupun antara pemerintah pusat dan daerah;
4. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan, dengan pemerintah kabupaten sekitar, Pemerintah Provinsi Papua Barat serta pemerintah pusat;
5. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan;
6. Mengoptimalkan partisipasi dan kemitraan dalam pembangunan; dan
7. Menjamin tercapainya penggunaan sumber biaya secara efisien, efektif, berkeadilan, transparan, akuntabel dan berkelanjutan.
8. Menjadi pedoman penyusunan visi, misi dan program (calon) Bupati dan wakil Bupati.



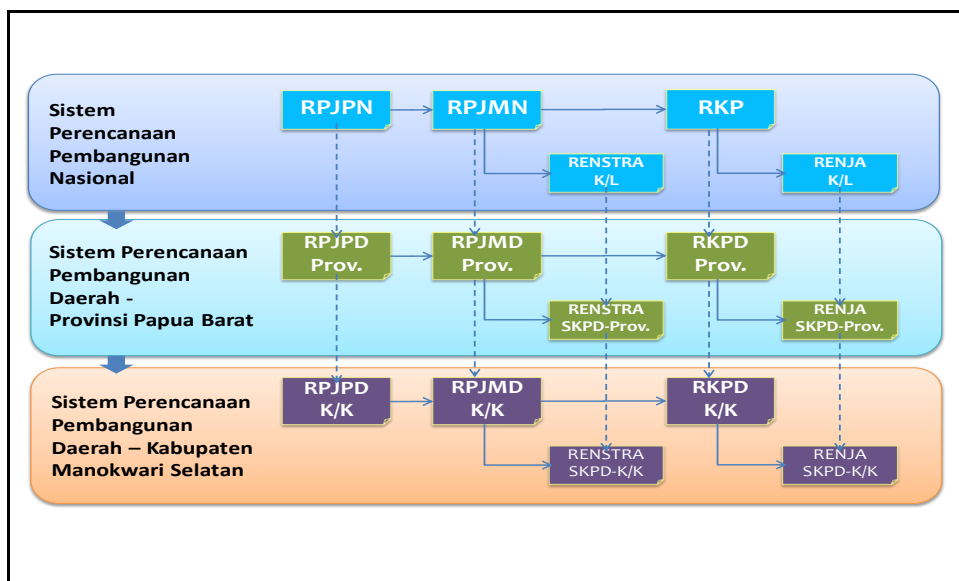


#### 1.4. Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga kesinambungan kemajuan dan kesatuan nasional. Oleh karena itu, sistem perencanaan pembangunan daerah harus sinergi, mulai dari tingkat nasional, provinsi, sampai dengan kabupaten/kota atau sebaliknya. Masing-masing tingkatan perencanaan bukan hanya memiliki sasaran yang spesifik, tetapi juga agregatif dari sistem perencanaan yang ada di bawahnya. Sebagaimana terlihat dalam **Gambar 1.1**, secara hierarki, RPJPD Kabupaten Manokwari Selatan disusun berdasarkan RPJPD Provinsi Papua Barat dan RPJP Nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah, menjadi pedoman penyusunan visi, misi, dan program calon bupati dan wakil bupati. Arah kebijakan beserta sasaran pokok pembangunan setiap periode dan tahapan pembangunan di RPJPD menjadi pedoman bagi penyusunan visi dan misi calon kepala daerah. RPJMD merupakan penjelmaan dari visi, misi, dan program bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Papua Barat dan RPJM Nasional. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan, RPJMD diterjemahkan oleh Renstra Perangkat Daerah sekaligus menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD.

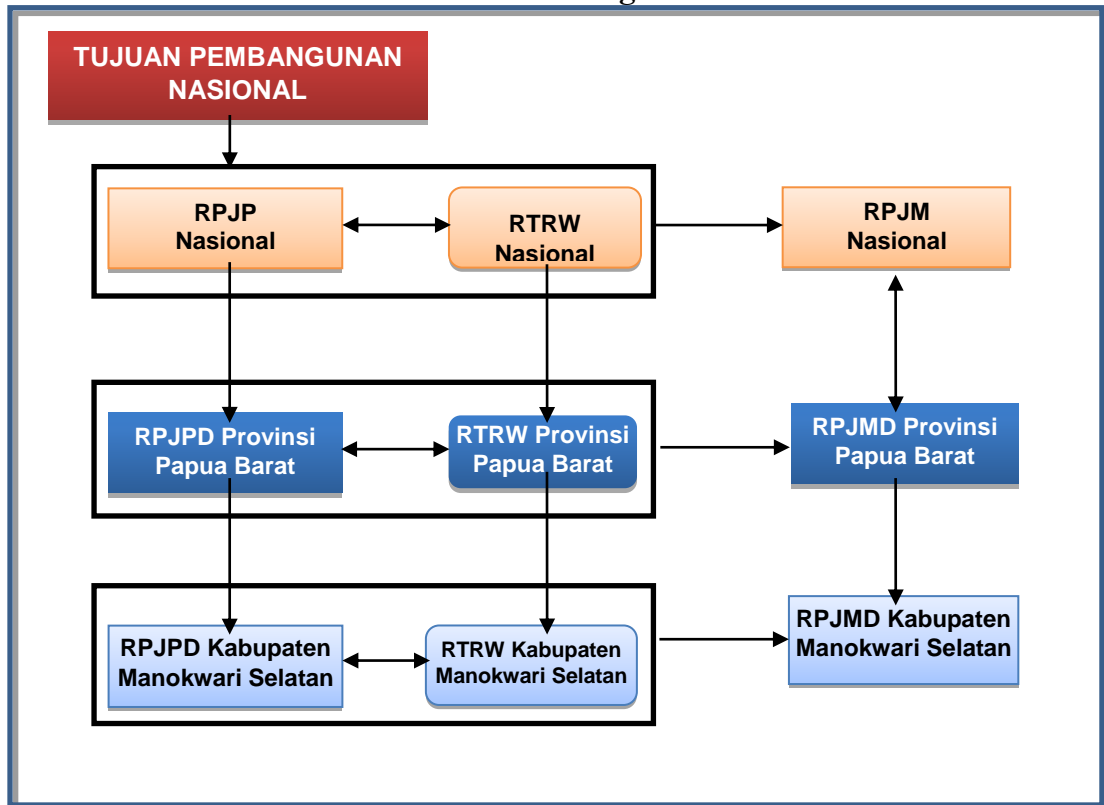
**Gambar 1.1**  
Keterkaitan AntarDokumen Perencanaan





Penyusunan RPJPD didasarkan pada kajian aspek tata ruang yang ada sehingga rencana tata ruang dan RPJPD menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, visi dan misi pembangunan jangka panjang turut menentukan perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Manokwari Selatan dan sebaliknya. Sasaran dan arah pembangunan jangka panjang juga harus dapat diterjemahkan ke dalam perencanaan spasial. Berikut ini diagram alir yang memperlihatkan kedudukan RTRW dalam kerangka Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

**Gambar 1.2**  
**Hubungan RPJPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam**  
**Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional**



Dari gambar di atas, tampak jelas bahwa peran RPJPD sangat penting dalam kaitannya dengan RTRW dan kedudukannya bagi perencanaan pembangunan jangka panjang. RTRW harus dipedomani dalam penyusunan RPJPD; begitu juga sebaliknya. Kedua dokumen tersebut menjadi salah satu rujukan utama penyusunan RPJMD. Dengan demikian, penyelenggaraan pembangunan daerah akan menciptakan keterpaduan dan keselarasan pencapaian tujuan pembangunan bersama-sama, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional.



### 1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJPD ini memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 meliputi 6 (enam) bab, terdiri dari:

- BAB I **Pendahuluan**; berisi latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan RPJPD, landasan hukum, dan hubungan RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya, serta sistematika penulisan.
- BAB II **Gambaran Umum Kondisi Daerah**; menggambarkan kondisi umum daerah dan capaian pembangunan mencakup aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.
- BAB III **Analisis Isu-isu Strategis**; mengemukakan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Manokwari Selatan yang aktual dirasakan oleh masyarakat.
- BAB IV **Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang**; berisi pernyataan visi dan misi pembangunan daerah jangka panjang tahun 2005-2025.
- BAB V **Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang**; berisi sasaran pembangunan daerah jangka panjang, arah pembangunan, dan sasaran pokok masing-masing tahapan pembangunan lima tahunan selama 20 tahun yaitu periode 2005-2010, 2010-2015, 2016-2020 dan 2021-2025.
- BAB VI **Kaidah Pelaksanaan**



## BAB II

# GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kabupaten Manokwari Selatan merupakan kabupaten otonom baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2012, dalam bingkai kebijakan otonomi khusus Papua Barat yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Manokwari. Sebagai wilayah yang memiliki kewenangan otonomi khusus, maka Kabupaten Manokwari Selatan lebih leluasa dalam merancang dan mengembangkan inisiatif serta inovasi-inovasi kreatif dalam pembangunan daerahnya sesuai kearifan dan kekhasan lokal. Mengingat otonomi khusus yang diberikan, semestinya dan bahkan harus dapat dimaknasi secara kongkrit untuk dapat mewujudkan harapan serta berbagai hak dan aspirasi masyarakat, serta simpul yang kuat agar tetap menjadi bagian utuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Meskipun demikian, segala peraturan perundang-undangan harus tetap menjadi pijakan hierarki utama dari kebijakan nasional mengingat dalam setiap tahapan pembangunan kedaerahan diyakini memberikan sumbangsih bagi keterwujudan capaian pembangunan nasional.

Sejarah pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan tidak terlepas dari historis Kabupaten Manokwari sebagai daerah induk pemekarannya. Secara etimologi, kata “Manokwari” berasal dari Bahasa Biak Numfor yang berarti “Kampung Tua”. Penamaan tersebut dikarenakan wilayah Manokwari selain dikenal sebagai kota bersejarah di Provinsi Papua, juga disebabkan pada tanggal 5 Februari 1855 injil diberitakan pertama kali di wilayah tersebut oleh dua orang misionaris berkebangsaan Jerman yakni *Carel Willem Ottow dan Johann Gotlob Geislerr*. Selain itu, dalam lembar sejarah tercatat bahwa Kabupaten Manokwari merupakan Kota Pemerintahan Tertua di Papua.

Sejarah hari jadi Kabupaten Manokwari tepat pada tanggal 8 November 1898 yang dilatarbelakangi oleh peristiwa dibentuknya pos pemerintahan pertama di Manokwari oleh Pemerintahan Hindia Belanda. Hal tersebut terjadi ketika Residen Ternate *Dr. D.W. Horst* atas nama Gubernur Jenderal Hindia Belanda melantik *Tn. L.A. Van Oosterzee* pada hari Selasa tanggal 8 November 1898 sebagai *Controleer Afdeling Noord New Guinea* (Pengawas Wilayah Irian Jaya Bagian Utara). Hingga selanjutnya melalui Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1995



terbentuklah Kabupaten Manokwari dan kemudian berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 pada 17 November 2012, Kabupaten Manokwari Selatan terbentuk.

### 2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dalam perencanaan pembangunan daerah memiliki sisi strategis utamanya dalam memberikan dukungan baik langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan daerah Manokwari Selatan sebagai daerah pemekaran baru. Penjabaran aspek geografi akan memberikan gambaran utuh bagaimana karakteristik wilayah dan sosio kultural Kabupaten Manokwari Selatan, baik dalam kaitannya dengan luas dan batasan wilayah, letak geografis, topografi, hingga penggunaan dan pemanfaatan lahan dalam berbagai aktivitas pembangunan daerah serta sebaran dan karakteristik demografi masyarakatnya.

Dalam etnografi Papua dijelaskan bahwa persebaran suku-suku bangsa yang ada didasarkan pada daerah dan kebudayaannya. Oleh karenanya secara aspek demografi, dikaitkan dengan persebaran suku-suku bangsa tersebut, Manokwari dan sekitarnya termasuk Manokwari selatan, banyak dihuni oleh suku bangsa Amberbaken atau Mansubaber, Wandamen, Bintuni atau Wamesan, yang didalamnya dihuni oleh sub suku bangsa Mantion, Hatam, Meyah, Sough, Amberbaken, Saukerom, Karon Pantai, Tanah merah, Babo, Arandai, Kemberano, Maninggo, Kaburi, Roon, Mioswar, Rumberpon, Wandamen dan Kuri.

Keseluruhan suku maupun sub suku tersebut mempunyai kebudayaan sendiri-sendiri walau sepiantas bisa dikatakan sama namun sangat berbeda. Masyarakat suku asli Papua tersebut kebanyakan bermata pencaharian utama adalah berladang berpindah-pindah, menangkap ikan disungai dan laut. Secara umum, *Socio Culture* ini akan sangat berpengaruh bagaimana perencanaan pembangunan daerah disusun beserta paket-paket kebijakan pembangunan strategis Manokwari Selatan, dirancang dan dilaksanakan, walaupun pada masa sekarang ini proses akulturasi telah dan terus berjalan dan tentunya memberikan banyak warna dan pengaruh pada kehidupan masyarakatnya.

Disamping itu pula, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Manokwari Selatan perlu dilihat pula berbagai potensi aspek deliniasi pengembangan wilayah dan pemanfaatannya, seperti yang telah diuraikan dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah yang telah disusun hingga identifikasi wilayah rawan bencana. Sehingga



jika terintegrasi dengan baik akan menghasilkan rumusan perencanaan pembangunan yang matang dan memiliki optimalisasi dalam pelaksanaannya.

### 2.1.1. Karakteristik lokasi dan wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah merupakan gambaran dasar dari kondisi geografis Kabupaten Manokwari Selatan. Karakteristik lokasi dan wilayah menjelaskan berbagai hal terkait potret wilayah baik dari luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi, hingga penggunaan lahan di seluruh wilayah Kabupaten Manokwari Selatan.

#### a. Luas dan batas wilayah administrasi

Wilayah Kabupaten Manokwari Selatan seluas 2.812,44 km<sup>2</sup> yang terbagi ke dalam 6 (enam) distrik dengan Distrik Ransiki yang memiliki wilayah paling luas. Ratio luas wilayah per distrik terhadap luas wilayah Kabupaten Manokwari Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.1**  
**Data Wilayah Administratif Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2015**

No.	Distrik	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Persentase Luas Wilayah (%)	Jumlah Kampung
1	Ransiki	1.180,20	41,96	13
2	Momi Waren	440,00	15,64	7
3	Nenei	436,18	15,51	7
4	Tahota	178,22	6,34	4
5	Dataran Isim	214,89	7,64	12
6	Oransbari	362,95	12,91	14
<b>Jumlah</b>		<b>2.812,44</b>	<b>100,00</b>	<b>57</b>

*Sumber: Kabupaten Manokwari Selatan Dalam Angka, 2015*

Terlihat dari tabel bahwa sebanyak 41,96 persen luas wilayah Kabupaten Manokwari Selatan merupakan Distrik Ransiki dimana jumlah kampungnya sebanyak 13 kampung. Sedangkan Distrik Tahota hanya memiliki luas 178,22 Ha atau sebesar 6,34 persen dari total luas wilayah Kabupaten Manokwari Selatan.

Selanjutnya, batas wilayah administrasi Kabupaten Manokwari Selatan adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Manokwari;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Teluk Bintuni dan Teluk Wondama;
- Sebelah Barat : Kabupaten Pegunungan Arfak dan Teluk Bintuni; dan



Sebelah Timur : Kabupaten Teluk Wondama.

### **b. Letak dan kondisi geografis**

Letak geografis Kabupaten Manokwari Selatan dapat terlihat menurut bagiannya sebagai berikut:

Bagian Utara : 1°5' Lintang Selatan;  
Bagian Selatan : 2°5' Lintang Selatan;  
Bagian Barat : 133°45' Bujur Timur; dan  
Bagian Timur : 134°25' Bujur Timur.

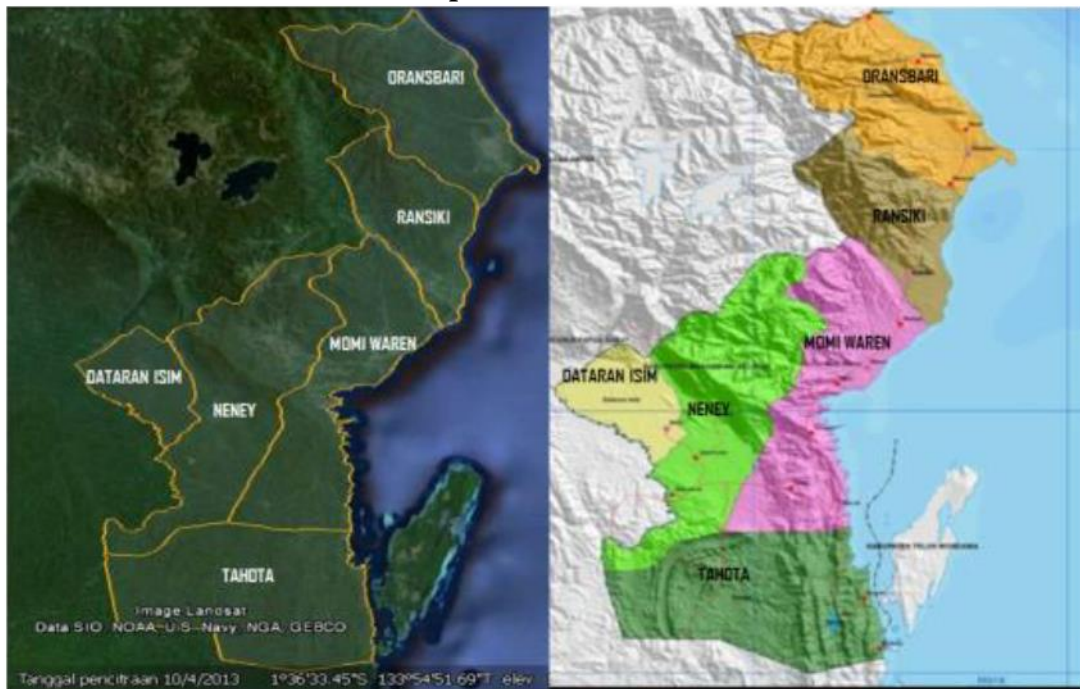
Secara administratif, wilayah Kabupaten Manokwari Selatan memiliki ibukota di Bondij di Distrik Ransiki. Kabupaten Manokwari Selatan, terdiri dari 6 (enam) wilayah administratif distrik, dengan hierarki berikutnya sebanyak 57 kampung. Berdasarkan Tata ruang Propinsi Papua Barat, Manokwari Selatan ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLP) dengan pusat di Ransiki.

Terdapat 4 wilayah distrik di wilayah Kabupaten Manokwari Selatan yang berbatasan dengan laut, yaitu: Distrik Ransiki, Momi Waren, Tahota, Oransbari, sedangkan 2 distrik lainnya merupakan wilayah yang terletak di daerah dataran atau pegunungan yang tidak berbatasan dengan laut, yaitu Distrik Nenei dan Distrik Dataran Isim.

## **Gambar 2. 1**



### Peta Kabupaten Manokwari Selatan



Sumber: Peta Citra dan BIG

#### c. Topografi

Kemiringan Lahan. Kemiringan lahan di Kabupaten Manokwari Selatan bervariasi mulai dari lahan landai (2-40%) dan terjal (lebih dari 40%). Gambaran kondisi wilayah yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan yang terbagi kedalam 2 (dua) tipologi wilayah yaitu pesisir dan pegunungan.

Kabupaten Manokwari Selatan memiliki ketinggian lahan berupa dataran tinggi yang terinci sebagai berikut:

- Ketinggian 0-100 m, di atas permukaan laut; merupakan wilayah dengan dataran rendah, ataupun wilayah yang berada di sekitar kawasan pantai. Wilayah yang berada di ketinggian tersebut meliputi Distrik Oransbari, Distrik Ransiki dan Distrik Momi Waren; dan
- Ketinggian 100-1000 m di atas permukaan laut, meliputi seluruh wilayah Kabupaten Manokwari Selatan yang merupakan daerah dataran tinggi pegunungan meliputi Distrik Neney, Distrik Dataran Isim dan Distrik Tahota.





#### d. Geologi

Struktur dan karakteristik geologi wilayah Manokwari Selatan terdiri dari batuan Vulkanik Arfak, Batu Gamping Faumai, Batu Gamping Imskin dan Kais serta Batu Gamping Maruni. Jenis Tanah. Jenis tanah di Kabupaten Manokwari Selatan terdiri dari tanah alluvial (21,16%), Kipas Aluvial (1,36%). Kedalaman efektif tanah di seluruh wilayah Kabupaten Manokwari Selatan adalah rata-rata di atas 25 cm, kecuali wilayah-wilayah pegunungan kapur.

Untuk lebih jelasnya struktur dan karakteristik dan jenis tanah pada wilayah Manokwari Selatan dapat kita lihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.2**  
**Struktur dan Karakteristik Geologi**  
**Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2015**

No	Struktur Geologi	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Aluvial	48.751,13	21,16
2	Batuan Vulkanik Arfak	23.728,40	10,30
3	Batu Gamping Faumai	6.232,61	2,70
4	Batu Gamping Imskin	33.711,79	14,63
5	Batu Gamping Kais	12.217,24	5,30
6	Batu Gamping Maruni	130,68	0,06
7	Formasi Befoor	10.042,70	4,36
8	Formasi Jass	1.808,30	0,78
9	Formasi Kemum	21.850,21	9,48
10	Formasi Klasafet	13.855,14	6,01
11	Formasi Sirga	1.658,90	0,72
12	Formasi Stenkool	18.167,90	7,88
13	Formasi Tipurna	760,50	0,33
14	Formasi Wai	377,91	0,16
15	Granit Anggi	11.136,59	4,83
16	Grup Kembelangan	18.425,86	8,00
17	Kipas Aluvial	3.130,51	1,36
18	Komplek Mawi	4.167,17	1,81
19	Tidak Terklasifikasi	271,05	0,12



No	Struktur Geologi	Luas (Ha)	Persentase (%)
<b>Total</b>		<b>230.424,59</b>	100,00

Sumber: Bappeda Kabupaten Manokwari Selatan

#### e. Hidrologi

Terdapat Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Manokwari Selatan yaitu DAS Ransiki. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengendalikan hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia dengan tujuan membina kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatkan kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan.

Kemiringan lahan di wilayah DAS Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan dapat terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.3**  
**Kemiringan Lahan DAS Ransiki**  
**Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2015**

No	Kemiringan	Luas	
		m <sup>2</sup>	(Ha)
1	Landai (<8%)	123.352.011	12.335
2	Sangat Curam (>40%)	108.847.571	10.895
<b>Jumlah</b>		<b>232.299.582</b>	<b>23.230</b>

Sumber: DAS Remu Ransiki

Sedangkan jenis tanah di Kabupaten Manokwari Selatan sebagian besar merupakan jenis tanah Red Yellow Podsolik dan Alluvial yang masing-masing terlihat luasnya pada tabel berikut.

**Tabel 2.4**  
**Jenis Tanah di Wilayah DAS Ransiki**  
**Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2015**

No	Jenis Tanah	Luas	
		m <sup>2</sup>	(Ha)
1	Alluvial	82.836.041	8.284
2	Complek Podsolik	47.062.517	4.706
3	Latosol	7.827.316	783
4	Red Yellow Podsolik	94.573.707	9.457



No	Jenis Tanah	Luas	
		m <sup>2</sup>	(Ha)
	<b>Jumlah</b>	232.299.582	23.230

*Sumber: DAS Remu Ransiki*

Di wilayah Kabupaten Manokwari Selatan terdapat 6 buah sungai yang terpanjang. Sungai Momi merupakan sungai yang terpanjang, yaitu 34 km sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.5**  
**Nama Sungai di Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2015**

No	Nama Sungai	Panjang (Km)	Lokasi/Distrik
1	Momi	34	Ransiki
2	Ransiki	32	Ransiki
3	Waren	19	Ransiki
4	Masabui	18	Oransbari
5	Warbiadi	16	Oransbari
6	Muari	10	Oransbari

*Sumber: Kabupaten Manokwari Selatan Dalam Angka, 2015*

**Gambar 2. 2**  
**Kondisi Sungai dan DAS di Kabupaten Manokwari Selatan**



#### f. Klimatologi

Kabupaten Manokwari Selatan memiliki iklim tropis basah dengan curah hujan hampir merata di sepanjang tahun dengan jumlah hari hujan yang selalu ada di setiap bulannya. Rata-rata suhu udara tertinggi selama tahun 2014 berada pada bulan Oktober yang mencapai 28,0 °C dan paling rendah berada pada bulan Desember sebesar 26,2 °C. Meskipun begitu, suhu maksimum selama tahun 2014 berada pada bulan November yang mencapai 41,7 °C dan suhu minimum berada pada bulan Agustus sebesar 21,5 °C.



**Tabel 2.6**  
**Curah Hujan, Hari Hujan dan Suhu Udara**  
**Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014**

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan hari)	Suhu		
			Minimum	Maksimum	Rata-rata
Januari	171,9	26	24,0	32,1	26,4
Februari	102,4	20	22,8	30,2	26,5
Maret	132,1	20	23,7	32,4	26,5
April	105,7	16	21,6	29,2	26,9
Mei	91,9	15	23,2	31,7	27,0
Juni	94,8	21	22,2	30,3	26,9
Juli	83,8	12	22,7	31,9	26,9
Agustus	93,8	22	21,5	29,8	26,4
September	118,2	12	22,2	31,2	26,6
Oktober	56,1	9	23,4	33,4	28,0
November	78,8	11	22,5	41,7	27,0
Desember	213,5	18	22,0	31,0	26,2

Sumber: Kabupaten Manokwari Selatan Dalam Angka, 2015

Selain itu, kelembaban udara paling tinggi berada pada bulan Desember sebesar 87,0 persen. Rata-rata tekanan udara maksimum mencapai 1.011,3 mb pada bulan mei dan rata-rata kecepatan angin terbesar pada bulan Februari yang mencapai 14,0.

**Tabel 2.7**  
**Kelembaban, Tekanan Udara, dan Kecepatan Angin**  
**Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2015**

Bulan	Kelembaban (%)	Rata-rata Tekanan Udara (mb)	Rata-rata kecepatan angin
Januari	83,0	1.007,7	8,0
Februari	78,0	973,7	14,0
Maret	83,0	975,9	4,0
April	80,0	1.009,4	3,0
Mei	81,0	1.011,3	2,0
Juni	81,0	1.010,3	2,0



Bulan	Kelembaban (%)	Rata-rata Tekanan Udara (mb)	Rata-rata kecepatan angin
Juli	76,0	976,6	3,0
Agustus	79,0	912,5	2,0
September	75,0	977,2	2,0
Oktober	73,0	1.009,1	3,0
November	81,0	1.010,9	3,0
Desember	87,0	1.008,2	2,0

Sumber: Kabupaten Manokwari Selatan Dalam Angka, 2015

### g. Penggunaan lahan

Sebagian besar luas wilayah Kabupaten Manokwari Selatan masih berupa hutan rimba dimana pada tahun 2014 mencapai 92,98 persen luas lahan total atau seluas 214.241,34 Ha. Sedangkan pada wilayah pemukiman dan tempat kegiatan masyarakat hanya sebesar 0,20 persen atau seluar 460,08 Ha. Berikut rincian penggunaan lahan di Kabupaten Manokwari Selatan.

**Tabel 2.8**  
**Penggunaan Lahan di Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014**

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Air Empang	0,33	0,00
2	Air Rawa	157,66	0,07
3	Air Tawar Sungai	695,07	0,30
4	Hutan Rimba	214.241,34	92,98
5	Pasir/Bukit Pasir Darat	118,47	0,05
6	Pasir/Bukit Pasir Laut	129,48	0,06
7	Perkebunan/Kebun	1.709,80	0,74
8	Permukiman dan Tempat Kegiatan	460,08	0,20
9	Sawah	565,00	0,25
10	Semak Belukar/Alang-alang	5.230,99	2,27
11	Tanah Kosong/Gundul	5.447,65	2,36
12	Tegalan/Ladang'	1.668,81	0,72
<b>Jumlah</b>		<b>230.424,68</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Bappeda Kabupaten Manokwari Selatan



### 2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Manokwari Selatan akan memberikan arahan bagi pengambil kebijakan dalam meningkatkan peranan daerah untuk perwujudan tujuan pembangunan. Berikut potensi pengembangan wilayah Kabupaten Manokwari yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam mengakselerasi capaian pembangunan daerah terutama dalam mempercepat pertumbuhan perekonomian daerah.

#### a. Pertambangan

Potensi pertambangan yang dimiliki oleh Kabupaten Manokwari Selatan sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.9**  
**Potensi Pertambangan di Kabupaten Manokwari Selatan**

No	Jenis Bahan Tambang	Volume Cadangan	Lokasi
1	Timah	18,05 juta ton	Ransiki
2	Batu Gamping	2,80 milyar ton	Oransbari
3	Granit	96,83 milyar ton	Ransiki
4	Batu Gunung Api	Lebih dari 1 milyar ton	Oransbari
5	Batubara	Belum diketahui	Dataran Isim

*Sumber: Bappeda Kabupaten Manokwari Selatan*

#### b. Pertanian

Kabupaten Manokwari Selatan sangat berpotensi besar di bidang pertanian tanaman pangan. Sentra produksi padi di Kabupaten Manokwari Selatan terdapat di Distrik Oransbari, dari luas panen 720 Ha, dapat berproduksi sebanyak 3.500 ton atau rata-rata 4,86 Ton/ Ha. Sedangkan potensi pengembangan padi ladang di Ransiki, dengan luas 72 Ha mampu menghasilkan 152 Ton atau 2,11 Ton/Ha. Selain tanaman pangan padi, masyarakat juga mengembangkan ubi kayu, ubi jalar, jagung, dan sayuran

Di Kabupaten Manokwari Selatan terdapat 41.900 hektar lahan yang berpotensi untuk pengembangan komoditas perkebunan. Potensi lahan tersebut pada umumnya masih berupa hutan dan merupakan milik hak ulayat masyarakat, tersebar di Distrik Oransbari 10.600 hektar dan Distrik Ransiki 31.300 hektar.

Komoditas ternak yang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Manokwari Selatan adalah sapi. Selain itu, juga potensial untuk pengembangan kambing, itik, ayam buras maupun babi. Untuk komoditas sapi, usaha yang dilakukan dapat berupa penggemukan maupun



breeding. Untuk sentra peternakan sapi berada di Distrik Oransbari dan Momiwaren. Sedangkan untuk peternakan kecil seperti kambing, tersentra pada wilayah Distrik Oransbari, sementara peternakan babi tersebar di seluruh distrik.

Pembangunan perikanan tangkap di Kabupaten Manokwari Selatan mempunyai prospek yang menjanjikan, karena didukung dengan ketersediaan potensi sumberdaya ikan pelagis maupun ikan demersal dalam berbagai jenis. Selain itu potensi sumberdaya bentik yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai komoditi perikanan potensial seperti Moluska (Siput dan Kerang), Ekhinodermata (Teripang dan Lili Laut), Krustasea (Rajungan, Udang Barong dan Udang Penaid), Porifera (Spons). Potensi Perikanan lainnya seperti ikan budidaya atau air tawar juga terus dikembangkan di beberapa distrik, melalui pengembangan kolam ikan rakyat.

### c. Pariwisata

Potensi pariwisata di Kabupaten Manokwari Selatan sama dengan wilayah lain di Papua yaitu wisata alam dan sejarah. Meskipun masih minim, namun potensi pariwisata di Kabupaten Manokwari Selatan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat utamanya dalam meningkatkan perekonomian bagi penduduk di wilayah sekitarnya. Data potensi pariwisata di Kabupaten Manokwari Selatan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.10**  
**Kawasan Obyek Wisata**  
**di Kabupaten Manokwari Selatan**

No	Kawasan Objek Wisata	Daya Tarik Objek Wisata	Lokasi
1	Peninggalan PD II Moumi	Peralatan militer sisa PD II	Ransiki
2	Gunung Botak	Panorama Alam	Momiwaren

*Sumber: Bappeda Kabupaten Manokwari Selatan*

#### 2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah Kabupaten Manokwari Selatan merupakan kawasan rawan bencana alam (Gempa Bumi dan Tsunami) karena Wilayah Kabupaten Manokwari Selatan berada disekitar daerah patahan yang dikenal sebagai sesar Sorong dan Ransiki. Selain Bencana alam, bencana yang juga dapat mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya adalah bencana lingkungan berupa longsor, banjir dan erosi, kekeringan dan pencemaran lingkungan. Bencana lingkungan terjadi akibat ulah manusia yang mengabaikan prinsip-prinsip Pembangunan berwawasan lingkungan. Untuk itu pemanfaatan sumber daya alam harus di arahkan pada pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lingkungan hidup yang mandiri secara bijak dan berkelanjutan.





Berikut beberapa kawasan rawan bencana yang terdapat di Kabupaten Manokwari Selatan:

- Rawan tsunami, yang meliputi wilayah pesisir khususnya Distrik Oransbari, Ransiki, Momi Waren;
- Rawaan gempa bumi hanya berada di Distrik Ransiki, Dataran Isim dan Momi Waren;
- Rawan Banjir hanya berada pada Distrik Oransbari dan Ransiki.

**Gambar 2. 3**  
**Kawasan Rawan Bencana di Kabupaten Manokwari Selatan**



#### 2.1.4. Demografi

Aspek demografi adalah merupakan aspek penting dalam pembangunan daerah karenanya aspek tersebut memberikan gambaran tentang ukuran, struktur, maupun distribusi atau persebaran penduduk baik secara *series* maupun kewilayahan. Analisis aspek demografi ini menjadi penting mengingat pelaksana utama pembangunan sekaligus obyek pembangunan adalah penduduk, sehingga keterkaitan antara demografi dengan aspek-aspek lain menjadi penting dan strategis untuk diperhatikan secara seksama.

Demografi merupakan ilmu yang dapat menggambarkan dan mempelajari segala persoalan-persoalan kependudukan suatu wilayah dari segi kuantitas, distribusi hingga komponen-komponen perubahannya. Kondisi demografi di Kabupaten Manokwari Selatan sangat kompleks mengingat wilayah geografis yang begitu terjal sehingga distribusi penduduk dan penyebarannya menjadi aspek penting untuk diperhatikan. Fenomena penyebaran penduduk yang tidak merata di daerah dapat menimbulkan tantangan tersendiri dalam membuat dan merumuskan kebijakan kependudukan. Hal ini perlu menjadi perhatian penting agar hasil pembangunan dapat dirasakan setiap lapisan masyarakat di seluruh kampung dan distrik di seluruh wilayah Manokwari Selatan.

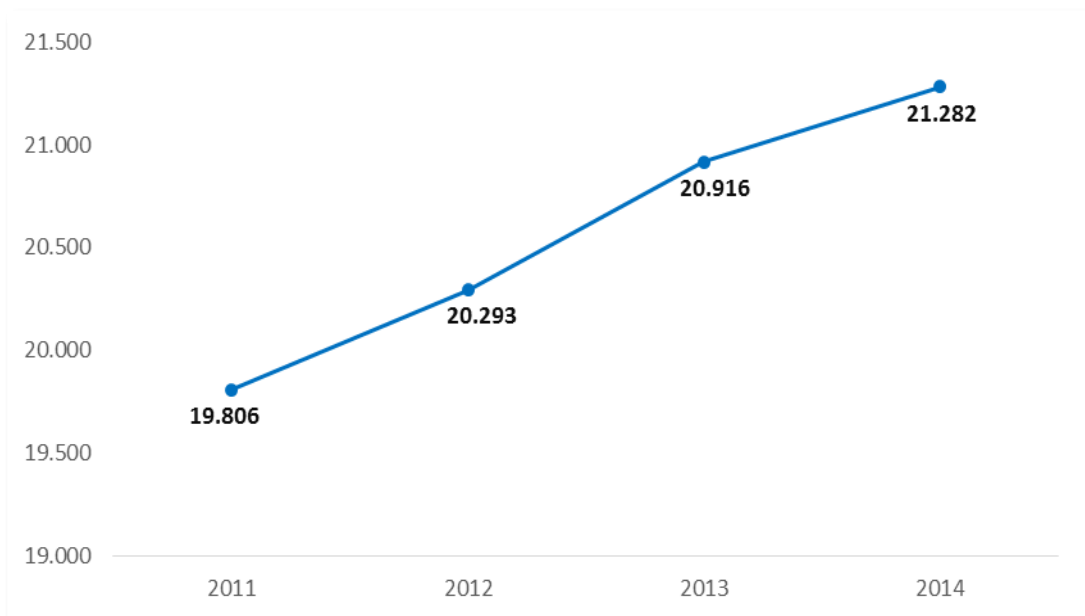




### a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Manokwari Selatan terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya, meskipun masih cukup rendah dan berfluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014, jumlah penduduk mencapai 21.282 jiwa, dimana pertumbuhannya hanya sebesar 1,75 persen dari tahun sebelumnya sebanyak 20.916 jiwa.

**Gambar 2. 4**  
**Jumlah Penduduk**  
**Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2011-2014 (Jiwa)**



Sumber: Kabupaten Manokwari Selatan Dalam Angka, 2015

Sedikitnya penduduk dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir dikarenakan oleh kurangnya daya tarik wilayah tersebut untuk aktivitas ekonomi, disamping faktor-faktor lain secara geografis, sehingga proses migrasi penduduk sebagaimana yang terjadi di beberapa wilayah Papua Barat, seperti kabupaten induk tidak begitu signifikan untuk meningkatkan angka migrasi. Oleh karena itulah pertumbuhan penduduk daerah sebagian besar hanya merupakan pertumbuhan alami.

Penduduk yang menetap di Kabupaten Manokwari Selatan terdiri dari penduduk:

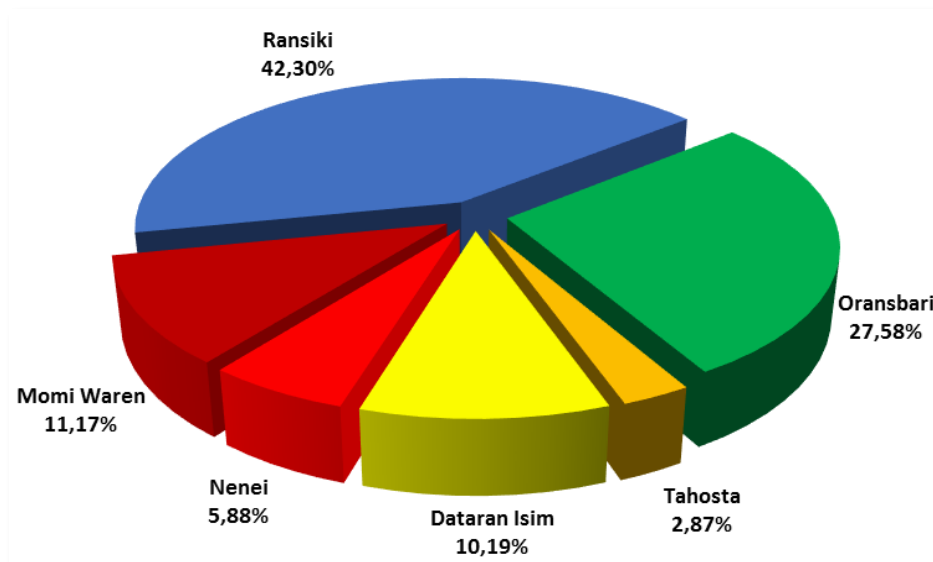
1. Penduduk asli terdiri dari Suku Saugh dan Hatam.
2. Penduduk pendatang berasal dari luar Kabupaten Manokwari Selatan, yaitu:
  - Suku Buton.
  - Suku Bugis-Makasar.
  - Suku Jawa.



**b. Distribusi dan Kepadatan Penduduk**

Penyebaran penduduk yang tidak merata pada setiap distrik di wilayah Kabupaten Manokwari Selatan ini berakibat pada ketimpangan distribusi capaian pembangunan antar wilayah di seluruh distrik maupun kampung. Disparitas dan ketimpangan pembangunan antar wilayah selanjutnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Manokwari Selatan secara keseluruhan. Sebagai gambaran nyata pada saat ini, sebagian besar penduduk Kabupaten Manokwari Selatan, sebanyak 42,30 persen berdomisili di Distrik Ransiki atau sebanyak 9.003 jiwa dan 27,58 persen berdomisili di Distrik Oransbari atau sebanyak 5.869 jiwa.

**Gambar 2. 5**  
**Persentase Penyebaran Penduduk Menurut Distrik**  
**Kabupaten Manokwari Selatan, 2014**



Sumber: Kabupaten Manokwari Selatan Dalam Angka, 2015

Jika dilihat berdasarkan kepadatan penduduknya, penduduk paling padat berada pada wilayah Distrik Oransbari yang mencapai 16 jiwa per km<sup>2</sup> dan Distrik Dataran Isim yang mencapai kepadatan penduduk 10 jiwa per km<sup>2</sup>. Sedangkan secara keseluruhan, kepadatan



penduduk di Kabupaten Manokwari Selatan, hanya didiami oleh kurang lebih sebanyak 7-8 jiwa per km<sup>2</sup>.

**Tabel 2.11**  
**Jumlah Penduduk, Rumah Tangga, dan Kepadatan Penduduk**  
**Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014**

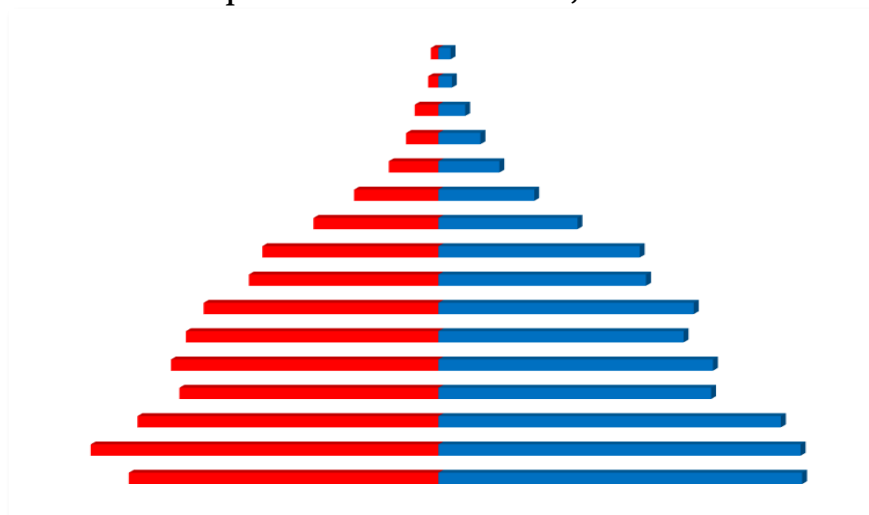
Distrik	Luas (Km2)	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumahtangga	Kepadatan Penduduk
Tahosta	178,22	611	147	3,43
Dataran Isim	214,89	2.169	550	10,09
Nenei	436,18	1.252	278	2,87
Momi Waren	440,00	2.378	576	5,40
Ransiki	1.180,20	9.003	1.917	7,63
Oransbari	362,95	5.869	1.409	16,17
<b>Jumlah</b>	<b>2.812,44</b>	<b>21.282</b>	<b>4.877</b>	<b>7,57</b>

*Sumber: Kabupaten Manokwari Selatan Dalam Angka, 2015*

#### c. Piramida Penduduk

Piramida penduduk merupakan sebuah gambaran awal mengenai struktur umur penduduk, baik untuk dianalisis mengenai produktivitas umurnya maupun analisis keberhasilan program-program kependudukan selama ini (utamanya Keluarga Berencana).

**Gambar 2. 6**  
**Piramida Penduduk**  
**Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014**



*Sumber: Kabupaten Manokwari Selatan Dalam Angka, 2015*

Di Kabupaten Manokwari Selatan, terlihat bahwa sebagian besar penduduk berada pada usia muda yang mengindikasikan masih tingginya pertumbuhan penduduk alami. Namun semakin tinggi kelompok umur maka semakin mengerucut secara signifikan dimana hal



tersebut mengindikasikan sedikitnya penduduk yang bertahan hidup hingga kelompok umur yang lebih tua. Secara eksplisit dapat dipastikan bahwa penurunan signifikan ini dikarenakan faktor tingginya tingkat kematian yang berarti masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat Manokwari Selatan.

## **2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Fokus kesejahteraan masyarakat pada gambaran umum kondisi Kabupaten Manokwari Selatan menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan Kabupaten Manokwari Selatan yang ditinjau dari sisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta kesejahteraan sosial. Pada aspek ini akan terlihat sebuah “potret kehidupan” masyarakat Kabupaten Manokwari Selatan serta analisis dan kajian singkat terkait kehidupan sosial ekonomi secara umum yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya daerah.

### **2.2.1. Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi**

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ini menjabarkan hasil pembangunan Kabupaten Manokwari Selatan utamanya terkait bidang perekonomian wilayah. Fokus ini mengkaji lebih dalam berbagai indikator-indikator perekonomian baik makro maupun mikro yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan esensi dari pergerakan roda perekonomian (pembangunan perekonomian) Kabupaten Manokwari Selatan meskipun masih tergolong daerah pemekaran baru.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan transformasi kegiatan perekonomian dari primer ke sekunder dan tersier. Oleh karena itu, penting adanya melihat berbagai indikator pada tujuan pembangunan tersebut demi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Indikator-indikator utama yang digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Kabupaten Manokwari Selatan antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur perekonomian wilayah, Laju Pertumbuhan Ekonomi, laju inflasi, hingga angka kemiskinan. Indikator-indikator ini nantinya menjadi salah satu dasar utama bagi perencanaan pembangunan, terutama dalam monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan nasional.



### a. Nilai Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu indikator kinerja pembangunan perekonomian daerah yang menunjukkan suatu besaran atau nilai tambah bruto (kotor) dari keseluruhan barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di Kabupaten Manokwari Selatan yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi. PDRB Kabupaten Manokwari Selatan menggambarkan kemampuan atau potensi ekonomi dan kinerja perekonomian daerah baik dalam pengelolaan sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Kemampuan, potensi, dan kinerja sumber daya alam maupun sumber daya manusia dalam mengembangkan perekonomian daerah sangat penting untuk dianalisis guna evaluasi, monitoring, hingga perencanaan pembangunan berbasis ekonomi.

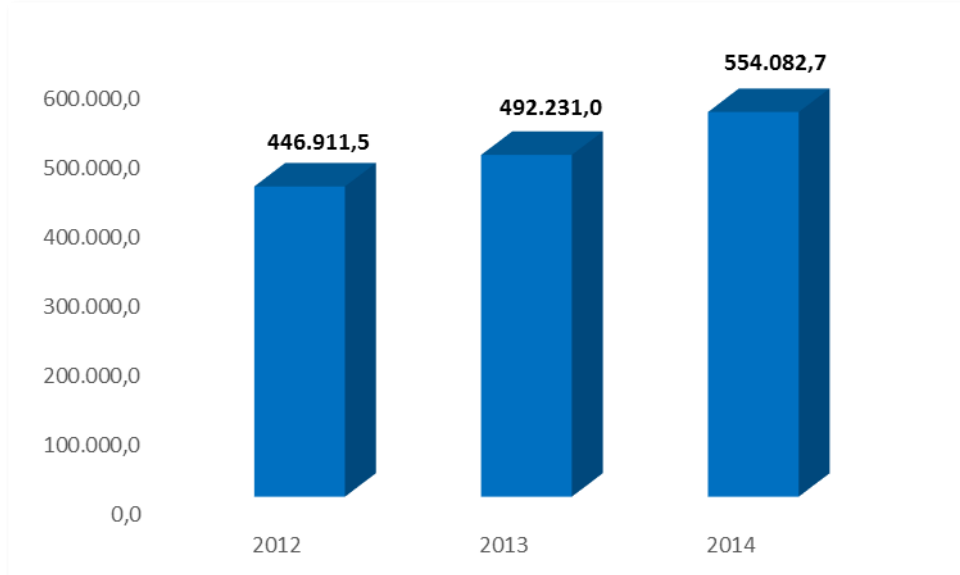
Pada penghitungan periode ini, metode penghitungan PDRB mengalami perubahan baik terkait tahun dasar maupun metodologi penghitungan. Rincian sektor lapangan usaha pada PDRB meningkat menjadi 17 kategori dimana sebelumnya hanya 9 sektor lapangan usaha. Peningkatan cakupan kategori ini juga menimbulkan efek berupa revisi dan penyempurnaan nilai PDRB pada lima tahun terakhir sehingga analisis periodik juga terbatas pada penghitungan dengan metode yang baru.

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Manokwari Selatan mengalami peningkatan di setiap tahunnya dimana pada tahun 2012 mencapai Rp. 446,91 milyar hingga pada tahun 2014 mencapai Rp. 554,08 milyar. Hal ini mengindikasikan pergerakan ekonomi secara agregat di setiap sektor lapangan usaha mengalami kenaikan secara akumulatif.

Jika dilihat pada setiap sektor lapangan usaha, maka terlihat bahwa pada setiap kategori mengalami peningkatan nilai PDRB utamanya pada sektor-sektor lapangan usaha dominan seperti sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang mencapai Rp. 365,62 milyar maupun Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang mencapai Rp. 102,70 milyar pada tahun 2014.



**Gambar 2. 7**  
**Nilai Produk Domestik Regional Bruto**  
**Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2012-2014 (Juta Rupiah)**



Sumber: PDRB Kabupaten Manokwari Selatan, 2015

**Tabel 2.12**  
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2012-2014**

Kategori	Lapangan Usaha	2012	2013	2014
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	304.125,5	331.616,4	365.617,5
B	Pertambangan dan Penggalian	2.393,5	2.454,4	2.689,2
C	Industri Pengolahan	4.252,4	4.475,9	4.877,4
D	Pengadaan Listrik dan Gas	500,7	476,7	585,8
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,0	0,0	0,0
F	Konstruksi	11.456,9	13.794,1	18.580,8
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.995,5	5.402,3	6.396,3
H	Transportasi dan Pergudangan	10.012,1	10.893,2	13.044,2
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.411,8	1.593,1	1.785,9
J	Informasi dan Komunikasi	840,3	901,3	1.036,5
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.082,2	2.760,5	3.253,2



Kategori	Lapangan Usaha	2012	2013	2014
L	Real Estat	1.274,4	1.428,2	1.621,3
M,N	Jasa Perusahaan	396,4	441,2	506,8
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	78.677,5	88.554,9	102.699,5
P	Jasa Pendidikan	13.682,6	15.668,5	18.474,5
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.920,7	6.124,0	6.807,5
R,S,T,U	Jasa Lainnya	4.889,0	5.646,3	6.106,3
<b>Total</b>		<b>446.911,5</b>	<b>492.231,0</b>	<b>554.082,7</b>

Sumber: PDRB Kabupaten Manokwari Selatan, 2015

### b. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu titik tolak pembangunan suatu daerah yaitu dengan melihat pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat memang menjadi syarat utama atau indikator keberhasilan pembangunan itu sendiri. Pembangunan ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan output (tergantung dari jenis output yang diharapkan/ditetapkan) dalam jangka panjang.

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro dalam melihat perkembangan perekonomian suatu daerah, sehingga keberhasilan pembangunan daerah secara umum dapat terukur. Oleh karena itulah, indikator ini dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan ke depannya, baik dengan melihat pertumbuhan ekonomi secara periodik maupun pertumbuhan ekonomi sektor lapangan usaha yang potensial. Untuk Kabupaten Manokwari Selatan sendiri indikator ini menjadi penting mengingat masih merupakan daerah administrasi baru sehingga perlu adanya berbagai perencanaan perekonomian yang lebih baik dan terstruktur.

Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Manokwari Selatan cukup stabil pada angka 5,84 persen. Angka pertumbuhan ekonomi ini tergolong stabil, mengingat Kabupaten Manokwari Selatan merupakan daerah baru maka masih memerlukan *performa* perekonomian yang lebih baik untuk “menggenjot” berbagai lini sektor lapangan usaha agar lebih memiliki daya saing. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi para pengambil kebijakan terutama dalam bidang perekonomian wilayah untuk meningkatkan nilai tambah produk, baik unggulan daerah maupun sektor lapangan usaha yang memiliki potensi untuk dikembangkan pada masa depan dengan tetap berpegang pada pembangunan berkelanjutan.



Jika dilihat berdasarkan sektoralnya, pertumbuhan ekonomi sektoral paling tinggi adalah sektor konstruksi dimana pada tahun 2014 mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 27,20 persen dan berikutnya merupakan sektor transportasi dan pergudangan yang mencapai pertumbuhan sebesar 13,60 persen. Selain itu, sektor unggulan perekonomian daerah yakni sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki pertumbuhan ekonomi sektoral mencapai 3,78 persen dimana meskipun hanya tumbuh sedikit namun andilnya dalam pembentukan perekonomian wilayah berdampak cukup signifikan.

**Tabel 2.13**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi**  
**Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2013-2014**

Kategori	Lapangan Usaha	2013	2014
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,31	3,78
B	Pertambangan dan Penggalian	2,41	0,92
C	Industri Pengolahan	4,44	4,43
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,63	3,99
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,00	0,00
F	Konstruksi	9,96	27,20
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,86	9,36
H	Transportasi dan Pergudangan	3,52	13,60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,44	5,90
J	Informasi dan Komunikasi	7,85	12,35
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	25,32	10,79
L	Real Estat	3,91	7,66
M,N	Jasa Perusahaan	5,23	6,38
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,31	9,36
P	Jasa Pendidikan	9,91	9,24
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,24	4,59
R,S,T,U	Jasa Lainnya	7,26	7,13
<b>Total</b>		<b>5,44</b>	<b>5,84</b>

Sumber: PDRB Kabupaten Manokwari Selatan, 2015



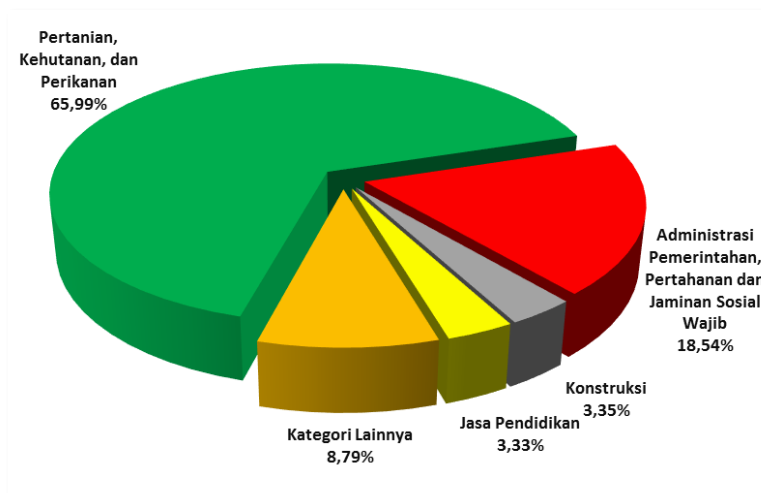


### c. Struktur ekonomi wilayah

Struktur perekonomian daerah memberikan gambaran terkait sektor-sektor yang memiliki andil dalam pergerakan perekonomian daerah dimana dari struktur ini akan memperlihatkan dominasi-dominasi sektoral dalam meningkatkan nilai tambah produk daerah. Dari gambar di bawah ini terlihat begitu besar dominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam pembentukan nilai PDRB Kabupaten Manokwari Selatan. Hal ini mengindikasikan tingginya andil atau kontribusi sektor tersebut dalam pertumbuhan ekonomi maupun dalam pergerakan perekonomian wilayah khususnya dalam membangun kualitas kehidupan masyarakat.

Meskipun secara *series* terlihat penurunan kontribusi, namun sektor pertanian, kehutanan, dan pertanian masih memiliki andil yang besar mencapai 65,99 persen pada pembentukan PDRB dimana nilai PDRB atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 365,62 milyar. Selain itu, terdapat juga sektor yang cukup memberi andil dalam pembentukan PDRB yakni sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang mencapai 18,54 persen pada tahun 2014.

**Gambar 2. 8**  
**Struktur Ekonomi Wilayah Menurut Kategori**  
**Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014**



Sumber: PDRB Kabupaten Manokwari Selatan, 2015



**Tabel 2.14**  
**Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2012-2014**

Kategori	Lapangan Usaha	2012	2013	2014
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	68,05	67,37	65,99
B	Pertambangan dan Penggalian	0,54	0,50	0,49
C	Industri Pengolahan	0,95	0,91	0,88
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,10	0,11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,00	0,00	0,00
F	Konstruksi	2,56	2,80	3,35
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,12	1,10	1,15
H	Transportasi dan Pergudangan	2,24	2,21	2,35
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,32	0,32	0,32
J	Informasi dan Komunikasi	0,19	0,18	0,19
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,47	0,56	0,59
L	Real Estat	0,29	0,29	0,29
M,N	Jasa Perusahaan	0,09	0,09	0,09
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	17,60	17,99	18,54
P	Jasa Pendidikan	3,06	3,18	3,33
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,32	1,24	1,23
R,S,T,U	Jasa Lainnya	1,09	1,15	1,10
<b>Total</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: PDRB Kabupaten Manokwari Selatan, 2015

#### d. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kemiskinan juga merupakan sebuah permasalahan klasik dan kontinyu yang selalu ada dan berkembang di suatu wilayah khususnya Kabupaten Manokwari Selatan sebagai daerah pemekaran baru. Oleh karena itu, tugas utama pemerintah terkait kemiskinan adalah berusaha meminimalisir dan memberdayakan masyarakat sehingga memiliki daya saing dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Indikator yang sangat nyata



dalam melihat kemiskinan di suatu wilayah adalah tingkat kemiskinan yang menyatakan persentase penduduk miskin terhadap keseluruhan penduduk di wilayah tersebut.

Berdasarkan data Simpadu PNPM Mandiri pada tahun 2012, angka kemiskinan di Kabupaten Manokwari Selatan sangat tinggi hingga mencapai 67,33 persen jauh di atas kemiskinan Kabupaten Manokwari sebagai kabupaten induknya yang memiliki angka kemiskinan sebesar 37,27 persen. Dominasi kemiskinan berada pada Distrik Dataran Isim dan Distrik Nenei yang mencapai 75 persen dan terendah pada Distrik Momi Waren dan Tahota yang berada pada kisaran 25-50 persen. Namun jika dilihat dari jumlah absolutnya, maka jumlah penduduk miskin paling banyak mendiami wilayah Distrik Ransiki dan Distrik Oransbari.

### 2.2.2. Fokus kesejahteraan masyarakat

Fokus kesejahteraan sosial masyarakat dalam analisis hasil pembangunan Kabupaten Manokwari Selatan selama ini dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain aspek kependudukan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, hingga seni budaya dan olahraga. Namun dari aspek-aspek tersebut terdapat aspek utama sekaligus *ultimate impact* dalam melihat kesejahteraan sosial masyarakat yakni melalui analisis pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun ke tahun. Dengan menggabungkan tiga komponen dasar yakni kesehatan, pendidikan dan ekonomi, menjadikan IPM sebagai salah satu indeks acuan pembangunan suatu daerah untuk memonitoring dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.

#### a. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat) dan horizontal (kehidupan lebih baik dari segala bidang). Pembangunan suatu daerah sendiri tercapai apabila setiap orang memperoleh peluang seluas-luasnya untuk hidup sehat, berpendidikan dan berketrampilan serta mampu mencukupi kebutuhan baik primer, sekunder maupun tersier. Untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia perlu adanya pemotretan hasil pembangunan manusia yang sudah dilakukan guna evaluasi perbaikan ke depannya. Pengukuran tingkat keberhasilan pembangunan manusia dilakukan dengan menggunakan IPM sebagai indeks komposit yang dapat diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia.

Indeks pembangunan manusia atau *Human Development Index (HDI)* yang diperkenalkan oleh *United Nations Development Programmes (UNDP)* sejak tahun 1990 adalah sebuah indeks



komposit untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara/wilayah dalam bidang pembangunan manusia. Pada periode ini, IPM dihitung dengan menggunakan metodologi baru utamanya dalam pendekatan penghitungan indeks pendidikan. Pada metode baru ini, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup Angka Harapan Hidup (kesehatan), Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah (pendidikan), dan Daya Beli Per Kapita (standar hidup layak/ekonomi).

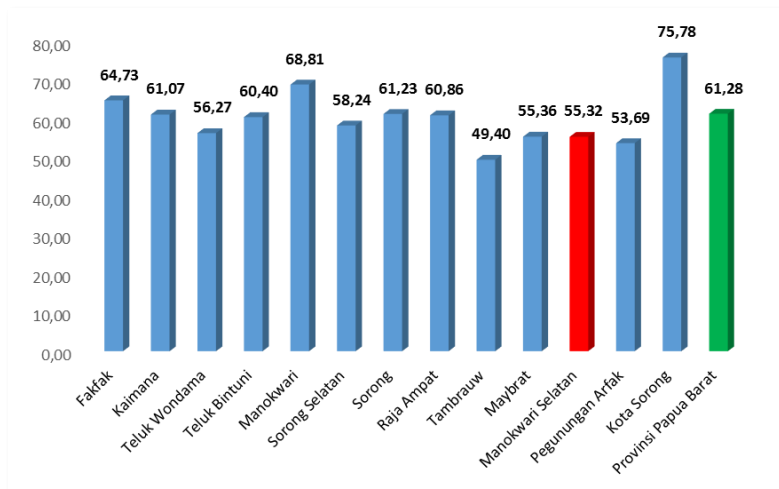
Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Manokwari Selatan mencapai 55,32 dimana pada tahun sebelumnya mencapai 54,95. Komponen penyusun IPM pun juga seluruhnya mengalami peningkatan dimana angka harapan hidup mencapai 66,67; harapan lama sekolah selama 12,18 tahun; rata-rata lama sekolah selama 6,20 tahun, dan pengeluaran per kapita (d disesuaikan) sebesar Rp. 4.149,-.

**Tabel 2.15**  
**Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Penyusunnya**  
**Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2013-2014**

No	Komponen	2013	2014
1	Angka Harapan Hidup	66,40	66,67
2	Angka Harapan Lama Sekolah	12,13	12,18
3	Rata-rata Lama Sekolah	6,12	6,20
4	Pengeluaran perkapita	4.109	4.149
<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>		<b>54,95</b>	<b>55,32</b>

Sumber: BPS Kabupaten Manokwari, 2015

**Gambar 2.9**  
**Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Papua Barat, Tahun 2014**



Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2015

Kenaikan IPM ini menjadi salah satu informasi positif bagi pembangunan daerah dimana terdapat capaian yang meningkat dalam peningkatan kualitas pembangunan sumber



daya manusia. Meskipun begitu, capaian ini meskipun meningkat dari tahun sebelumnya namun cukup memprihatinkan mengingat Kabupaten Manokwari Selatan menduduki peringkat tiga terbawah se-Provinsi Papua Barat di atas Kabupaten Tambrauw (49,40) dan Pegunungan Arfak (53,69). Sedangkan angka IPM Provinsi Papua Barat sendiri mencapai 61,28 pada tahun 2014.

### **b. Pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam peningkatan potensi dan daya saing sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan, dengan memiliki pendidikan yang berkualitas maka setiap penduduk memiliki lebih banyak kesempatan dalam memperbaiki kualitas kehidupannya dari mulai mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, pendapatan lebih layak, hingga kehidupan yang lebih sejahtera. Dari komponen penyusun IPM yakni angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah dapat terlihat bagaimana kualitas pendidikan masyarakat Manokwari Selatan.

Rata-rata lama sekolah merupakan suatu indikator yang menggambarkan rata-rata lama sekolah penduduk di suatu wilayah dalam mengenyam jenjang pendidikan. Di Kabupaten Manokwari Selatan, rata-rata lama sekolah penduduk mengalami peningkatan hingga mencapai 6,20 tahun mengenyam pendidikan. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk Manokwari Selatan rata-rata telah mengenyam pendidikan hingga jenjang pendidikan SMP kelas 1 semester 1.

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah merupakan salah satu indikator baru dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang peningkatan tiap agregat indeks tersebut menunjukkan peningkatan pembangunan di bidang pendidikan. Harapan Lama Sekolah mengindikasikan harapan penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan ke depannya untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh. Pada tahun 2014, angka harapan lama sekolah penduduk Manokwari Selatan mencapai 12,18 tahun dimana angka tersebut mengasumsikan bahwa penduduk yang memasuki usia sekolah pada tahun 2014 memiliki harapan untuk mengenyam jenjang pendidikan hingga mencapai perguruan tinggi semester 1 (12-13 tahun masa sekolah).



**Tabel 2.16**  
**Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah**  
**Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2013-2014**

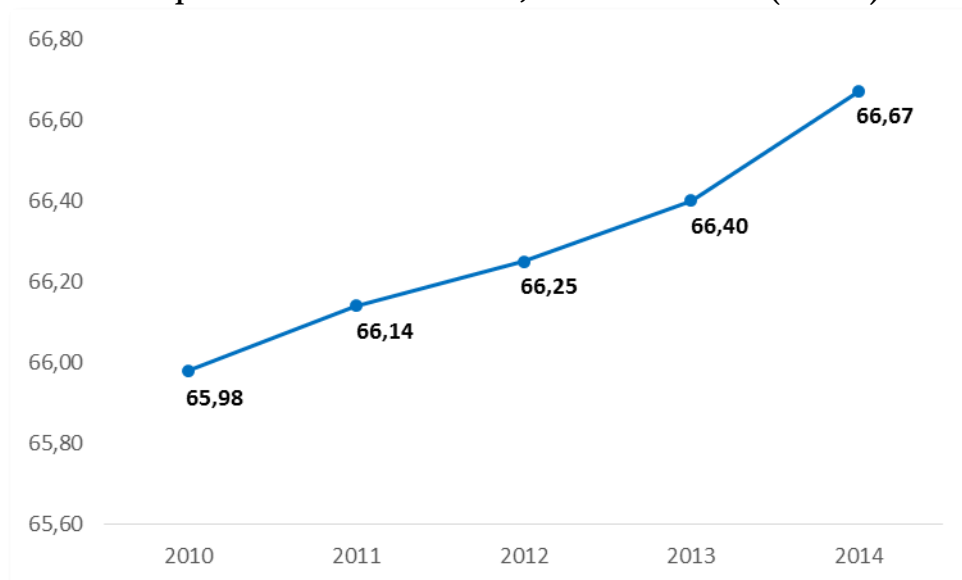
No	Komponen	2013	2014
1	Angka Harapan Lama Sekolah	12,13	12,18
2	Rata-rata Lama Sekolah	6,12	6,20

*Sumber: BPS Kabupaten Manokwari, 2015*

### c. Kesehatan

Kesehatan merupakan modal dasar bagi manusia untuk melakukan aktivitas kesehariannya baik dalam beraktivitas ekonomi maupun lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa pergerakan perekonomian maupun pembangunan daerah sangat tergantung pada derajat kesehatan suatu masyarakat dalam hal ini Kabupaten Manokwari Selatan. Indikator kinerja pembangunan di bidang kesehatan diwakili oleh Angka Harapan Hidup yang merupakan salah satu indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia. Angka Harapan Hidup mengindikasikan peluang bayi yang baru lahir akan mencapai usia harapan hidup sekian tahun.

**Gambar 2.10**  
**Angka Harapan Hidup**  
**Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2010-2014 (Tahun)**



*Sumber: BPS Kabupaten Manokwari, 2015*

Angka Harapan Hidup masyarakat Kabupaten Manokwari Selatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga mencapai 66,67 tahun pada tahun 2014. Angka ini



mengindikasikan bahwa masyarakat Kabupaten Manokwari Selatan yang lahir pada tahun 2014 memiliki harapan hidup hingga usia 66-67 tahun lamanya. Peningkatan angka harapan hidup ini menggambarkan meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat sehingga derajat kesehatan yang optimal dapat terealisasi dengan menurunnya angka kematian usia tua.

### **2.3. Aspek Pelayanan Umum**

Pada bagian aspek pelayanan umum akan dijelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan sebelum mekar (Pemerintah Kabupaten Manokwari) maupun setelah pemekaran, baik pada urusan pelayanan wajib dan urusan pilihan. Berikut penjabaran aspek pelayanan umum sebagai bagian dari hasil pembangunan daerah selama ini.

#### **2.3.1. Fokus layanan urusan wajib**

Urusan pelayanan wajib kepada masyarakat merupakan urusan pemerintahan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah karena berkaitan dengan pelayanan dasar terhadap kebutuhan masyarakat. Secara umum, penyelenggaraan pelayanan dasar Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan masih belum optimal yang terlihat masih minmnya berbagai pelayanan-pelayanan dasar kehidupan masyarakat. Hal ini sangat mempengaruhi dalam pembangunan ke depannya jika tidak dilakukan perbaikan tatanan pelayanan masyarakat secara berkualitas dan menyeluruh. Berikut indikator kinerja hasil pembangunan daerah yang merupakan gambaran pelayanan urusan wajib Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan hingga saat ini.

##### **a. Pendidikan**

Pelayanan pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar khusus yang wajib untuk diberikan kepada masyarakat sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pelayanan pendidikan ini harus dilaksanakan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas subyek pembangunan untuk mengoptimalkan setiap lini pembangunan daerah utamanya pada masa mendatang. Oleh karena itulah, pendidikan harus menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan terutama dalam hal peningkatan kualitas dan pemerataan fasilitas pendidikan dasar.

Di Kabupaten Manokwari Selatan, jumlah sekolah masih cukup minim dimana sekolah dasar hanya berjumlah 41 unit, sekolah menengah pertama 10 unit, sekolah menengah atas 4 unit, dan pendidikan kejuruan 1 unit. Selain minim dari segi kuantitasnya, ketersediaan sekolah juga masih kurang pemerataannya dimana hal tersebut berdampak pada penduduk usia sekolah yang enggan mengikuti kegiatan belajar mengajar disamping alasan lain seperti kurangnya dukungan orang tua atau belum sadarnya arti penting pendidikan masa depan.



Ketersediaan guru sekolah dasar juga masih perlu untuk dipenuhi mengingat rasio murid terhadap guru mencapai 34-35 murid per satu orang guru.

Permasalahan mendasar pada pendidikan di Kabupaten Manokwari Selatan adalah terkait kualitas dan distribusi/persebaran pelayanan pendidikan yang memadai serta sosialisasi pentingnya pendidikan untuk masa depan keluarga. Oleh karena itu, perlu adanya analisis lebih lanjut dalam kaitannya dengan pendidikan dan program-program prioritas khusus untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan masyarakat.

**Tabel 2.17**  
**Rasio Murid-Sekolah dan Murid-Guru**  
**Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014**

No	Jenjang Pendidikan	Sekolah	Guru	Murid	Rasio Murid-Sekolah	Rasio Murid-Guru
1	Sekolah Dasar	41	149	5.113	124,71	34,32
2	SLTP	10	70	1.170	117,00	16,71
3	SLTA	4	62	512	128,00	8,26
4	Pendidikan Kejuruan	1	3	110	110,00	36,67

Sumber: Kabupaten Manokwari Selatan Dalam Angka, 2015

#### **b. Kesehatan**

Kesehatan merupakan salah satu modal utama dari sumber daya manusia dalam melaksanakan aktivitas untuk mencapai kesejahteraan hidupnya. Kesehatan juga menjadi prasyarat mutlak bagi penduduk untuk melaksanakan segala program perencanaan pembangunan terkait pendidikan, ketenagakerjaan, perekonomian, bahkan kesehatan itu sendiri. Oleh karena itu, peningkatan bidang kesehatan memiliki *multiplier effect* pada program-program pembangunan ke depannya baik secara langsung maupun tidak langsung

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah melihat bagaimana perkembangan kesehatan masyarakat baik dari segi fasilitas, sarana prasarana, pemerataan kesehatan, maupun tingkat kesehatan penduduk. Terkait hal tersebut, minimnya fasilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Manokwari Selatan menjadi “kambing hitam” pada tingginya angka kematian penduduk yang terlihat dari piramida penduduk. Jika dilihat dari fasilitas kesehatan, maka belum terdapat rumah sakit pemerintah sebagai rujukan puskesmas sehingga rujukan harus dilakukan ke rumah sakit di luar daerah. Pemerataan fasilitas pendidikan dan sosialisasi akan arti pentingnya pencegahan penyakit juga menjadi masalah pokok pada sebagian besar masyarakat utamanya yang tinggal di kampung-kampung





jauh dari pusat keramaian (terpencil/terdalam). Berikut fasilitas kesehatan di Kabupaten Manokwari Selatan.

**Tabel 2.18**  
**Fasilitas Kesehatan Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014**

Distrik	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Polindes/ Poskesdes	Puskesmas Keliling	Posyandu
Ransiki	1	3	3	5	18
Momi Waren	1	1	2	2	5
Nenei	1	2	0	1	3
Tahota	0	1	0	0	1
Dataran Isim	1	4	0	3	3
Oransbari	1	5	2	10	4
<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>21</b>	<b>34</b>

*Sumber: Kabupaten Manokwari Selatan Dalam Angka, 2015*

Jika dilihat dari tenaga kesehatan yang melayani masyarakat Manokwari Selatan, maka secara umum masih terdapat kekurangan baik dari segi kuantitas tenaga kesehatan maupun dari segi kualitasnya. Dokter umum yang sejumlah lima orang belum mencukupi untuk melayani seluruh masyarakat Manokwari Selatan. Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan perlu mengambil keputusan yang bijak dan cepat dalam mengatasi permasalahan ini agar nantinya derajat kesehatan masyarakat meningkat sebagai upaya perwujudan capaian pembangunan kesehatan daerah.

**Tabel 2.19**  
**Pelayanan Kesehatan Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014**

Distrik	Dokter Umum	Paramedis		Non Medis
		Perawat	Non Perawat	
Ransiki	2	24	21	4
Momi Waren	1	5	10	1
Nenei	0	1	2	0
Tahota	0	1	0	0
Dataran Isim	0	5	2	0
Oransbari	2	12	21	1
<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>48</b>	<b>56</b>	<b>6</b>

*Sumber: Kabupaten Manokwari Selatan Dalam Angka, 2015*



Provinsi Papua Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki cukup tinggi penderita HIV-AIDS dimana terjadi kenaikan penderita di setiap tahunnya. Di Kabupaten Manokwari Selatan sendiri, di setiap tahun mengalami penambahan penderita HIV-AIDS dimana pada tahun 2014 mencapai 97 kasus HIV-AIDS baru yang diketahui. Jika dilihat secara agregat, maka hingga tahun 2014 masih terdapat 1.003 penderita HIV-AIDS yang sebagian besar tertular dari faktor resiko hubungan suami-istri (heteroseks).

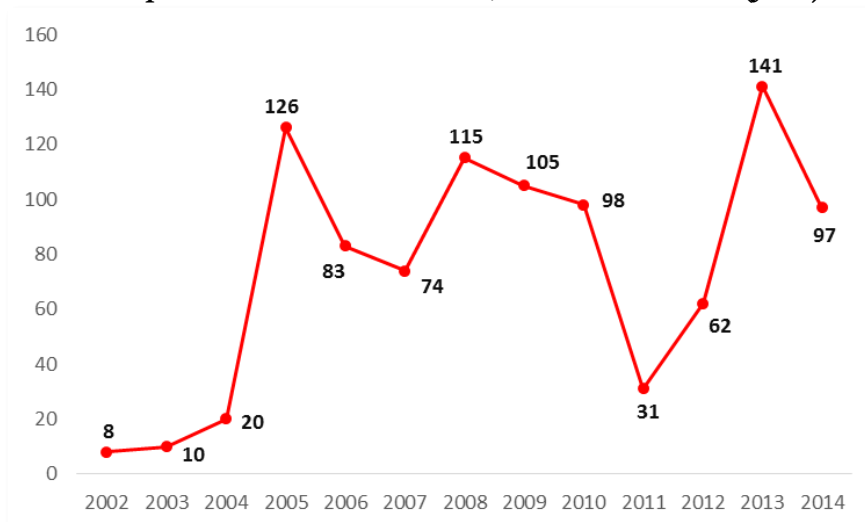
**Tabel 2.20**  
**Jumlah Pasien HIV-AIDS menurut Faktor Resiko**  
**Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014**

No	Faktor Resiko	HIV (+)	AIDS	Jumlah
1	Heteroseks	499	434	933
2	Homobiseks	2	5	7
3	TP/Perinatal	11	15	26
4	IDU	1	0	1
5	Transfusi Darah	0	0	0
6	Hemofilia	0	0	0
7	Tidak Diketahui	16	20	36
<b>Jumlah</b>		<b>529</b>	<b>474</b>	<b>1.003</b>

\* data gabung dengan Kabupaten Manokwari

Sumber: Kabupaten Manokwari Selatan Dalam Angka, 2015

**Gambar 2.11**  
**Kasus Baru HIV-AIDS**  
**Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2002-2014 (Jiwa)**



\* data gabung dengan Kabupaten Manokwari

Sumber: Kabupaten Manokwari Selatan Dalam Angka, 2015



### 2.3.2. Fokus layanan urusan pilihan

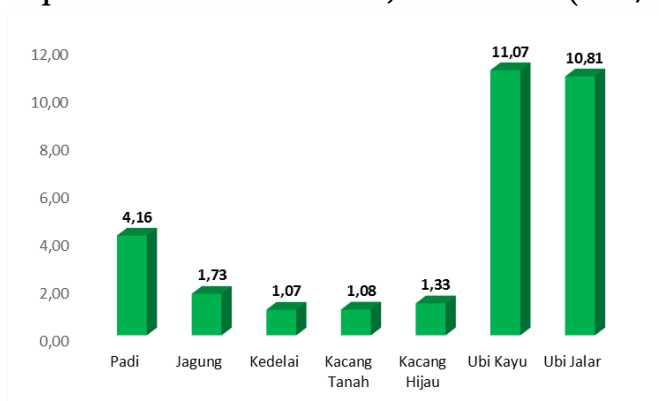
Layanan urusan pilihan merupakan urusan pemerintah daerah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan. Berikut fokus layanan urusan pilihan yang merupakan bagian dari hasil pembangunan daerah dalam berbagai bidang.

#### a. Pertanian

Sektor pertanian menjadi sorotan dalam pengembangan perekonomian daerah Kabupaten Manokwari Selatan. Hal ini dikarenakan sektor tersebut memiliki kontribusi yang sangat tinggi dalam pembentukan struktur perekonomian wilayah hingga mencapai 65,99 persen pada tahun 2014. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian khusus bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem terpadu melalui teknologi tepat guna agar sektor pertanian terus berkembang dan memberikan kontribusi secara optimal bagi pembangunan Kabupaten Manokwari Selatan utamanya para pelaku usaha di sektor pertanian termasuk masyarakat pertanian.

Jika dilihat dari produktivitasnya, maka ubi kayu dan ubi jalar memiliki produktivitas paling tinggi mencapai 11,07 ton/ha dan 10,81 ton/ha pada tahun 2014. Namun jika dilihat dari produksi riilnya, maka komoditas padi menjadi yang terbesar karena pada tahun 2014 memiliki produksi tanaman padi sebanyak 5.901 ton dengan produktivitas sebesar 4,86 ton/ha. Untuk meningkatkan produksi berbagai komoditas pertanian tanaman pangan, Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan perlu memiliki strategis khusus dalam mempertahankan dan meningkatkan berbagai capaian produksi pertanian hingga akhirnya masyarakat pertanian dapat hidup dengan layak.

**Gambar 2. 12**  
**Produktivitas Komoditas Tanaman Pangan**  
**Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014 (Ton/Ha)**



Sumber: Kabupaten Manokwari Selatan Dalam Angka, 2015



**Tabel 2.21**  
**Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Komoditas Tanaman Pangan**  
**Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014**

No	Komoditas	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1	Padi	720	3.500	4,86
2	Jagung	82	142	1,73
3	Kedelai	59	63	1,07
4	Kacang Tanah	39	42	1,08
5	Kacang Hijau	3	4	1,33
6	Ubi Kayu	74	819	11,07
7	Ubi Jalar	57	616	10,81

*Sumber: Bappeda Kabupaten Manokwari*

Produksi perkebunan di Kabupaten Manokwari Selatan yang cukup tinggi adalah perkebunan komoditas coklat dan kelapa dimana pada perkebunan coklat pada tahun 2014 mencapai 1.691 ton dengan produktivitas sebesar 0,69 ton/ha dan perkebunan kelapa memproduksi sebesar 442 ton dengan produktivitas sebesar 1,25 ton/ha.

**Tabel 2.22**  
**Komoditas Unggulan Perkebunan**  
**Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014**

No	Komoditas	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1	Coklat	2452	1.691	0,69
2	Kelapa	354	442	1,25

*Sumber: Kabupaten Manokwari Selatan Dalam Angka, 2015*

#### **b. Kehutanan**

Subsektor pertanian yang dominan dalam pembentukan perekonomian daerah di Kabupaten Manokwari Selatan adalah subsektor kehutanan dimana capaian kontribusi terhadap struktur ekonomi mencapai 20,78 persen. Meskipun begitu, wilayah hutan terluas merupakan Hutan Lindung yang mencapai 30,84 persen (72.080,45 ha) yang artinya masih *concern* nya pemerintah dalam menindaklanjuti pembangunan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Selain Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas juga cukup luas hingga mencapai 28,93 persen (67.603,50 ha) dari total luas hutan.



**Tabel 2.23**  
**Luas Kawasan Hutan Menurut Peta Padu Serasi**  
**Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014**

No	Fungsi Hutan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	APL	3.023,58	1,29
2	HL	72.080,45	30,84
3	HP	40.898,92	17,50
4	HPK	23.926,53	10,24
5	HPT	67.603,50	28,93
6	KSA	26.171,61	11,20
<b>Jumlah</b>		<b>230.424,68</b>	<b>100,00</b>

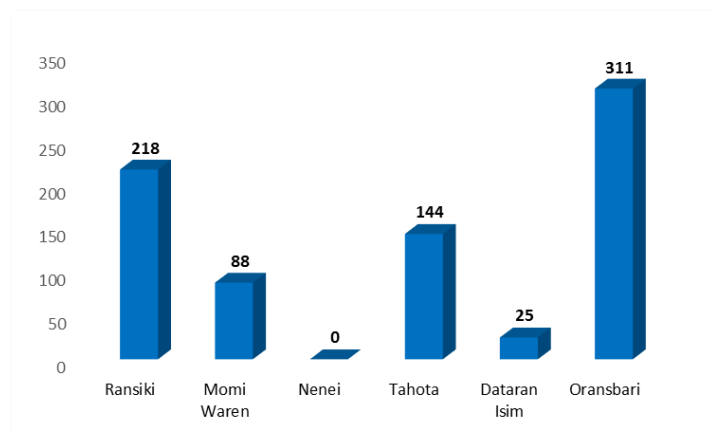
Sumber: Kabupaten Manokwari Selatan Dalam Angka, 2015

### c. Kelautan dan perikanan

Subsektor perikanan juga memiliki andil yang cukup tinggi dalam pergerakan perekonomian daerah Kabupaten Manokwari Selatan yang mencapai 13,52 persen dari struktur perekonomian wilayah. Hal ini menjadikan subsektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu potensi masyarakat maupun pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan melalui eksploitasi dan budidaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Rumah tangga perikanan paling banyak berada pada Distrik Oransbari yang mencapai 311 rumahtangga dan Distrik Ransiki sejumlah 218 rumahtangga. Jika dilihat dari jenisnya, maka sebagian besar aktivitas perikanan dan kelautan merupakan perikanan nelayan tangkap di laut yang mencapai 669 rumah tangga.

**Gambar 2. 13**  
**Banyaknya Rumah Tangga Perikanan**  
**Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014**



Sumber: Kabupaten Manokwari Selatan Dalam Angka, 2015



**Tabel 2.24**  
**Banyaknya Rumah Tangga Perikanan Menurut Subsektor Perikanan**  
**Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014**

No	Distrik	Nelayan Tangkap	Nelayan Budidaya	Jumlah
1	Ransiki	182	36	218
2	Momi Waren	74	14	88
3	Nenei	0	0	0
4	Tahota	144	0	144
5	Dataran Isim	0	25	25
6	Oransbari	269	42	311
<b>Jumlah</b>		<b>669</b>	<b>117</b>	<b>786</b>

Sumber: Kabupaten Manokwari Selatan Dalam Angka, 2015

#### d. Perindustrian

Perkembangan perindustrian di Kabupaten Manokwari tidak terlihat cukup signifikan karena pertumbuhan ekonomi sektoralnya hanya sebesar 4,43 persen dengan kontribusi struktur ekonomi yang cukup minim yakni 0,88 persen saja. Meskipun begitu, sektor industri merupakan salah satu sektor massal penggerak perekonomian utamanya kerakyatan sehingga dengan pengembangan dan pemberdayaannya akan menghasilkan perekonomian mikro maupun makro yang kuat dan konsisten.

Sebagian besar industri di Kabupaten Manokwari Selatan bergerak di perdagangan umum yang mencapai 352 unit usaha dengan investasi mencapai Rp. 6,10 milyar. Selain itu, unit usaha bangunan juga cukup berkembang meskipun hanya 20 unit usaha namun investasinya mencapai Rp. 1,51 milyar. Peningkatan berbagai bidang di sektor industri akan memberikan berbagai keuntungan dari sisi perekonomian hingga penyerapan tenaga kerja yang berimbang pada penurunan kemiskinan, sehingga pemerintah daerah harus memiliki kebijakan khusus bagaimana menghubungkan sektor ini dengan berbagai sektor unggulan daerah lainnya agar terjadi integrasi dalam pembangunan utamanya bidang ekonomi masyarakat.

**Tabel 2.25**  
**Unit Usaha, Tenaga Kerja, dan Investasi Industri Menurut Jenisnya**  
**Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014**

No	Jenis Industri	Unit Usaha (Unit)	Tenaga Kerja (Org)	Investasi (Rp. 000)
1	Pangan	3	19	1.206.000
2	Sandang dan Kulit	3	5	23.000



No	Jenis Industri	Unit Usaha (Unit)	Tenaga Kerja (Org)	Investasi (Rp. 000)
3	Jasa Pangkas Rambut	2	3	25.000
4	Jasa Rental/Service	4	5	58.800
5	Jasa Penginapan	6	10	590.000
6	Perdagangan Umum	352	448	6.105.910
7	Jasa Bengkel	18	34	389.700
8	Usaha Bahan Bangunan	20	124	1.507.000

Sumber: Kabupaten Manokwari Selatan Dalam Angka, 2015

#### 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

##### a. Pengeluaran per kapita (d disesuaikan)

Pada komponen IPM terkait standar hidup layak (Paritas Daya Beli), metode baru telah menggunakan 96 komoditas dalam penghitungan PPP (dimana sebelumnya hanya 27 komoditas saja). Selain itu, satuan paritas daya beli juga berubah menjadi Rupiah/Kapita/Hari sehingga analisisnya dapat dipertajam. Di Kabupaten Manokwari sendiri, paritas daya beli atau pengeluaran per kapita yang sudah disesuaikan se-Indonesia memiliki besaran Rp. 4.149,- yang mengindikasikan masih lemahnya perekonomian rumah tangga di masyarakat.

##### b. Penataan ruang

Sebagian besar luas wilayah Kabupaten Manokwari Selatan masih berupa hutan rimba dimana pada tahun 2014 mencapai 92,98 persen luas lahan total atau seluas 214.241,34 Ha. Sedangkan pada wilayah pemukiman dan tempat kegiatan masyarakat hanya sebesar 0,20 persen atau seluas 460,08 Ha. Berikut rincian penggunaan lahan di Kabupaten Manokwari Selatan.



**Tabel 2.26**  
**Penggunaan Lahan di Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014**

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Air Empang	0,33	0,00
2	Air Rawa	157,66	0,07
3	Air Tawar Sungai	695,07	0,30
4	Hutan Rimba	214.241,34	92,98
5	Pasir/Bukit Pasir Darat	118,47	0,05
6	Pasir/Bukit Pasir Laut	129,48	0,06
7	Perkebunan/Kebun	1.709,80	0,74
8	Permukiman dan Tempat Kegiatan	460,08	0,20
9	Sawah	565,00	0,25
10	Semak Belukar/Alang-alang	5.230,99	2,27
11	Tanah Kosong/Gundul	5.447,65	2,36
12	Tegalan/Ladang'	1.668,81	0,72
<b>Jumlah</b>		<b>230.424,68</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: Bappeda Kabupaten Manokwari Selatan*

### c. Lingkungan Hidup

Kebijakan, Rencana dan Program Pembangunan di Kabupaten Manokwari Selatan dimaksudkan untuk mendorong percepatan pembangunan sosial, ekonomi, dan infrastruktur sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Manokwari Selatan. Pembangunan Kabupaten Manokwari Selatan menuju kawasan perkotaan dan perdesaan dengan potensi pengembangan berbagai fungsi pemanfaatan lahan seperti kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, pertanian dan perkebunan, industri, kawasan pariwisata akan menimbulkan dampak pada lingkungan, baik lingkungan fisik alami, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Manokwari Selatan telah dilaksanakan dan memuat rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi didalam kebijakan, rencana, program dan/atau kegiatan pembangunan.

Berikut beberapa kesimpulan yang didapat dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis di Kabupaten Manokwari Selatan, yaitu :





1. Isu Strategis di Kab. Manokwari Selatan dari hasil pelingkupan antara lain :

- Ditinjau dari aspek fisiografisnya, perlu dicermati kota Ransiki yang diproyeksikan menjadi ibukota kabupaten Manokwari Selatan, mengingat letaknya berada di daerah aliran sungai Kali Mati dan menjadi daerah limpasan air yang
- Penurunan kualitas lingkungan terutama sumber daya hayati di laut.
- Rawan bencana alam, baik banjir, longsor, gempa bumi dengan potensi tsunami
- Kondisi sarana dan prasarana yang masih minim
- Perubahan fungsi lahan
- Konflik sosial

2. Hasil analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan serta analisis dampak dan resiko lingkungan menunjukkan bahwa :

- Daya dukung sumberdaya air masih belum terlampaui. Namun, untuk mendukung keberlanjutan KRP yang mensejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, harus dibangun sistem penyediaan air bersih yang memadai.
- Daya dukung dan daya tampung Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) yang tersedia saat ini sudah terlampaui karena memang secara kualitas maupun kuantitas masih sangat kurang.
- Konflik sosial berpotensi terjadi apabila KRP di Kabupaten Manokwari Selatan tidak mengakomodasi aspirasi masyarakat yang menginginkan didahulukannya penyerapan tenaga kerja lokal, tidak adanya penggusuran, tidak dilanggarnya adat istiadat setempat, dan tersedianya infrastruktur yang tidak terpelihara dengan baik.
- Diperlukan perencanaan ruang yang komprehensif dalam pembangunan di Kabupaten Manokwari Selatan yang mengakomodasi kawasan-kawasan sesuai dengan potensi pemanfaatan ruangnya serta sehingga tercipta keseimbangan kawasan budidaya dan kawasan lindung yang menjadi penyeimbang daya dukung dan daya tampung lingkungan fisik dan lingkungan buatan.

3. Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan perlu mengedepankan aspek konservasi lingkungan dalam setiap penyusunan Kebijakan Rencana Program (KRP) dan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Manokwari Selatan,



dengan memperhatikan keberadaan Kawasan lindung (Hutan Lindung, Cagar Alam, Sempadan Sungai, Sempadan Pantai, serta pada kawasan yang memiliki topografi terjal/perbukitan dengan kemiringan diatas 40%)

4. Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan perlu mengedepankan aspek mitigasi Kebencanaan dalam setiap penyusunan Kebijakan Rencana Program (KRP) dan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Manokwari Selatan, mengingat wilayah ini sangat rentan akan ancaman Bencana Alam (Sesar Sorong & Sesar Ransiki sebagai ancaman Gempa Bumi, Ancaman Bencana Tsunami, Fisiografis sebagai ancaman Bencana Banjir & Longsor)

5. Menyambung dengan aspek kerentanan bencana alam di Kabupaten Manokwari Selatan, khususnya bencana Banjir dan Tanah Longsor menjadi isu paling utama, mengingat ada beberapa indikasi yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pembangunan di tahun mendatang, yaitu :

- a. Manokwari Selatan, khususnya di Ransiki saat ini menjadi pusat penghasil kayu besi yang memasok kebutuhan pembangunan di wilayah Manokwari dan sekitarnya. Kedepan tentunya kebutuhan akan kayu dalam proses pembangunan akan semakin meningkat seiring dengan pembangunan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Fenomena tersebut tentunya jika tidak diantisipasi sejak dini akan menjadi ancaman bagi kelestarian hutan yang saat ini menjadi kawasan penyangga.
- b. Kondisi fisiografis, khususnya topografi dan kelerengan di Kabupaten Manokwari Selatan yang signifikan akan rentan bencana banjir dan longsor. Mengingat keberadaan pusat-pusat permukiman di masing-masing distrik mayoritas berada di wilayah pesisir berkembang linier dengan garis pantai (Distrik Oransbari, Ransiki, Momi Waren, Tahota) dan Kota Ransiki yang diproyeksikan sebagai ibukota kabupaten berada di daerah limpasan air disekitar Daerah aliran sungai Kali Mati. Kondisi tersebut sangat rentan sekali akan bahaya bencana banjir dan longsor
- c. Menyambung dengan poin B diatas terkait aspek Fisiografis, jika kita lihat spasial wilayah antara Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak memiliki beda elevasi yang cukup tinggi yaitu **0 dpl - ±2.800 dpl di Arfak** dan terdapat **Dua Danau Besar (Danau Anggi dan Anggi Gita)**. Hal ini perlu mendapat **perhatian secara khusus oleh pemerintah Pusat, Provinsi dan kabupaten** terkait



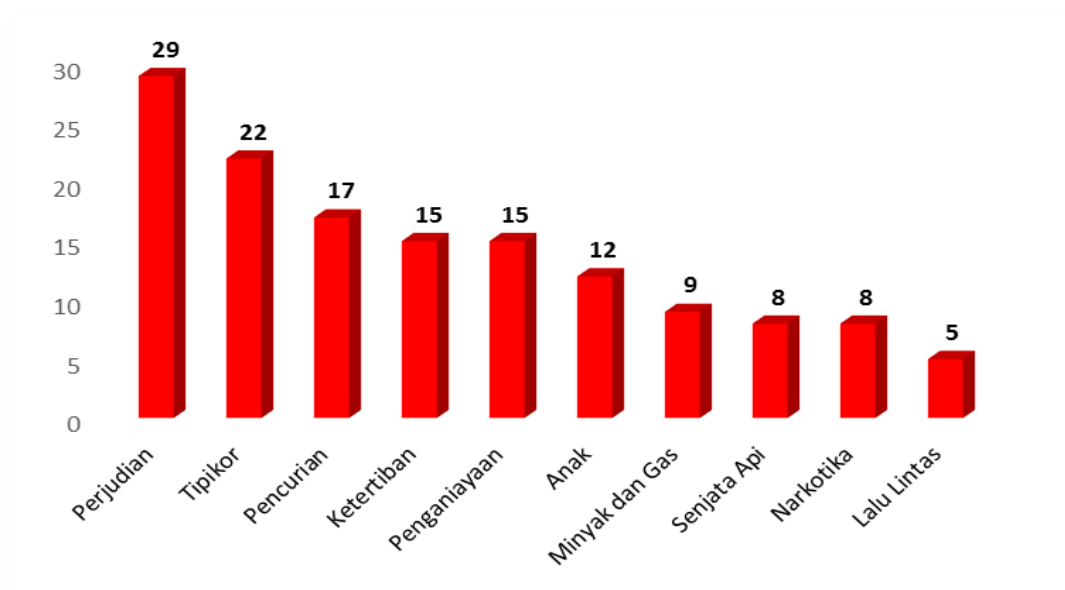
dengan **program pembangunan** yang akan dilaksanakan di dua kabupaten tersebut. Bisa dikatakan **Kabupaten Pegunungan Arfak (Hulu)** menjadi **kawasan penyangga** bagi kabupaten Manokwari Selatan (**Hilir**)

6. Diperlukan perencanaan ruang yang komprehensif dalam pembangunan di Kabupaten Manokwari Selatan yang mengakomodasi kawasan-kawasan sesuai dengan potensi pemanfaatan ruangnya serta sehingga tercipta keseimbangan kawasan budidaya dan kawasan lindung yang menjadi penyeimbang daya dukung dan daya tampung lingkungan fisik dan lingkungan buatan.
7. Konflik sosial berpotensi terjadi apabila KRP di Kabupaten Manokwari Selatan tidak mengakomodasi aspirasi masyarakat yang menginginkan didahulukannya penyerapan tenaga kerja lokal, tidak adanya pengusuran, tidak dilanggarnya adat istiadat setempat, dan tersedianya infrastruktur yang tidak terpelihara dengan baik.

#### d. Angka kriminalitas

Sebagian besar kasus dakwaan pada terdakwa/tertuduh yang mendapatkan keputusan di Kabupaten Manokwari adalah kasus kriminalitas perjudian yang mencapai 29 kasus pada tahun 2014. Selain itu, terdapat juga kasus tindak pidana korupsi yang tercatat sebanyak 22 kasus. Sedangkan dari 10 kasus terbanyak, yang paling sedikit adalah kasus lalu lintas yang hanya sejumlah 5 kasus saja.

**Gambar 2. 14**  
**Terdakwa/Tertuduh yang Terbanyak dalam Tindak Pidana (Mendapat Keputusan)**  
**Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014**



Sumber: Kabupaten Manokwari Selatan Dalam Angka, 2015



#### e. Rasio ketergantungan

Selain dari kualitas pendidikan, produktivitas penduduk juga ditentukan oleh kelompok umur dimana terdapat kelompok usia non produktif (<15 tahun dan >64 tahun) serta usia produktif (15-64 tahun). Asumsi umum yang berlaku adalah penduduk usia non produktif akan menjadi beban tanggungan oleh penduduk usia produktif baik dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kabupaten Manokwari Selatan memiliki angka ketergantungan sebesar 61,20 yang mengindikasikan bahwa diantara 100 penduduk usia produktif menanggung sebanyak 61-62 penduduk.



## BAB III

# ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Identifikasi isu-isu strategis dapat memberikan panduan tentang bagaimana kondisi pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun ke depan dipetakan dengan tepat dan sesuai harapan. Selain itu, dengan melakukan proses identifikasi, otomatis juga akan meningkatkan *akseptabilitas* prioritas pembangunan yang dapat dioperasionalkan dan dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya, perencanaan pembangunan daerah yang tidak memerhatikan isu-isu strategis baik skala internasional, nasional, maupun regional akan kehilangan fokus dan prioritas dalam menentukan arah pembangunan.

Isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional merupakan kesatuan permasalahan dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan rumusan kerangka kebijakan yang tepat sasaran. Segala peluang harus dimanfaatkan secara maksimal, agar penghambat lajunya pembangunan dapat diantisipasi dengan menjadikannya sebagai akselerator capaian pembangunan.

Untuk melengkapi analisis isu-isu strategis daerah, terlebih dahulu dirumuskan permasalahan daerah. Rumusan permasalahan daerah lebih menekankan pada kajian kinerja masa lalu, dimana penajaman permasalahan dapat berasal dari dinamika lingkungan eksternal maupun internal yang dialami selama pelaksanaan periode pembangunan. Setelah mengetahui berbagai permasalahan pembangunan daerah, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis wilayah, dimana analisisnya lebih menitikberatkan pada aspek-aspek pelaksanaan pembangunan ke depannya.

### 3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Setiap daerah memiliki tantangan dan permasalahan yang khas dalam mengembangkan kehidupan masyarakatnya kepada taraf yang lebih baik. Dalam pembangunan Kabupaten Manokwari Selatan, terdapat “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dalam pembangunan jangka panjang dengan kondisi riil saat dokumen perencanaan sedang dirumuskan. Permasalahan pembangunan Kabupaten Manokwari Selatan pada



umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Untuk mengefektifkan sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Manokwari Selatan, serta bagaimana visi dan misi Kabupaten Manokwari Selatan dibuat dengan sebaik-baiknya, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam mengenai kekuatan dan kelemahan terkait peluang dan tantangan yang akan dihadapi hingga tahun 2025.

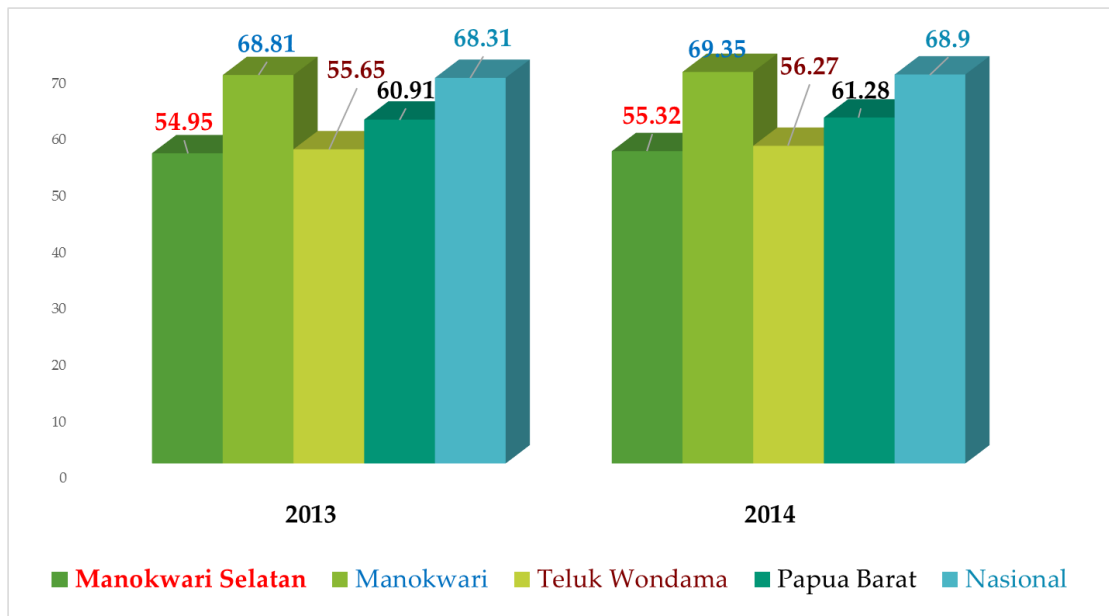
Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan Kabupaten Manokwari Selatan adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan Kabupaten Manokwari Selatan di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya bersama dengan pengembangan seluruh potensi yang dimiliki. Di sini, permasalahan pembangunan daerah adalah rumusan yang memiliki dampak tertinggi bagi masyarakat dan daerah, baik itu berupa hambatan maupun tantangan yang akan diselesaikan dalam jangka panjang dengan tetap memerhatikan sumber daya dan anggaran yang dimiliki oleh Kabupaten Manokwari Selatan. Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis data dan informasi pembangunan untuk masing-masing aspek dan urusan serta kesepakatan dari pemangku kepentingan, maka permasalahan pembangunan jangka panjang Kabupaten Manokwari Selatan dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### **1. Rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia**

Potensi sumber daya manusia merupakan salah satu aset dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Oleh sebab itu, sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya mutlak menjadi modal dasar pelaksanaan pembangunan daerah. Salah satu permasalahan pokok dan mendasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Manokwari Selatan adalah belum memadainya ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing tinggi dan pengamalan kearifan lokal dalam aktifitas keseharian sebagai pelaksana pembangunan yang handal. Hal ini dikarenakan, selain Kabupaten Manokwari Selatan merupakan daerah pemekaran baru dengan keterbatasan aksesibilitas juga dampak dari lambatnya pembangunan pada periode sebelumnya karena berbagai sebab. Kondisi yang demikian dapat dilihat dari indikator di bawah ini.



**Gambar 3.1**  
Perbandingan IPM Kabupaten Manokwari Selatan dan Regional Sekitarnya  
Tahun 2013-2014



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015 (diolah)

Secara umum, IPM Kabupaten Manokwari Selatan memiliki indeks terendah, baik jika dibandingkan dengan wilayah lain terdekat, Provinsi Papua Barat maupun nasional. Hal ini mengindikasikan masih rendahnya kualitas sumber daya manusia baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun perekonomian rumah tangga.

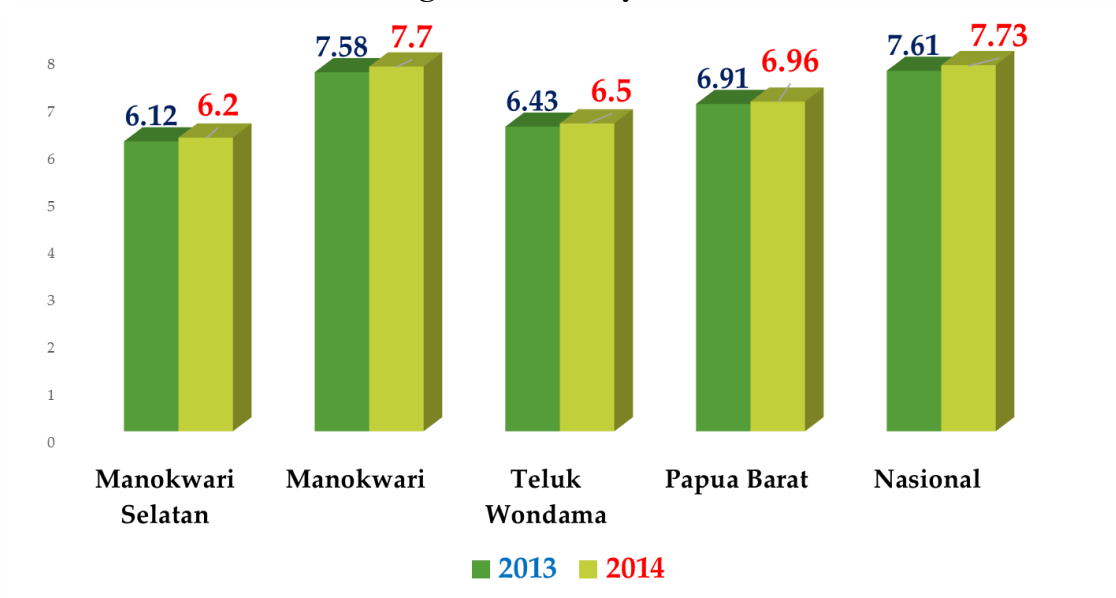
Hasil analisis mengindikasikan bahwa permasalahan **“Rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia”**, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

**a. Rendahnya kualitas pelayanan pendidikan**

Dari metode penghitungan IPM terbaru, kualitas pelayanan pendidikan sekurang-kurangnya dapat diukur dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Rata-rata lama sekolah dapat menggambarkan rata-rata lama sekolah penduduk di suatu wilayah dalam menenyam jenjang pendidikan. Di Kabupaten Manokwari Selatan, rata-rata lama sekolah penduduk mengalami peningkatan hingga mencapai 6,20 tahun dalam menenyam pendidikan. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk Manokwari Selatan rata-rata telah menenyam pendidikan hingga jenjang pendidikan SMP kelas 1 semester 1.



**Gambar 3.2**  
Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Manokwari Selatan dan Regional Sekitarnya, 2013-2014



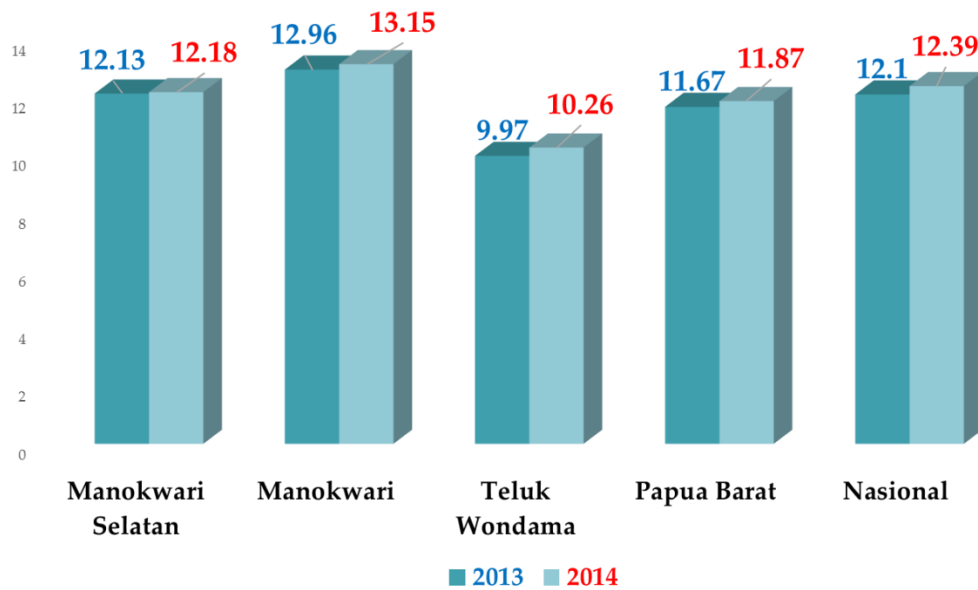
*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015 (diolah)*

Jika dibandingkan dengan daerah lain, capaian rata-rata lama sekolah Kabupaten Manokwari Selatan masih lebih rendah, baik dengan Kabupaten Induk (Manokwari), Teluk Wondama, maupun Provinsi Papua Barat dan nasional.

Adapun, Harapan Lama Sekolah merupakan salah satu indikator baru dalam penghitungan IPM untuk mengukur peningkatan pembangunan di bidang pendidikan. Harapan Lama Sekolah mengindikasikan harapan penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan ke depannya untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh. Pada tahun 2014, angka harapan lama sekolah penduduk Manokwari Selatan mencapai 12,18 tahun dimana angka tersebut mengasumsikan bahwa penduduk yang memasuki usia sekolah pada tahun 2014 memiliki harapan untuk mengenyam jenjang pendidikan hingga mencapai perguruan tinggi semester 1 (12-13 tahun masa sekolah).

**Gambar 3.3**  
Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Manokwari Selatan dan Regional Sekitarnya, 2013-2014





Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015 (diolah)

Di Kabupaten Manokwari Selatan, jumlah sekolah masih minim dimana sekolah dasar hanya berjumlah 41 unit, sekolah menengah pertama 10 unit, sekolah menengah atas 4 unit, dan pendidikan kejuruan 1 unit. Selain minim dari segi kuantitasnya, pemerataan ketersediaan guru, khususnya di daerah terpencil menjadi permasalahan laten. Ketersediaan pemerataan jumlah sekolah juga berdampak pada penduduk usia sekolah yang enggan mengikuti kegiatan belajar mengajar disamping alasan lain seperti kurangnya dukungan orang tua atau belum sadar arti pentingnya pendidikan masa depan. Saat ini, rasio murid terhadap guru mencapai 34-35 murid per satu orang guru yang mana ini merupakan suatu rasio yang belum baik.

#### b. Masih adanya perilaku masyarakat yang menghambat pembangunan

Nilai sosial budaya masyarakat Manokwari Selatan merupakan aset pembangunan. Namun hingga saat ini masih terdapat perilaku atau kebiasaan di masyarakat yang menghambat pembangunan, seperti kebiasaan *suanggi* oleh sebagai masyarakat dalam menjalani realitas hidup. Suanggi merupakan “tinggalan lama” yang kerap masih dipandang menakutkan oleh masyarakat karena ianya dilihat sebagai ilmu (hitam) yang dapat digunakan untuk melukai atau membunuh orang lain; karena berbagai sebab. Dibukanya aksesibilitas sebagian wilayah, di sisi lain, dapat meningkatkan risiko menyebarnya kebiasaan menggunakan suanggi. yang dapat membuat orang tidak berdaya karena adanya kecemburuan dari salah satu komunitas masyarakat akibat keberhasilan komunitas

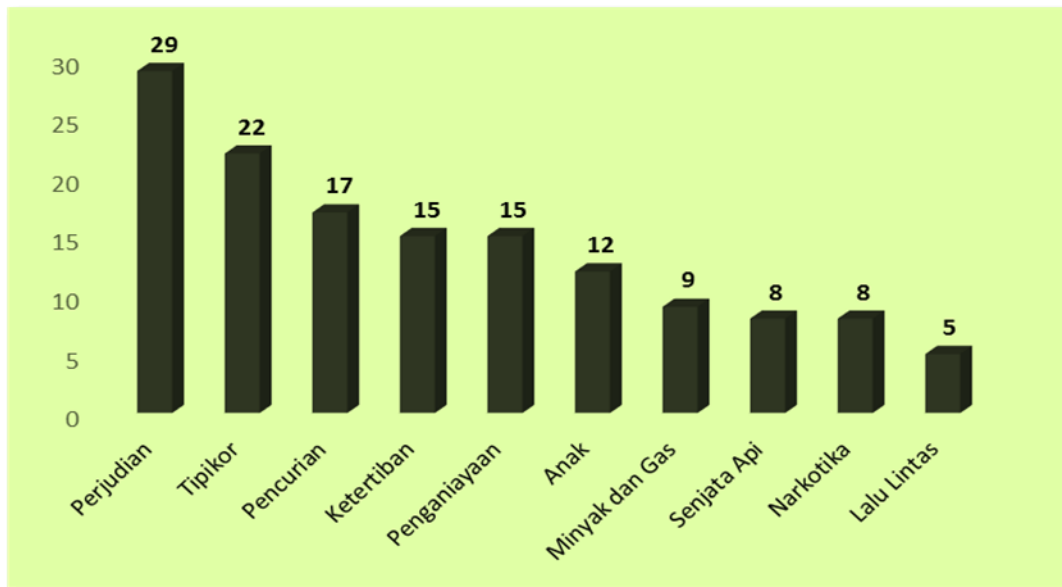


masyarakat yang lain, adanya pengaruh negatif dari adanya keterbukaan aksesibilitas, dan kebiasaan mabuk-mabukan masyarakat.

*Suanggi* masih terus eksis hingga kini karena sistem kekeluargaan bilateral di masyarakat lebih menonjol daripada sistem unilateral. Hal ini dapat menyebabkan perasaan kesukuan yang menghambat aktivitas pembangunan. Hasil pembangunan yang dirasakan oleh suku atau pihak lain akan memancing perasaan iri pada pihak lain yang tidak beruntung. Hal demikian dan kondisi negatif lain tak jarang memicu tindakan kriminal di masyarakat.

Selain itu masih juga terdapat kebiasaan mabok dan berjudi di dalam masyarakat. Sebagian besar kriminalitas di Kabupaten Manokwari adalah kasus perjudian sebanyak 29 kasus pada tahun 2014 dari total angka kriminalitas sebesar 171 kasus.

**Gambar 3.4**  
**Terdakwa/Tertuduh yang Terbanyak dalam Tindak Pidana (Mendapat Keputusan)**  
**Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014**



*Sumber: Kabupaten Manokwari Selatan Dalam Angka, 2015*



### **c. Rendahnya kualitas tenaga kerja**

Daya saing tenaga kerja memiliki keterkaitan yang erat dengan kualitas SDM. Hal ini dikarenakan pemberdayaan masyarakat berbanding positif dengan peningkatan kemampuan tenaga kerja. Rendahnya kualitas tenaga kerja di Kabupaten Manokwari Selatan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Di samping karena derajat kesehatan yang rendah dan pendidikan yang belum menghasilkan keterampilan memadai, hal paling mendasar adalah masih belum disadarinya bahwa lingkungan telah berubah dimana alam tak lagi bisa memenuhi segala kebutuhan masyarakat sebagaimana masa-masa sebelumnya. Penduduk semakin berkembang dan menimbulkan persaingan.

Kesadaran yang rendah tersebut dan akibat factor-faktor lain menyebabkan dorongan untuk meningkatkan kemampuan individu di masyarakat masih rendah. Pada saat bersamaan, pemerintah belum menemukan formula kebijakan yang jitu untuk membekali masyarakat dengan kebutuhan dan pola pikir masyarakat itu sendiri.

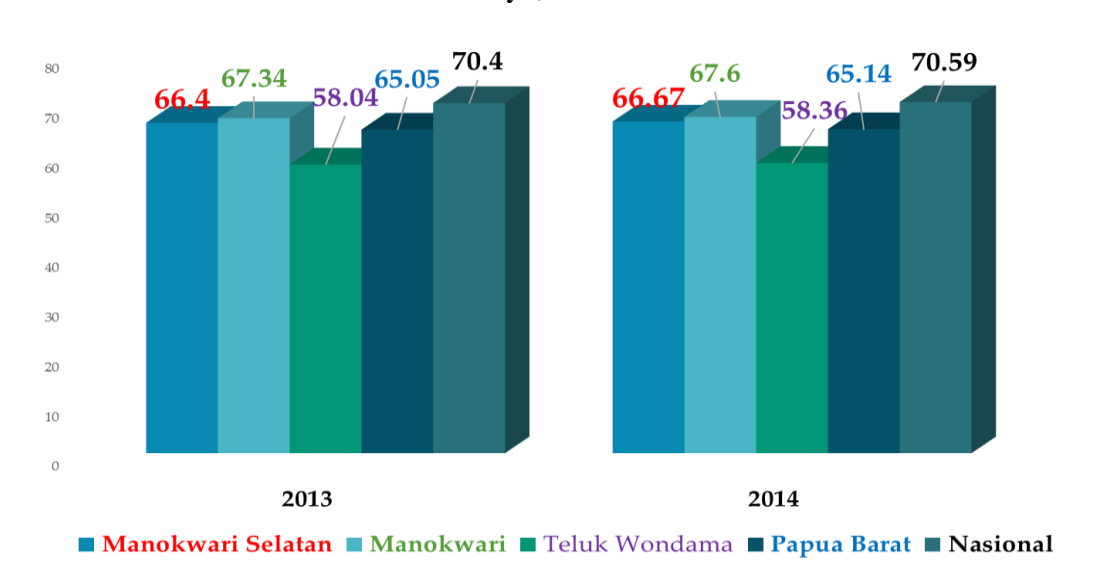
### **d. Belum optimalnya peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan**

Derajat kesehatan masyarakat sangat penting kaitannya dengan terselenggaranya pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan kesehatan merupakan modal dasar bagi manusia untuk melakukan aktivitas kesehariannya. Perbaikan layanan kesehatan akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu indikasi derajat kesehatan masyarakat adalah angka harapan hidup.

Angka Harapan Hidup masyarakat Kabupaten Manokwari Selatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 Angka Harapan Hidup masyarakat yang dilahirkan pada tahun tersebut diindikasikan berada di angka 66-67 tahun. Peningkatan angka harapan hidup ini menggambarkan meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.



**Gambar 3.5**  
Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Manokwari Selatan dan Regional Sekitarnya, 2010-2014



*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015 (diolah)*

Dari segi kesehatan, jika dibandingkan dengan wilayah lain maka Manokwari Selatan termasuk wilayah yang sudah berkembang kualitasnya dibanding daerah lain. Hal ini terlihat pada capaian angka harapan hidup yang melebihi dari angka Provinsi Papua Barat secara umum. Meskipun begitu, berbagai upaya peningkatan kualitas kesehatan harus terus ditingkatkan melalui berbagai antisipasi maupun reduksi setiap permasalahan pembangunan kesehatan yang muncul.

Minimnya fasilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Manokwari Selatan menjadi “kambing hitam” pada tingginya angka kematian penduduk yang terlihat dari piramida penduduk. Jika dilihat dari fasilitas kesehatan, maka belum terdapat rumah sakit pemerintah sebagai rujukan puskesmas sehingga rujukan harus dilakukan ke rumah sakit di luar daerah. Pemerataan fasilitas di setiap distrik beserta tenaga medis yang mengampu juga menjadi masalah pokok pada sebagian besar masyarakat, utamanya bagi masyarakat yang tinggal di kampung-kampung jauh dari pusat keramaian (terpencil/terdalam).

Jika dilihat dari tenaga kesehatan yang melayani masyarakat, maka secara umum masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi kuantitas tenaga kesehatan maupun dari segi kualitasnya. Dokter umum yang berjumlah lima orang belum mencukupi untuk melayani seluruh masyarakat Manokwari Selatan. Pemerintah Kabupaten Manokwari



Selatan perlu mengambil keputusan yang bijak dan cepat dalam mengatasi permasalahan ini agar nantinya derajat kesehatan masyarakat meningkat sebagai upaya perwujudan capaian pembangunan kesehatan daerah.

Permasalahan-permasalahan yang muncul terkait “**Rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia**” telah ditelaah dan dapat disimpulkan terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. **Rendahnya kualitas pelayanan pendidikan**
2. **Rendahnya kualitas tenaga kerja**
3. **Belum optimalnya peningkatan mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan**
4. **Masih adanya perilaku masyarakat yang menghambat pembangunan**

## 2. **Masih rendahnya daya saing ekonomi daerah**

Hasil pembangunan yang adil dan merata harus menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memberikan dampak nyata bagi ekonomi masyarakat. Dampak pembangunan diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun dalam perkembangannya, capaian pembangunan dan hasil-hasilnya belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam kehidupan bermasyarakat kesenjangan memang merupakan suatu kasus yang pasti selalu ada, namun peran pemerintah disini adalah meminimalisasi terjadinya kesenjangan kehidupan sosial ekonomi yang berujung tekanan pada kelompok miskin serta memberikan celah atau peluang bagi berkembangnya masyarakat golongan tidak mampu untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri. Sebagai bagian dari Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari Selatan memiliki permasalahan tersendiri dalam menghadapi permasalahan kesenjangan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan karakteristik geografis dan sosial budaya yang menjadikan kendala bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat utamanya di wilayah-wilayah yang cukup jauh dari pusat pemerintahan maupun pusat perekonomian.

Dari permasalahan “**Masih rendahnya daya saing ekonomi daerah**”, terdapat beberapa permasalahan dan fenomena yang memicu permasalahan tersebut, antara lain:

### a. **Masih tingginya penduduk miskin yang menyebar di seluruh wilayah**

Berdasarkan data Simpadu PNPM Mandiri pada tahun 2012, angka kemiskinan di Kabupaten Manokwari Selatan sangat tinggi hingga mencapai 67,33 persen jauh di atas



kemiskinan Kabupaten Manokwari sebagai kabupaten induknya yang memiliki angka kemiskinan sebesar 37,27 persen. Dominasi kemiskinan berada pada Distrik Dataran Isim dan Distrik Nenei yang mencapai 75 persen dan terendah pada Distrik Momi Waren dan Tahota yang berada pada kisaran 25-50 persen. Namun jika dilihat dari jumlah absolutnya, maka jumlah penduduk miskin paling banyak mendiami wilayah Distrik Ransiki dan Distrik Oransbari.

Dari 6 Distrik yang ada, kesenjangan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Manokwari Selatan cukup terasa tinggi. Geliat kesejahteraan masyarakat cukup tampak terkonsentrasi di Distrik Ransiki, dimana Distrik Ransiki mendominasi tingkat capaian pembangunan daerah dibandingkan beberapa Distrik yang lain. Hal ini dikarenakan Distrik Ransiki merupakan pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian. Meskipun begitu, seharusnya capaian pembangunan dapat didistribusikan secara proporsional sehingga tidak ada ketimpangan yang nyata terjadi antar wilayah di Kabupaten Manokwari Selatan.

#### **b. Ekonomi kerakyatan belum optimal dikembangkan oleh pemerintah**

Ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Di Kabupaten Manokwari Selatan, dominasi sektor pertanian cukup tinggi dalam terhadap ekonomi daerah. Dari sisi perekonomian kerakyatan, fenomena tersebut mengindikasikan masih banyak komoditi yang bisa dikembangkan baik dari sektor pertanian, perikanan, maupun peternakan melalui berbagai pengolahan agar dapat menjadi produk unggulan daerah.

Selain itu, masih minimnya industri kecil dan menengah menjadi kendala tersendiri bagi pemerintah dalam meningkatkan perekonomian kerakyatan. Namun kendala utama dalam meningkatkan potensi perekonomian masyarakat adalah kualitas sumber daya manusia sebagai subyek pelaksanaan perekonomian yang kurang mendukung dalam pengembangan ekonomi kerakyatan.

Di tengah-tengah kondisi yang terjadi tersebut, ternyata juga, terjadi pula ledakan urbanisasi, kekumuhan dan ekspansi sektor informal yang muncul sebagai bagian kompleksitas problema kehidupan masyarakat. Di saat yang sama, seringkali kebijakan yang dilakukan pemerintah difokuskan justeru pada pembangunan sektor formal semata. Pada kenyataannya, fenomena sektor informal haruslah kita lihat sebagai bagian dari ekspansi ekonomi yang lebih banyak memberi harapan daripada permasalahan. Pemerintah harus



memberikan wadah formal yang sesuai untuk masyarakat yang bergerak di sektor informal tersebut agar perekonomian dapat dilaksanakan dengan cepat dan merta.

### c. Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur dasar

Perencanaan pembangunan yang efektif adalah perencanaan yang menyinergikan antara peningkatan perekonomian, pemerataan kesejahteraan masyarakat, serta mempertahankan kualitas lingkungan hidup untuk generasi mendatang. Perencanaan tersebut berhasil jika terdapat harmonisasi antara perencanaan pembangunan dengan perencanaan tata ruang wilayah yang berjalan seimbang serta memiliki kesesuaian tujuan yakni pencapaian hasil pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam pengembangan berbagai infrastruktur penunjang kehidupan masyarakat perlu adanya perencanaan yang matang dan terkoordinir.

Rumah atau tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia selain sandang dan pangan dimana kondisi rumah tinggal secara kasat mata memperlihatkan tingkat kesejahteraan penduduk. Pemukiman yang sehat dan layak huni dapat memberikan pencegahan terhadap segala macam bakteri dan virus yang menyebabkan penyakit sehingga tingkat kesakitan akan menurun. Salah satu pra syarat kondisi perumahan yang baik adalah apabila sanitasinya baik dan terstruktur sesuai dengan standar kesehatan.

Di Kabupaten Manokwari Selatan, masih banyak masyarakat yang belum memiliki perumahan layak huni sehingga menjadi permasalahan tersendiri bagi pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan cukup sulitnya wilayah geografis daerah tersebut untuk dijangkau yang menyebabkan keterbatasan masyarakat untuk memenuhi hajat hidupnya agar terlaksana secara optimal. Selain itu, kebudayaan daerah juga berpengaruh dalam pola kehidupan sehari-hari dimana dalam hal ini perumahannya menjadi sebuah karakter dalam kehidupan masyarakat. Sulitnya masyarakat menerima dampak positif hasil pembangunan pada aspek perumahan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menyosialisasikan pentingnya perumahan layak huni bagi kesehatan dan masa depan.

Persebaran wilayah-wilayah pemukiman penduduk di Kabupaten Manokwari Selatan serta keadaan geografisnya menyebabkan setiap hasil pembangunan sulit dirasakan secara merata. Termasuk juga fasilitas listrik maupun air bersih. Listrik dan air bersih sangat penting untuk menunjang produksi ekonomi masyarakat dan pencapaian taraf kesehatan yang layak. Untuk itu pemerintah harus terus meningkatkan pembangunan infrastruktur pelayanan bagi semua lapisan masyarakat di Manokwari Selatan.



#### d. Rendahnya kualitas perekonomian wilayah

Upaya pemberdayaan potensi ekonomi masyarakat bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Peningkatan kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, dan kualitas perekonomian masyarakat merupakan satu-satunya cara dalam mencapai pembangunan masyarakat yang adil dan merata. Proses pembangunan dinyatakan berhasil apabila kesejahteraan masyarakat meningkat yang ditandai dengan adanya peningkatan pendapatan perkapita, penurunan jumlah angka kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran tentu saja dengan kualitas pekerjaan yang lebih baik hingga tingkat kesehatan yang baik pula.

Angka PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Manokwari Selatan mengalami peningkatan di setiap tahunnya dimana pada tahun 2012 mencapai Rp. 446,91 milyar hingga pada tahun 2014 mencapai Rp. 554,08 milyar. Hal ini mengindikasikan pergerakan ekonomi secara agregat di setiap sektor lapangan usaha mengalami kenaikan secara akumulatif.

Jika dilihat pada setiap sektor lapangan usaha, maka terlihat bahwa pada setiap kategori mengalami peningkatan nilai PDRB utamanya pada sektor-sektor lapangan usaha dominan seperti sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang mencapai Rp. 365,62 milyar maupun Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang mencapai Rp. 102,70 milyar pada tahun 2014.

Perekonomian Kabupaten Manokwari Selatan masih dicirikan didominasi kegiatan penduduk dalam bertani dengan sistem tradisional. Namun sektor pertanian Kabupaten Manokwari Selatan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti halnya perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah. Meskipun begitu, sektor pertanian merupakan salah satu sektor andalan bagi struktur perekonomian Kabupaten Manokwari Selatan dimana andil dalam pembentukan perekonomian mencapai 65,99 persen dengan pertumbuhan sektoral sebesar 3,78 persen. Mengingat tingginya potensi pengembangan sektor pertanian, maka pengelolaan sektor pertanian yang lebih modern dan profesional diperlukan untuk meningkatkan nilai tambah produk sektoral.

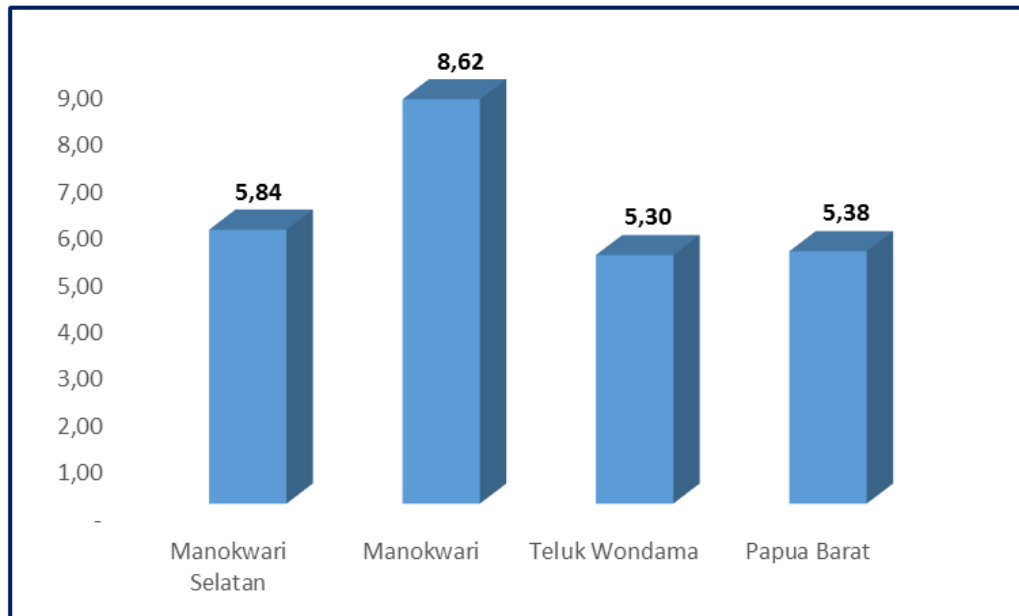
Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Manokwari Selatan cukup stabil pada angka 5,84 persen. Namun meskipun angka pertumbuhan ekonomi ini tergolong stabil, Kabupaten Manokwari Selatan yang merupakan daerah baru sangat memerlukan performa perekonomian yang lebih baik untuk “menggenjot” berbagai lini sektor lapangan usaha agar





memiliki daya saing yang lebih. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi para pengambil kebijakan utamanya dalam bidang perekonomian wilayah untuk meningkatkan nilai tambah produk baik unggulan daerah maupun sektor lapangan usaha yang memiliki potensi untuk dikembangkan pada masa depan dengan tetap berpegang pada pembangunan berkelanjutan.

**Gambar 3.6**  
**Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manokwari Selatan dan Regional Sekitarnya, 2014**



*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015*

Jika dibandingkan dengan wilayah lain, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manokwari masih cukup stabil dan terbilang lebih tinggi. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah nilai Produk Domestik Regional Bruto yang harus ditingkatkan sebagai modal dasar pembangunan perekonomian daerah.

Permasalahan-permasalahan yang muncul terkait “**Masih rendahnya daya saing ekonomi daerah**” telah ditelaah dan disimpulkan terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Masih tingginya penduduk miskin yang menyebar di seluruh wilayah
2. Ekonomi kerakyatan belum optimal dikembangkan oleh pemerintah
3. Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur dasar
4. Rendahnya kualitas perekonomian wilayah



### 3. **Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**

Tata kelola pemerintah yang baik merupakan *core business* dalam mengimplementasikan pembangunan daerah mengingat aparatur pemerintah adalah subyek pembangunan utama. Sekurang-kurangnya terdapat empat elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang harus diperhatikan untuk mencapai *good governance* yakni *accountability*, *transparency*, *predictability*, dan *participation*. Empat hal tersebut akan menjadikan pelaksanaan pemerintahan menjadi efektif dan efisien melalui optimalisasi pemberdayaan aparatur pemerintahan daerah. Dengan tata kelola pemerintahan yang baik, diharapkan akan menjadi dasar dalam pencapaian reformasi birokrasi dengan fokus pemberian pelayanan prima kepada masyarakat.

Pelayanan terhadap masyarakat merupakan tugas pokok aparatur pemerintah daerah terutama pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan administrasi kependudukan. Untuk mewujudkan pelayanan yang prima, pemerintah daerah harus memberikan merumuskan program-program kegiatan penunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia yang selama ini masih belum maksimal direalisasikan.

Keterkaitan seluruh permasalahan pembangunan dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Selatan terletak pada **“Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik”**. Dalam mengkaji permasalahan tersebut, berikut pemicu munculnya fenomena kinerja aparatur pemerintahan:

#### a. **Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas**

Optimalisasi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkualitas terletak pada tatanan aparatur daerah yang menjadi subyek pemerintahan dalam pembangunan. Kualitas sumber daya aparatur pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan menjadi suatu permasalahan dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Minimnya aparatur daerah yang profesional, berkualitas, dan amanah menjadi “pekerjaan rumah” bagi pemerintah daerah sebagai bagian dari pencapaian *Good Government* melalui Reformasi Birokrasi (RB). Untuk mengefektifkan kinerja pemerintah daerah, pemerintah belum perlu menambah jumlah PNS atau tidak menambah jumlah PNS, namun meningkatkan kualifikasi PNS dengan memberikan pelatihan dalam hal pelayanan dan kinerja. Aparatur sipil negara yang harus ditingkatkan kualitasnya cukup yang terkait dengan



pelayanan dasar kehidupan masyarakat, sedangkan yang terkait administrasi teknis perlu diberdayakan lebih lanjut sebagai bagian dari pembinaan kepegawaian.

Transparansi perlu dilakukan oleh pemerintah di berbagai tingkatan. Ini diperlukan bagi tumbuhnya iklim saling menghargai dan menghormati serta saling membantu antara masyarakat dengan pemerintah. Di samping itu, kalau hal ini mampu dilakukan maka akuntabilitas pemerintah akan terwujud dengan baik.

#### b. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah

Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah ditunjukkan dengan adanya akuntabilitas pelaporan keuangan yang memadai, meliputi kewajiban penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LK K/L). Sebagai wilayah otonomi baru, pengelolaan keuangan Manokwari Selatan masih rendah, dan hal itu diindikasikan dengan opini BPK selama 2 (dua) tahun (2014 dan 2015) pada Kabupaten Manokwari Selatan yang mempunyai predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Diharapkan pembangunan lima tahun pengelolaan keuangan daerah Manokwari Selatan dapat lebih baik.

#### Opini BPK Atas Laporan Keuangan

##### Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan, Tahun 2014-2015

No	Tahun	Opini
1	2014	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2	2015	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

*Sumber: Bagian Keuangan Setda, 2016*

#### c. Rendahnya kualitas pelayanan publik

Kualitas pelayanan publik yang kurang optimal selalu menjadi sorotan oleh masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Hal ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran aparatur daerah dalam melayani masyarakat termasuk ~~dalam~~ minimnya fasilitas sarana dan prasarana pelayanan publik, terutama dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Permasalahan-permasalahan yang muncul terkait “**Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik**” telah ditelaah dan disimpulkan terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut.

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas



2. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah
3. Rendahnya kualitas pelayanan public

#### 4. Pemanfaatan sumber daya alam belum optimal dan bijaksana

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, sumber daya alam merupakan salah satu modal utama dalam mewujudkan berbagai capaian pembangunan daerah melalui eksploitasi yang baik dan berkelanjutan. Eksploitasi tersebut memberikan masukan terhadap keuangan daerah sebagai bagian dari pendapatan daerah untuk selanjutnya digunakan sebaik-baiknya demi kemakmuran masyarakat seperti yang tercantum dalam UUD 1945.

Manokwari Selatan sebagai salah satu wilayah di Papua Barat memiliki berbagai potensi sumber daya alam untuk dikelola demi kepentingan masyarakat. Masih minimnya eksploitasi sumber daya alam ini belum menimbulkan banyak masalah. Dikarenakan saat ini eksploitasi sumber daya alam masih belum sesuai dengan asas berkelanjutan, maka permasalahan tersebut jika tidak diantisipasi akan memberikan dampak negatif bagi kelestarian lingkungan hidup, merugikan masyarakat dan menimbulkan kesenjangan sosial-ekonomi. Oleh karena itu, sebagai bagian dari pijakan perumusan berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah maka diangkat permasalahan pembangunan **“Masih rendahnya kepedulian terhadap pembangunan ramah lingkungan”**.

### 3.2. Isu Strategis

Analisis yang mendalam pada isu-isu strategis akan menghasilkan kajian permasalahan mendasar pada pembangunan daerah suatu wilayah. Berbagai isu yang akan terjadi pada masa mendatang selama periode perencanaan pembangunan, akan menjadi target utama pencapaian pemerintah dalam menyejahterakan masyarakatnya. Pada perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, isu-isu strategis pada periode 20 (dua puluh) tahun dapat berubah seiring perkembangan jaman. Namun, perubahan itu diharapkan terjadi karena terselesaikannya permasalahan pembangunan daerah pada periode tertentu dan perkembangan permasalahan global yang memberi dampak positif bagi pembangunan ke depannya.

Antisipasi terhadap isu-isu strategis yang menjadi permasalahan pembangunan akan menyebabkan percepatan pembangunan daerah. Namun sebaliknya, jika antisipasi tersebut gagal atau bahkan tidak ada antisipasi terhadap isu strategis, maka kemungkinan kegagalan pembangunan daerah akan terjadi.



Isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dan diperkirakan dapat memengaruhi agenda pembangunan dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan. Pertimbangan perumusan isu-isu strategis Kabupaten Manokwari Selatan terdiri dari isu internasional, isu nasional, dan isu regional yang dijabarkan sebagai berikut.

#### **a. Isu Internasional**

Isu strategis internasional merupakan suatu kondisi yang dialami secara global oleh seluruh negara di dunia dimana isu tersebut merupakan prioritas utama setiap negara dalam penyusunan rumusan kebijakan di negaranya masing-masing. Isu strategis internasional sebagian besar mengusung perihal degradasi kualitas lingkungan hidup hingga ancaman menipisnya sumber daya tak terbarukan yang merupakan bahan bakar untuk energi.

Isu strategis di tingkat internasional yang relevan bagi perencanaan pembangunan masa mendatang khususnya bagi Kabupaten Manokwari Selatan antara lain: pencapaian tujuan pembangunan milenium (*Millenium Development Goals/MDGs*) yang telah direvisi menjadi *Sustainable Development Goals (SDG's)*, krisis ekonomi global yang masih mengancam perekonomian, antisipasi perubahan iklim global (*global warning/climate change*), serta kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin pesat.

##### **➤ *Sustainable Development Goals (SDG's)***

Indonesia menjadi salah satu negara yang menandatangani sebuah isu strategis internasional yakni *Millenium Development Goals (MDGs)*. Komitmen bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan MDGs mencerminkan upaya untuk menyejahterakan rakyat sekaligus menyumbangkan dukungan terhadap kesejahteraan masyarakat internasional. *Millenium Development Goals (MDGs)* memiliki konsep jelas dan indikator pencapaian terukur dalam komitmen memerangi kemiskinan, kelaparan, penyakit, buta huruf, degradasi kualitas lingkungan hidup dan diskriminasi terhadap perempuan. Target pencapaian MDGs tersebut diharapkan tercapai pada tahun 2015 sebagai bagian dari kesepakatan bersama menuju pembangunan global.

Tahun 2015 telah dilewati dan tentu saja evaluasi berbagai capaian MDGs sudah mencapai puncaknya. Capaian bangsa Indonesia pada target MDGs cukup beragam dimana terdapat 13 indikator sudah memenuhi target yang diharapkan sebelum tahun 2015 berakhir, sedangkan 36 indikator diperkirakan akan tercapai pada tahun 2015. Selain itu,



terdapat 14 indikator MDGs yang masih memerlukan kerja keras dan kerja cerdas untuk mencapai target sesuai kesepakatan internasional.

Program MDGs yang berakhir pada tahun 2015 ini, diteruskan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang disahkan di Sidang Umum PBB akhir September di New York, USA. SDGs tidak terpisah dari MDGs dan merupakan penyempurnaan dari MDGs. Bentuk penyempurnaan dilakukan melalui sejumlah pendekatan yang dipandang perlu dengan tetap melibatkan peran aktif warga dunia bagi terciptanya kepentingan global yang lebih luas. Tahun 2016 merupakan tahun pertama implementasi agenda pembangunan dunia Post-2015 (SDG's).

Sidang Umum PBB pada 4 Desember 2014 telah menyetujui platform agenda pembangunan dunia Post-2015 berdasar pada hasil *Open Working Group (OWG) on Sustainable Development Goals* yang akan menjadi target dan tujuan pembangunan dunia sampai 2030. Rumusan SDG terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dimana pencapaian lebih terukur untuk menciptakan masyarakat dunia 2030 jauh lebih baik dari saat ini. Ke-17 tujuan SDGs tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menghapus segala bentuk kemiskinan dimana pun berada;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan *gender* dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan dari air dan sanitasi untuk semua;
7. Memastikan seluruh penduduk mendapat akses untuk energi yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan;
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua secara berkelanjutan;
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif berkelanjutan, dan inovasi asuh;



10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara-negara;
11. Membuat pemukiman kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Pelestarian dan pemanfaatan samudera, laut dan sumber daya kelautan berkelanjutan dalam rangka pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan mempromosikan pemanfaatan ekosistem darat, lestari mengelola hutan, memerangi penggurunan, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; serta
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Target pembangunan universal yang tertuang dalam SDG's membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat dunia, termasuk dari pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat. Di setiap negara, tidak hanya negara miskin dan berkembang tetapi juga negara maju, rumusan SDG's merupakan sumber penting untuk menyelaraskan strategi dan kebijakan demi membuat kehidupan di muka bumi menjadi lebih baik. Di Indonesia khususnya Kabupaten Manokwari Selatan, rumusan SDG's dan target pencapaian dapat menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah sehingga akan memiliki satu tujuan yang sama dalam mencapai kesejahteraan masyarakat global.

#### ➤ **Ancaman krisis ekonomi global**

Krisis ekonomi global adalah suatu masa menurunnya perekonomian dunia yang nantinya akan berdampak pada perekonomian beberapa Negara termasuk Indonesia. Hal ini menjadi ancaman yang cukup krusial bagi Negara Indonesia karena Indonesia merupakan negara berkembang yang sangat tergantung pada fluktuasi perekonomian global. Dalam pertemuan para pemimpin 20 negara di Los Cabos, Meksiko, memaparkan bahwa sejak 2008, negara-negara industri Barat dihempaskan oleh krisis ekonomi. Dalam menghadapi resesi global, sepertinya program penanggulangan krisis ekonomi tidak banyak



memberikan harapan. Negara Amerika Serikat sebagai Negara Adidaya belum sepenuhnya dapat keluar dari krisis ekonomi, termasuk negara-negara zona euro.

Ancaman ini bermula dari tingginya tumpukan hutang baik oleh rakyat maupun negaranya sehingga berimbas pada krisis ekonomi. Begitu juga Indonesia yang memiliki cukup banyak hutang, dikhawatirkan akan terjadi krisis yang sebentar lagi menghempaskan perekonomian Negara Indonesia. Dalam indikator Indeks Negara Gagal (*Failed States Index*) 2012, di Washington DC, Amerika Serikat, Negara Indonesia terancam menjadi negara gagal dengan menempatkan Indonesia di urutan ke 63 dari 178 negara dengan posisi kategori negara bahaya (*in danger*). Semakin tinggi peringkat sebuah negara, menandakan semakin buruk kondisi sebuah negara, dan semakin mendekati kategori Negara Gagal (*Failed States*).

➤ **Antisipasi perubahan iklim global (*global warming/climate change*)**

Perkembangan lingkungan pada era globalisasi pembangunan sekarang ini menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan kelestarian hidup yang buruk dengan akibat ancaman *global warming*. *Global warming* merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, hingga banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama dalam adanya bencana alam.

Perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi *global warming*. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

➤ **Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin pesat**

Pada era globalisasi sekarang ini ilmu pengetahuan dan komunikasi semakin mudah terjangkau oleh lapisan masyarakat yang mengindikasikan perkembangan IPTEK dan telekomunikasi mengalami perkembangan yang positif. Kemajuan IPTEK dan komunikasi bertujuan untuk mempermudah kehidupan seseorang dalam berbagai hal. Dengan perkembangan yang positif ini, dunia industri teknologi dan komunikasi semakin menunjukkan agregat yang signifikan.





Dengan adanya kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi ini, Negara Indonesia diharapkan mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada sehingga diharapkan Indonesia mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang lebih unggul. Ke depannya nanti, diharapkan Indonesia tidak hanya sebagai pemakai (*user*) tetapi mampu menjadi pembuat (*produsen*) sehingga memiliki persaingan yang cukup sehat dalam pengembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Jika hal tersebut terealisasi, maka Indonesia akan mampu menjadi Negara yang tidak hanya mengandalkan teknologi dari luar negeri, namun mampu mengeksport segala bentuk teknologi informasi, dan komunikasi sesuai dengan spesifikasi yang mampu berdaya saing internasional.

### **b. Isu atau Kebijakan Nasional**

Selain memerhatikan isu skala internasional, hal-hal lain yang menjadi pertimbangan perumusan isu-isu strategis adalah isu/kebijakan nasional. Isu-isu strategis nasional merupakan isu-isu yang memiliki potensi untuk menghambat pembangunan nasional sehingga perlu adanya antisipasi khusus dalam menghadapinya. Masih adanya isu-isu strategis nasional yang belum terselesaikan menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah untuk berusaha lebih keras dalam menyelesaikannya. Namun, yang menjadi persoalan adalah ketika isu strategis nasional belum terselesaikan dan muncul isu strategis baru yang tentu saja perlu adanya *treatment* khusus dalam mengantisipasinya. Isu strategis nasional antara lain: Rencana Pemerintah Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025), arahan RTRW Nasional untuk pengembangan wilayah Papua, dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan mempertimbangkan dinamika saat ini melalui RPJMN 2015-2019.

#### ➤ **Rencana Jangka Panjang Nasional 2005-2025**

*Review* terhadap rencana pemerintah jangka panjang nasional (RPJPN) bertujuan untuk menjaga koridor penyalarsan arah dan sasaran pembangunan Kabupaten Manokwari Selatan dengan rencana pemerintah nasional pada setiap tahapan pembangunan lima tahunan. Evaluasi dan monitoring harus tetap dilaksanakan demi menjaga stabilitas perencanaan daerah dan nasional agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan program kegiatan. Adapun tahapan dan skala prioritas pada RPJPN 2005-2025 ditampilkan pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.8**  
**Tahapan dan Skala Prioritas**  
**Rencana Pemerintah Jangka Panjang Nasional 2005-2025**



<p><b>RPJM I</b> (2005-2009)</p>	<p><b>Menata kembali &amp; membangun Indonesia di segala bidang</b> a. Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik</p>
<p><b>RPJM II</b> (2010-2014)</p>	<p><b>Memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang</b> b. Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing daerah</p>
<p><b>RPJM III</b> (2015-2019)</p>	<p><b>Menetapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang</b> c. Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK</p>
<p><b>RPJM IV</b> (2020-2024)</p>	<p><b>Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur</b> d. Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif</p>

Sumber: RPJPN 2005-2025

#### ➤ Arahan RTRW Nasional untuk Pengembangan Wilayah Papua

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dirumuskan untuk memberikan arah bagi setiap penyusunan kebijakan utamanya dalam menetapkan program prioritas yang berbasis kewilayahan. Sesuai arahan dalam RTRW Nasional, pengembangan wilayah Papua diarahkan untuk:

- a. Mendukung peningkatan serta memperkuat persatuan, kesatuan dan keutuhan kehidupan bangsa dan pertahanan negara;
- b. Menempatkan hak ulayat dalam penataan ruang sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan nilai-nilai sosial budaya setempat;
- c. Memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara produktif dan efisien agar terhindar dari pemborosan dan penurunan daya dukung lingkungan sehingga dapat memberi manfaat sebesar-besarnya berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian dan berkelanjutan;
- d. Mempertahankan kawasan lindung sekurang-kurangnya 50 persen dari luas wilayah



- pulau papua;
- e. Memacu pertumbuhan ekonomi wilayah pulau papua melalui pengembangan sektor-sektor unggulan yang berbasis sumber daya setempat dan meningkatkan keterkaitan antar pusat-pusat pertumbuhan;
  - f. Menampung kegiatan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan sekaligus memenuhi fungsi sebagai pusat pelayanan usaha melalui pengembangan kawasan dan pusat pertumbuhan;
  - g. Meningkatkan keterkaitan yang saling menguntungkan antara kawasan andalan dan tertinggal dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi daerah di sekitar kawasan andalan;
  - h. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas, serta memperluas jangkauan pelayanan prasarana dasar, khususnya transportasi laut yang didukung oleh transportasi antarmoda secara terpadu dan optimal dengan mengikutsertakan dunia usaha; serta
  - i. Meningkatkan pengembangan wilayah pedalaman dan perbatasan yang tertinggal dan terisolasi dengan menyasikan laju pertumbuhan antar wilayah.

Sedangkan pusat-pusat pengembangan di Pulau Papua yang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) diarahkan untuk:

- a. Mendorong pengembangan Kota Sorong dan Jayapura sebagai pusat pelayanan primer yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan; dan
- b. Mendorong pengembangan Kota Manokwari dan Timika sebagai pusat pelayanan sekunder yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

#### ➤ **Rencana Jangka Menengah Nasional 2015-2019**

Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpilih pada periode ini, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJP Nasional tahun 2005-2025, maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJM Nasional tahun 2015-2019 sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN  
BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**



**Gotong royong** merupakan intisari dari ideologi Pancasila. Tanggung jawab untuk membangun bangsa harus dilakukan dengan cara musyawarah dalam memutuskan dan gotong royong dalam kerja. Kekuatan rakyat adalah Gotong Royong, dimana rakyat selalu bahu-membahu dan bekerjasama menyelesaikan berbagai hambatan dan tantangannya ke depan.

**Berdaulat** adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi diri bangsanya. Oleh karena itu, pembangunan, sebagai usaha untuk mewujudkan kedaulatan sebagai negara merdeka, merupakan upaya membangun kemandirian. Namun, kemandirian yang dimaksudkan bukanlah kemandirian dalam ketersisolasian, tetapi didasarkan pada kesadaran akan adanya kondisi saling ketergantungan dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam suatu negara maupun antar-bangsa.

**Kemandirian** suatu bangsa tercermin, antara lain, pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemampuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri; dan kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok, yang disertai dengan keunggulan dalam inovasi, kreativita, integritas, dan etos kerja sumber daya manusia.

**Kepribadian dan kebudayaan** harus tercermin dalam setiap aspek kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Kemandirian dan kemajuan suatu bangsa tidak boleh hanya diukur dari perkembangan ekonomi semata. Kemandirian dan kemajuan juga tercermin dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial.

Upaya untuk mewujudkan **Visi Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong** itu ditempuh melalui **MISI** sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritime, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat masju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan Negara hukum.



3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritime.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritime yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut **NAWA CITA**, yaitu:

1. Kami akan menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.
2. Kami akan membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan.
4. Kami akan menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakkan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Kami akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Kami akan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Kami akan mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sector strategis ekonomi domestic.
8. Kami akan melakukan karakter bangsa.
9. Kami akan memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Selain Visi, misi dan sembilan agenda prioritas (**NAWACITA**) penyusunan RPJPD Kabupaten Manokwari Selatan juga mempedomani Rancangan akhir RPJMN 2015-2019 buku III wilayah Papua Barat. Pembangunan wilayah Papua Barat seperti dalam buku III Rancangan akhir RPJMN adalah sebagai berikut:

1. Percepatan pengembangan industri berbasis komoditas lokal yang bernilai tambah di sektor/subsektor pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan;



2. Percepatan pengembangan ekonomi kemaritiman melalui pengembangan industri perikanan dan pariwisata bahari;
3. Percepatan pengembangan pariwisata budaya dan alam melalui pengembangan potensi sosial budaya dan keanekaragaman hayati;
4. Percepatan pengembangan hilirisasi industri pertambangan, minyak, gas bumi dan tembaga;
5. Peningkatan kawasan konservasi dan daya dukung lingkungan untuk pembangunan rendah karbon; serta
6. Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan masyarakat;
7. Pengembangan kawasan ekonomi inklusif dan berkelanjutan berbasis wilayah kampung masyarakat adat, melalui percepatan peningkatan kualitas sumberdaya manusia Papua Barat yang mandiri, produktif dan berkepribadian.

#### c. Isu atau Kebijakan Regional

##### ➤ Telaah RPJPD Provinsi Papua Barat

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat, dijabarkan beberapa prioritas pembangunan daerah sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan kabupaten/kota. Berikut arah kebijakan pembangunan jangka panjang Provinsi Papua Barat.

**Tabel 3.9**  
**Arah Kebijakan RPJP Provinsi Papua Barat**

<b>RPJM Tahap I (2006-2011)</b>	<b>Provinsi Papua Barat yang Mandiri</b> Mewujudkan ketahanan pangan, pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana wilayah, serta pembenahan tata kelola pemerintahan.
<b>RPJM Tahap II (2012-2016)</b>	<b>Provinsi Papua Barat yang Mandiri bersamaan dengan perwujudan Provinsi Papua Barat yang Berdaya Saing</b> Melanjutkan capaian pokok-pokok kemandirian pada lima tahun pertama, yang berarti upaya-upaya mewujudkan ketahanan pangan, pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana wilayah, serta pembenahan tata kelola pemerintahan. Beberapa arahan kebijakan baru ditambahkan sebagai penanda majunya tingkat kemandirian yang ditargetkan.
<b>RPJM Tahap III (2017-2021)</b>	<b>Provinsi Papua Barat yang Berdaya Saing</b> Memiliki SDM dan perekonomian yang mampu beradaptasi terhadap perubahan internal dan eksternal untuk meraih keberhasilan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik dengan tetap terbuka pada persaingan regional, nasional, dan global.



<b>RPJM Tahap IV (2022-2025)</b>	<b>Provinsi Papua Barat yang Sejahtera</b> Menjadi wilayah yang sejahtera secara perekonomian wilayah serta masyarakat Papua Barat sejahtera secara ekonomi dan sosial sebagai manifestasi dari capaian pembangunan yang telah dilaksanakan selama tiga periode pembangunan jangka menengah sebelumnya.
--	--

*Sumber: RPJPD Provinsi Papua Barat (diolah)*

➤ **Telaah RPJPD Kabupaten Sekitar Manokwari Selatan**

**d. Isu-isu Strategis Kabupaten Manokwari Selatan**

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang dijabarkan melalui fenomena pembangunan daerah Kabupaten Manokwari Selatan, serta kajian dari isu-isu strategis pembangunan baik isu internasional, isu dan kebijakan strategis nasional, maupun isu dan kebijakan strategis Provinsi Papua Barat maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Manokwari Selatan pada periode 2016-2021 adalah sebagai berikut:

**a. Kabupaten Manokwari Sebagai Daerah Otonomi Baru**

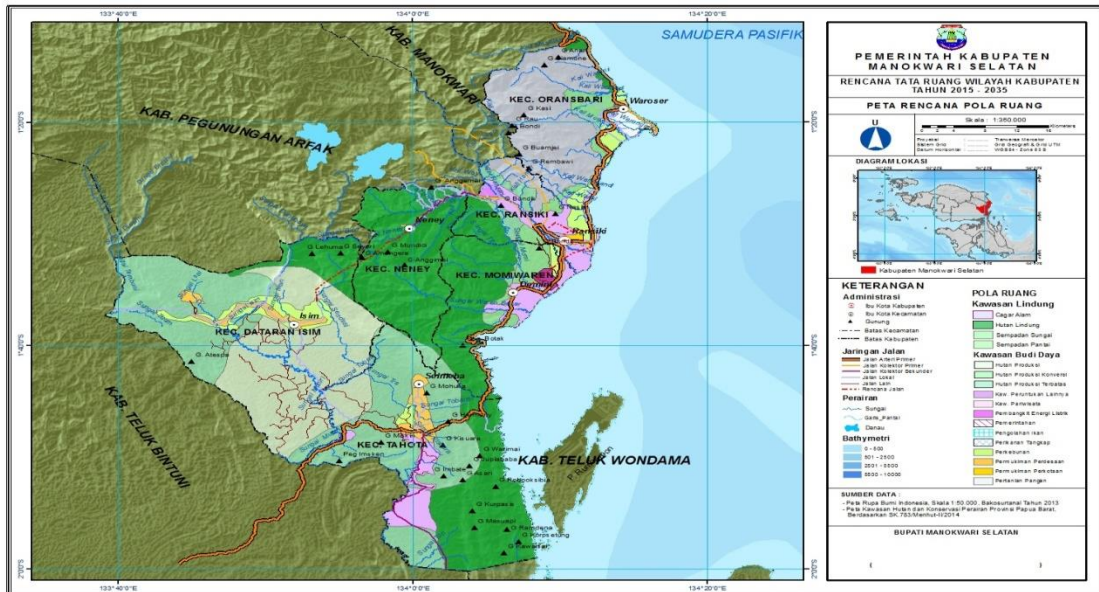
Kabupaten Manokwari Selatan merupakan kabupaten otonomi khusus baru yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Sebagai wilayah yang memiliki kewenangan otonomi khusus, maka Kabupaten Manokwari Selatan lebih leluasa dalam mengembangkan pembangunan daerahnya mengingat otonomi khusus yang diberikan akan mewujudkan berbagai hak dan aspirasi masyarakat agar tetap menjadi bagian utuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Meskipun begitu, segala peraturan perundang-undangan harus tetap menjadi hierarki dari kebijakan nasional mengingat setiap tahapan pembangunan kedaerahan akan memberikan sumbangsih bagi keterwujudan capaian pembangunan nasional.

Kabupaten Manokwari Selatan ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 pada tanggal 17 November 2012. Secara administratif, wilayah Kabupaten Manokwari Selatan memiliki ibukota yakni di Boundij Distrik Ransiki dengan total wilayah administrasi sebanyak 6 distrik dan 57 kampung.





**Gambar 3.7**  
**Rencana Pola Ruang Kabupaten Manokwari Selatan**



Pembentukan daerah otonomi baru ini akan memberi konsekuensi pada setiap kewenangan yang dirumuskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Selatan untuk memberikan yang terbaik dan optimal terhadap pencapaian pembangunan daerah. Selain konsekuensi, beriringan dengan hal tersebut maka Kabupaten Manokwari Selatan memiliki keuntungan sebagai daerah otonomi baru dimana setiap keputusan dan penggunaan sumber daya alam dapat seluas-luasnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Sehingga, selain aspek politik, social, budaya, pertahanan dan keamanan, pemerintah daerah perlu meningkatkan kapabilitas dan kemampuan ekonomi, pemberdayaan setiap potensi sumber daya, hingga pengendalian berbagai konflik eksternal yang menyebabkan disintegrasi bangsa.

**b. Ketimpangan kesejahteraan masyarakat antar wilayah (sosial ekonomi)**

Kunci dari pembangunan adalah kemakmuran bersama yang akan tercapai dengan adanya pemerataan pembangunan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa kunci dari pemerataan kesejahteraan masyarakat ialah pembangunan yang adil dan merata serta menyentuh segala aspek bidang terkait kehidupan seluruh lapisan masyarakat sehingga akan didapatkan masyarakat yang hidup damai dan sejahtera. Dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat inilah menjadikan segala aspek pembangunan dapat terdorong dan berkembang dimana seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan





pembangunan-pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah melalui optimalisasi manfaat hasil pembangunan daerah.

Pengembangan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di setiap titik wilayah Kabupaten Manokwari Selatan merupakan salah satu capaian puncak dari tujuan pembangunan wilayah sebagai bagian dari capaian tujuan pembangunan nasional. Kesejahteraan rakyat akan tercapai jika hasil pembangunan daerah dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat baik dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan masyarakat oleh pemerintah daerah.

#### **c. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah**

Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pelabuhan, air bersih, energi, dan kelistrikan secara merata menjadi salah satu kendala utama pembangunan wilayah Kabupaten Manokwari Selatan. Hal ini menyebabkan masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang terlihat dari rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia baik dari sisi pendidikan, kesehatan, maupun kehidupan yang layak.

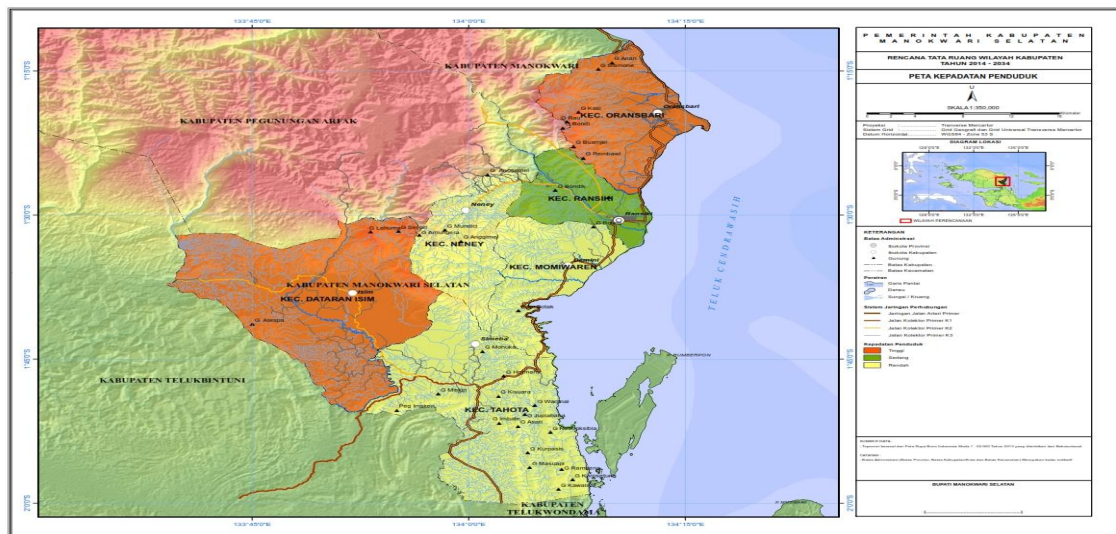
Pembangunan aksesibilitas wilayah berkualitas dengan kapasitas yang memadai dan merata merupakan faktor penting untuk mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan sehingga masyarakat lebih mudah mencapai berbagai fasilitas pelayanan infrastruktur dasar seperti sekolah, fasilitas kesehatan, dan sebagainya. Keuntungan peningkatan aksesibilitas wilayah dalam perekonomian adalah terbentuknya jaringan infrastruktur yang efektif guna meningkatkan keterkaitan sektor primer berbasis pertanian dengan sektor industri pendukungnya melalui kluster dan pengembangan kawasan berdasarkan potensi dan unggulan komoditas daerah.

#### **d. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)**

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam melaksanakan reformasi global pembangunan daerah. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus dalam menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi dalam persaingan global sehingga mampu meningkatkan kapabilitas pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, kemampuan bangsa untuk berdaya saing tinggi adalah kunci bagi tercapainya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat baik bidang sosial maupun ekonomi.



**Gambar 3.8**  
**Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Manokwari Selatan**



*Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Manokwari Selatan, 2016-2035*

Pembangunan daerah Kabupaten Manokwari Selatan memiliki visi utama dalam mewujudkan kemandirian masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara merata, konsisten, dan berkelanjutan. Kemandirian dalam hal ini memiliki makna bahwa setiap masyarakat harus mampu dalam memenuhi setiap kebutuhan hidupnya sendiri maupun keluarganya dengan kuantitas dan kualitas yang layak baik dalam pemenuhan kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Oleh karenanya, kemandirian mutlak membutuhkan kemampuan setiap individu dalam partisipasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Berbagai rencana pembangunan yang dimiliki pemerintah semestinya sudah mulai mengajak partisipasi masyarakat. Karena tanpa didukung peran serta masyarakat, pembangunan yang dilaksanakan akan menjadi kurang efektif. Dari tahun ke tahun, proses pembangunan yang dilakukan pemerintah ternyata juga semakin dikritisi oleh masyarakat. Dan dampaknya, tumbuh bias-bias negatif dari masyarakat terhadap proses pembangunan yang sedang atau akan dilakukan.

Kemampuan setiap individu dalam menjalankan aktivitas pembangunan merupakan bentuk dari keluaran potensi sumber daya manusia sebagai subyek maupun obyek pembangunan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini agar ke



depannya Kabupaten Manokwari Selatan memiliki tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing.

**e. Pembangunan perekonomian daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam Kabupaten Manokwari Selatan**

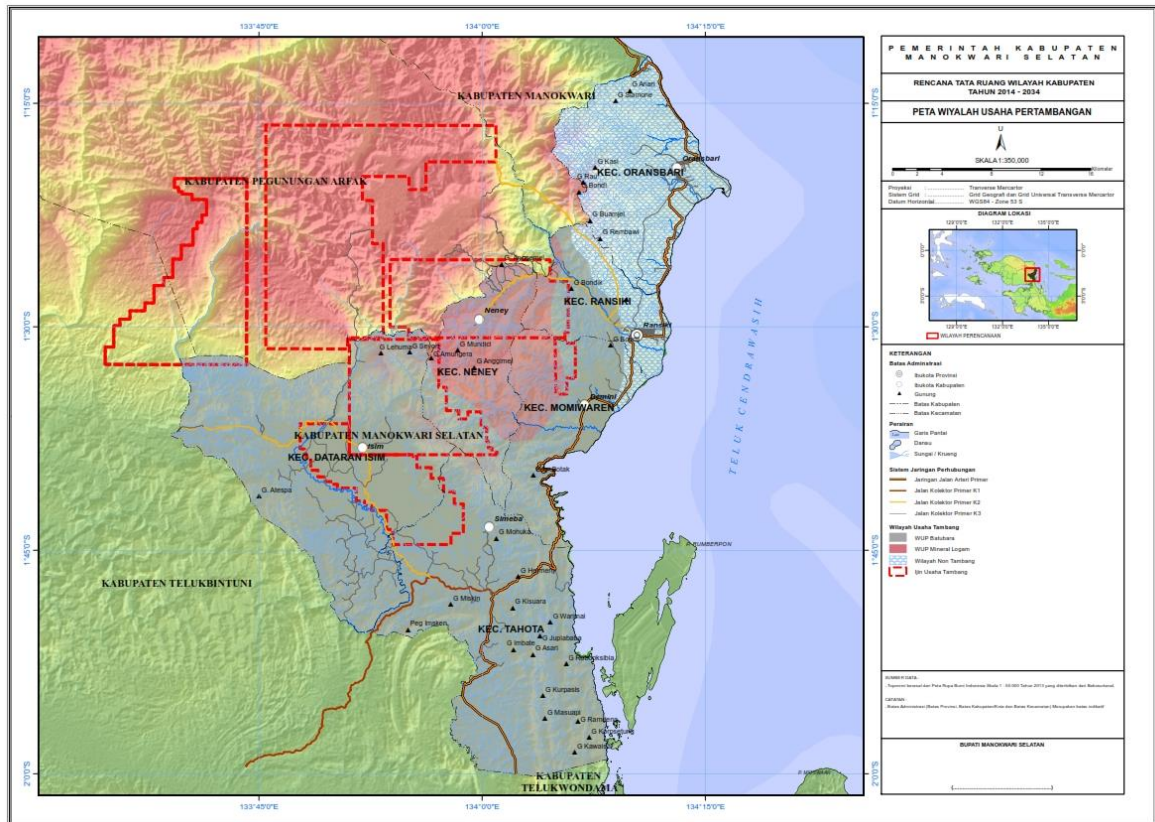
Pulau Papua memiliki potensi kekayaan sumber daya alam yang sangat potensial dan menjanjikan. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai *prime mover* pembangunan ekonomi daerah dan negara Indonesia untuk dimanfaatkan secara optimal bagi sebesar-besarnya kemajuan dan kesejahteraan segenap masyarakat Indonesia, tidak terkecuali masyarakat Papua Barat khususnya Kabupaten Manokwari Selatan.

Sebagian penduduk Kabupaten Manokwari Selatan bekerja di sektor pertanian (dalam arti luas) meskipun masih menggunakan cara tradisional/konvensional. Kekayaan hayati di alam menjadi harapan bagi sebagian penduduk dalam mencari kebutuhan dasar kehidupan. Hanya sebagian kecil penduduk saja yang berusaha mengembangkan diri dengan membangun perekonomian pribadinya melalui beraktivitas di sektor lain. Hal ini disebabkan selain minimnya jumlah lapangan kerja yang minim, juga sumber daya manusia di Kabupaten Manokwari Selatan masih kurang berkualitas baik dari segi pendidikan maupun keterampilan.

Pemerintah memiliki banyak “PR” dalam menyikapi masalah pengembangan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan sumber daya manusia. Perlu adanya cara-cara taktis dan aplikatif dalam menggerakkan sektor-sektor potensial sekaligus peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga pada akhirnya akan memacu pembangunan daerah. Peningkatan nilai tambah sektor yang mendominasi perekonomian daerah dapat menjadi salah satu alternatif pembangunan perekonomian daerah. Jenis potensi pertambangan yang terdapat di Kabupaten Manokwari Selatan adalah batubara, granit, pasir kuarsa.



**Gambar 3.9 .**  
**Peta Wilayah Usaha Pertambangan Kabupaten Manokwari Selatan**



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Manokwari Selatan, 2016-2035

Dominasi perekonomian wilayah Manokwari Selatan adalah kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mencapai 65,99 persen dari struktur ekonomi wilayah secara total. Persentase yang sangat besar ini cukup memberikan suatu “angin segar” bagi pemerintah daerah sekaligus warning untuk dapat mengatur bagaimana perekonomian tetap berjalan namun tidak berdampak pada degradasi lingkungan hidup.

**f. Perwujudan *Good Governance* melalui reformasi birokrasi**

*Good governance* didefinisikan sebagai suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik secara umum. Dalam *good governance* mengandung pengertian terkait nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat, kemandirian, aspek fungsional dan pemerintahan yang efektif dan efisien. Mewujudkan *Good Governance* (tata pemerintahan yang baik) secara menyeluruh memiliki cakupan seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat yang mengutarakan



kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka.

Dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik sangat tergantung dari ketiga lembaga yang menyusun pemerintahan tersebut yaitu pemerintah (*government*), dunia usaha (swasta), dan masyarakat. Ketiga domain itu harus saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya sehingga terjalin sebuah sinergi dalam rangka mencapai tujuan.

Penerapan prinsip-prinsip *clean government* dan *good governance* secara universal diyakini sebagai prinsip dasar yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pelayanan prima kepada publik menjadi suatu tujuan utama dalam mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan baik pusat maupun daerah. Oleh karena itu, peningkatan dan perbaikan tatanan birokrasi menjadi suatu hal mutlak yang harus diwujudkan.

Aparatur pemerintahan sebagai subyek dari pembangunan reformasi birokrasi harus menjadi titik tolak dalam program pencapaian *good governance*. Peningkatan sumber daya aparatur dari segi kualitas dan pembentukan struktur organisasi dengan tata laksana kelembagaan yang efektif dan efisien menjadi prioritas dalam mengembangkan kapasitas pemerintah serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil akhir yang diharapkan dari prinsip *good governance* and *clean government* adalah terciptanya pemerintahan yang baik (*clean government*) dan pelayan publik yang semakin baik (*good and clean public service*). Bila semua itu terwujud, maka konflik kepentingan yang selama ini dikedepankan hingga menghambat perjalanan dan gerak langkah pembangunan Kabupaten Manokwari Selatan dapat diminimalisir.

#### **g. Pembangunan berkelanjutan sebagai implementasi dari antisipasi degradasi lingkungan hidup**

Proses pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pembangunan daerah tentu saja dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) mengamanatkan, pemerintah dan seluruh unsur masyarakat wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber daya dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

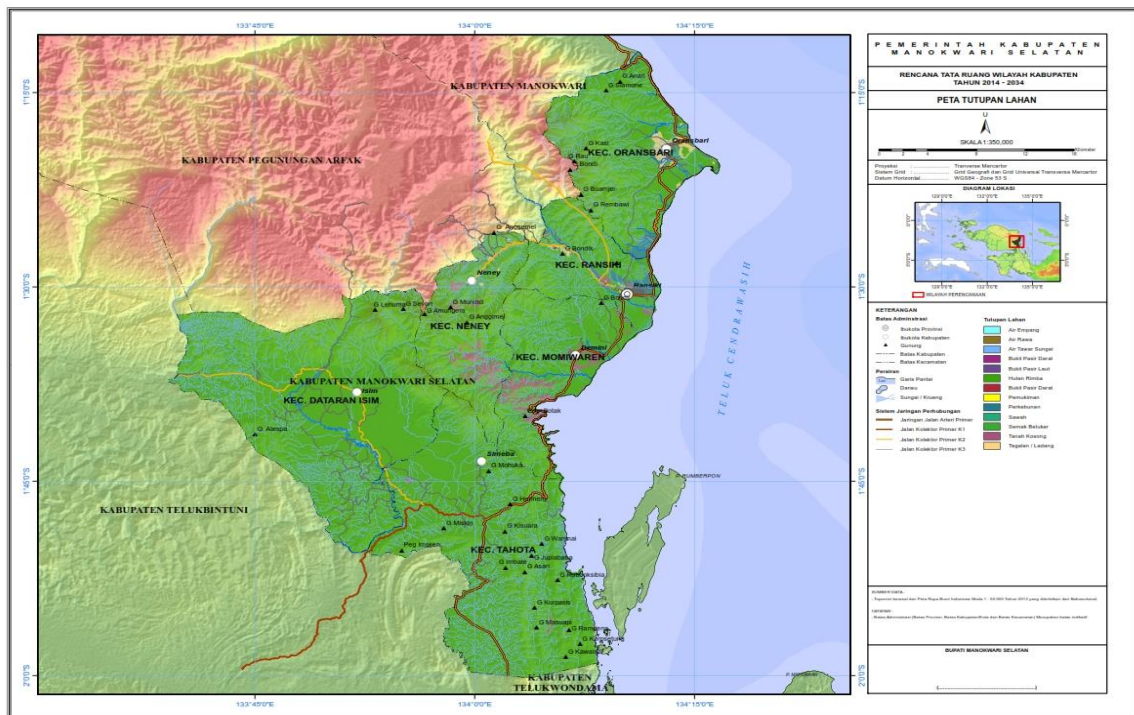
Sebagai wilayah yang memiliki cukup tinggi potensi sumber daya alamnya, Kabupaten Manokwari Selatan memegang peranan penting dalam kelanjutan kualitas lingkungan hidup





utamanya penjagaan hutan sebagai paru-paru dunia. Tingginya kontribusi pertanian utamanya subsektor kehutanan memberikan kekhawatiran tersendiri bagi seluruh pihak dalam kerangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan cita-cita internasional. Oleh karena itu, penting adanya pengawasan dan monitoring yang melekat dan terpadu dalam memilah eksploitasi sumber daya alam Manokwari Selatan sehingga tidak ada kepentingan ekonomi yang berakibat pada menurunnya kualitas lingkungan hidup.

**Gambar 3.10**  
**Peta Tutupan Lahan Kabupaten Manokwari Selatan**



Kualitas lingkungan yang menurun dapat berimbas terhadap timbulnya bencana alam. Bencana ditimbulkan oleh suatu proses alami atau akibat dari perbuatan manusia. Bencana hanya bisa dihindari, kejadian suatu bencana tidak dapat diprediksi dengan tepat baik waktu maupun besarnya, manusia hanya dapat memperkirakan sebatas kemungkinannya saja (probabilitas). Yang dapat digolongkan suatu bencana adalah gerakan tanah, banjir, gempa, tsunami, badai gunung meletus, kerusakan pantai, kebakaran dan lain-lain.

**h. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)**

Pasar bebas ASEAN atau MEA terealisasi pada akhir 2015. Kini berbagai pihak, baik itu pemerintah, pelaku usaha, maupun kalangan profesional mulai bersiap menyambutnya. MEA merupakan singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN yang



memiliki pola dalam mengintegrasikan ekonomi ASEAN dengan cara membentuk sistem perdagangan bebas atau *free trade* antara negara-negara anggota ASEAN. Pemerintahan Kabupaten Manokwari Selatan belum sepenuhnya bersiap menghadapi era perdagangan bebas mengingat masih minimnya tenaga kerja yang berkualitas sekaligus rendahnya daya saing perekonomian lokal. Hal ini akan menjadi berat, mengingat era perdagangan bebas membuat persaingan ekonomi semakin tinggi karena terbukanya persaingan dalam memasarkan produk dan komoditi yang dijual secara bebas.

Kabupaten Manokwari Selatan dalam capaian pembangunannya perlu memperkuat sektor ekonomi yang dimiliki terutama produk unggulan daerah sehingga mampu bersaing dengan produk luar daerah maupun luar negeri di ASEAN. Kebijakan lain yang bisa dilakukan melalui peningkatan mutu industri rumah tangga dan membangun sektor baik pertanian, perkebunan, peternakan maupun perikanan dengan menggunakan teknologi yang lebih maju. Petani, pengusaha, perajin dan pelaku usaha lainnya, diharapkan mampu membangun persaingan usaha yang sehat, menciptakan lapangan kerja baru dan turut andil meningkatkan perekonomian.

#### **i. Potensi Rawan Bencana**

Wilayah Kabupaten Manokwari Selatan merupakan kawasan rawan bencana alam (Gempa Bumi dan Tsunami) karena Wilayah Kabupaten Manokwari Selatan berada disekitar daerah patahan yang dikenal sebagai sesar Sorong dan Ransiki. Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Manokwari selatan terdiri dari bencana gempa bumi dan bencana tsunami. Kawasan rawan tsunami ditetapkan dengan kriteria pantai dengan elevasi rendah dan/atau berpotensi atau pernah mengalami tsunami. Penetapan daerah tsunami adalah daerah bahaya dengan jarak 3.500 meter dari garis pasang tertinggi. Pengembangan lokasi permukiman sebaiknya berada di belakang daerah bahaya yang terdiri dari beberapa zona yang berfungsi memecah gelombang tsunami dan memperlambat kecepatan gelombang serta revitalisasi ekosistem pesisir.

Sesuai dengan sifat dari bencana tsunami yang sampai saat ini masih merupakan bencana yang tidak dapat dihindari oleh manusia, sehingga perlu upaya dalam mengantisipasi teradap bencana yang mungkin akan terjadi dengan mengembangkan dan mengenalkan manajemen resiko melalui early warning system. Perencanaan mitigasi pada bencana tsunami harus bertujuan untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya yang dihadapi dan pengetahuan tentang perlindungan dini.



Berikut beberapa kawasan rawan bencana yang terdapat di Kabupaten Manokwari Selatan:

- a. Rawan tsunami, yang meliputi wilayah pesisir khususnya Distrik Oransbari, Ransiki, Momi Waren;
- b. Rawaan gempa bumi hanya berada di Distrik Ransiki, Dataran Isim dan Momi Waren;
- c. Rawan Banjir hanya berada pada Distrik Oransbari dan Ransiki.

**j. Ketimpangan kesejahteraan masyarakat antar wilayah (sosial ekonomi)**

Kunci dari pembangunan adalah kemakmuran bersama yang akan tercapai dengan adanya pemerataan pembangunan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa kunci dari pemerataan kesejahteraan masyarakat ialah pembangunan yang adil dan merata serta menyentuh segala aspek bidang terkait kehidupan seluruh lapisan masyarakat sehingga akan didapatkan masyarakat yang hidup damai dan sejahtera. Dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat inilah menjadikan segala aspek pembangunan dapat terdongkrak dan berkembang dimana seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan pembangunan-pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah melalui optimalisasi manfaat hasil pembangunan daerah.

Pengembangan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di setiap titik wilayah Kabupaten Manokwari Selatan merupakan salah satu capaian puncak dari tujuan pembangunan wilayah sebagai bagian dari capaian tujuan pembangunan nasional. Kesejahteraan rakyat akan tercapai jika hasil pembangunan daerah dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat baik dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, hingga pelayanan masyarakat oleh pemerintah daerah.

**k. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah**

Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pelabuhan, air bersih, energi, dan kelistrikan secara merata menjadi salah satu kendala utama pembangunan wilayah Kabupaten Manokwari Selatan. Hal ini menyebabkan masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang terlihat dari rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia baik dari sisi pendidikan, kesehatan, maupun kehidupan yang layak.

Pembangunan aksesibilitas wilayah berkualitas dengan kapasitas yang memadai dan merata merupakan faktor penting untuk mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan sehingga masyarakat lebih mudah mencapai berbagai fasilitas pelayanan

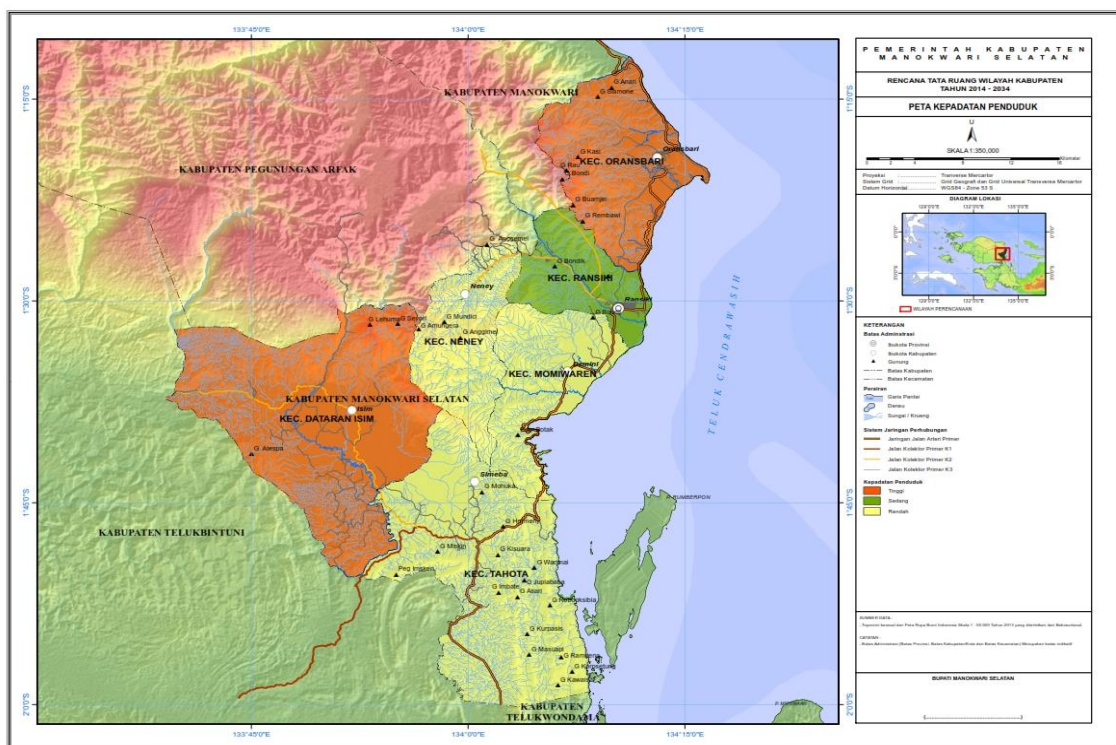


infrastruktur dasar seperti sekolah, fasilitas kesehatan, dan sebagainya. Keuntungan peningkatan aksesibilitas wilayah dalam perekonomian adalah terbentuknya jaringan infrastruktur yang efektif guna meningkatkan keterkaitan sektor primer berbasis pertanian dengan sektor industri pendukungnya melalui kluster dan pengembangan kawasan berdasarkan potensi dan unggulan komoditas daerah.

### 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam melaksanakan reformasi global pembangunan daerah. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus dalam menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi dalam persaingan global sehingga mampu meningkatkan kapabilitas pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, kemampuan bangsa untuk berdaya saing tinggi adalah kunci bagi tercapainya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat baik bidang sosial maupun ekonomi.

**Gambar 3.11**  
**Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Manokwari Selatan**



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Manokwari Selatan, 2016-2035

Pembangunan daerah Kabupaten Manokwari Selatan memiliki visi utama dalam mewujudkan kemandirian masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya



secara merata, konsisten, dan berkesinambungan. Kemandirian dalam hal ini memiliki makna bahwa setiap masyarakat harus mampu dalam memenuhi setiap kebutuhan hidupnya sendiri maupun keluarganya dengan kuantitas dan kualitas yang layak baik dalam pemenuhan kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Oleh karenanya, kemandirian mutlak membutuhkan kemampuan setiap individu dalam partisipasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Berbagai rencana pembangunan yang dimiliki pemerintah semestinya sudah mulai mengajak partisipasi masyarakat. Karena tanpa didukung peran serta masyarakat, pembangunan yang dilaksanakan akan menjadi kurang efektif. Dari tahun ke tahun, proses pembangunan yang dilakukan pemerintah ternyata juga semakin dikritisi oleh masyarakat. Dan dampaknya, tumbuh bias-bias negatif dari masyarakat terhadap proses pembangunan yang sedang atau akan dilakukan.

Kemampuan setiap individu dalam menjalankan aktivitas pembangunan merupakan bentuk dari keluaran potensi sumber daya manusia sebagai subyek maupun obyek pembangunan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini agar ke depannya Kabupaten Manokwari Selatan memiliki tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing.

#### **m. Pembangunan perekonomian daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam Kabupaten Manokwari Selatan**

Pulau Papua memiliki potensi kekayaan sumber daya alam yang sangat potensial dan menjanjikan. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai *prime mover* pembangunan ekonomi daerah dan negara Indonesia untuk dimanfaatkan secara optimal bagi sebesar-besarnya kemajuan dan kesejahteraan segenap masyarakat Indonesia, tidak terkecuali masyarakat Papua Barat khususnya Kabupaten Manokwari Selatan.

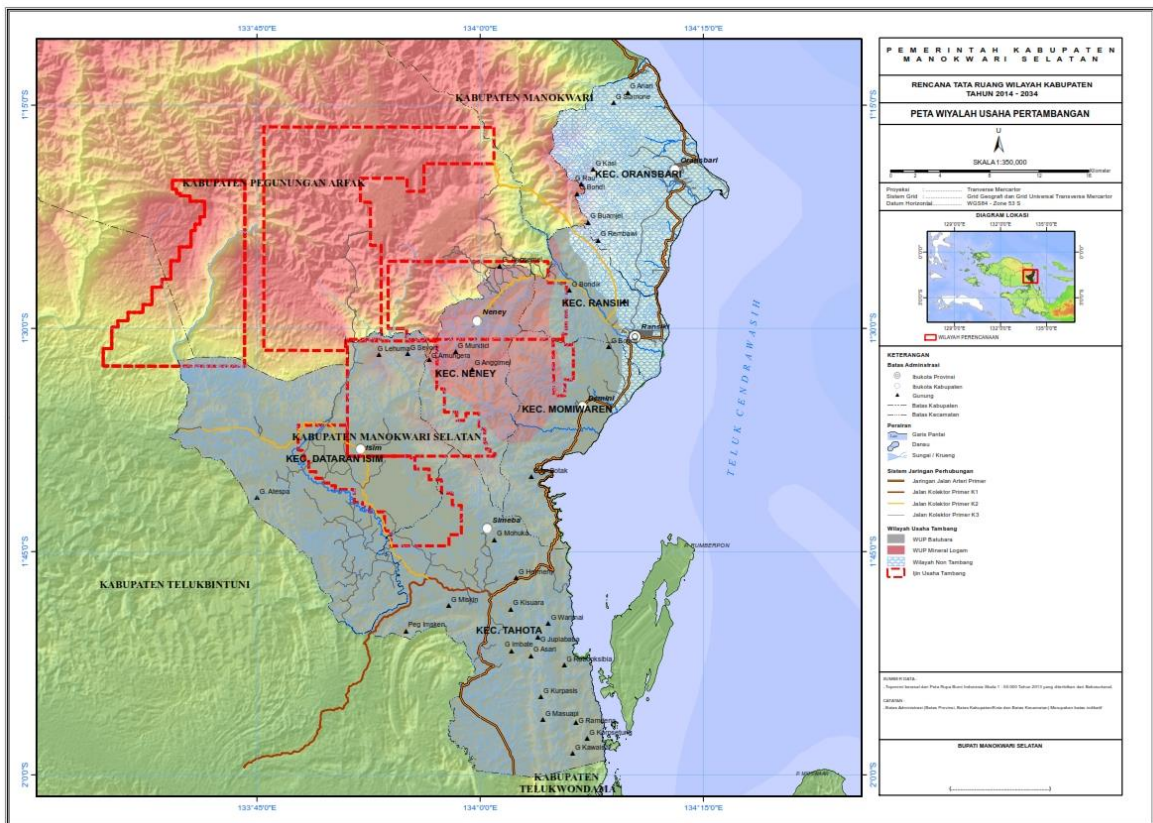
Sebagian penduduk Kabupaten Manokwari Selatan bekerja di sektor pertanian (dalam arti luas) meskipun masih menggunakan cara tradisional/konvensional. Kekayaan hayati di alam menjadi harapan bagi sebagian penduduk dalam mencari kebutuhan dasar kehidupan. Hanya sebagian kecil penduduk saja yang berusaha mengembangkan diri dengan membangun perekonomian pribadinya melalui beraktivitas di sektor lain. Hal ini disebabkan selain minimnya jumlah lapangan kerja yang minim, juga sumber daya manusia



di Kabupaten Manokwari Selatan masih kurang berkualitas baik dari segi pendidikan maupun keterampilan.

Pemerintah memiliki banyak “PR” dalam menyikapi masalah pengembangan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan sumber daya manusia. Perlu adanya cara-cara taktis dan aplikatif dalam menggerakkan sektor-sektor potensial sekaligus peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga pada akhirnya akan memacu pembangunan daerah. Peningkatan nilai tambah sektor yang mendominasi perekonomian daerah dapat menjadi salah satu alternatif pembangunan perekonomian daerah. Masyarakat Kabupaten Manokwari Selatan sebagian besar mengandalkan kehidupan dari perkebunan, hasil laut dan hasil tambang. Jenis potensi pertambangan yang terdapat di Kabupaten Manokwari Selatan adalah batubara, granit, pasir kuarsa.

**Gambar 3.12**  
**Peta Wilayah Usaha Pertambangan Kabupaten Manokwari Selatan**



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Manokwari Selatan, 2016-2035

Dominasi perekonomian wilayah Manokwari Selatan adalah kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mencapai 65,99 persen dari struktur ekonomi wilayah secara total. Persentase yang sangat besar ini cukup memberikan suatu “angin segar” bagi



pemerintah daerah sekaligus warning untuk dapat mengatur bagaimana perekonomian tetap berjalan namun tidak berdampak pada degradasi lingkungan hidup.

#### **n. Perwujudan *Good Governance* melalui reformasi birokrasi**

*Good governance* didefinisikan sebagai suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik secara umum. Dalam *good governance* mengandung pengertian terkait nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat, kemandirian, aspek fungsional dan pemerintahan yang efektif dan efisien. Mewujudkan *Good Governance* (tata pemerintahan yang baik) secara menyeluruh memiliki cakupan seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat yang mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka.

Dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik sangat tergantung dari ketiga lembaga yang menyusun pemerintahan tersebut yaitu pemerintah (*government*), dunia usaha (swasta), dan masyarakat. Ketiga domain itu harus saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya sehingga terjalin sebuah sinergi dalam rangka mencapai tujuan.

Penerapan prinsip-prinsip *clean government* dan *good governance* secara universal diyakini sebagai prinsip dasar yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pelayanan prima kepada publik menjadi suatu tujuan utama dalam mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan baik pusat maupun daerah. Oleh karena itu, peningkatan dan perbaikan tatanan birokrasi menjadi suatu hal mutlak yang harus diwujudkan.

Aparatur pemerintahan sebagai subyek dari pembangunan reformasi birokrasi harus menjadi titik tolak dalam program pencapaian *good governance*. Peningkatan sumber daya aparatur dari segi kualitas dan pembentukan struktur organisasi dengan tata laksana kelembagaan yang efektif dan efisien menjadi prioritas dalam mengembangkan kapasitas pemerintah serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil akhir yang diharapkan dari prinsip *good governance* and *clean government* adalah terciptanya pemerintahan yang baik (*clean government*) dan pelayan publik yang semakin baik (*good and clean public service*). Bila semua itu terwujud, maka konflik kepentingan yang selama ini dikedepankan hingga menghambat perjalanan dan gerak langkah pembangunan Kabupaten Manokwari Selatan dapat diminimalisir.



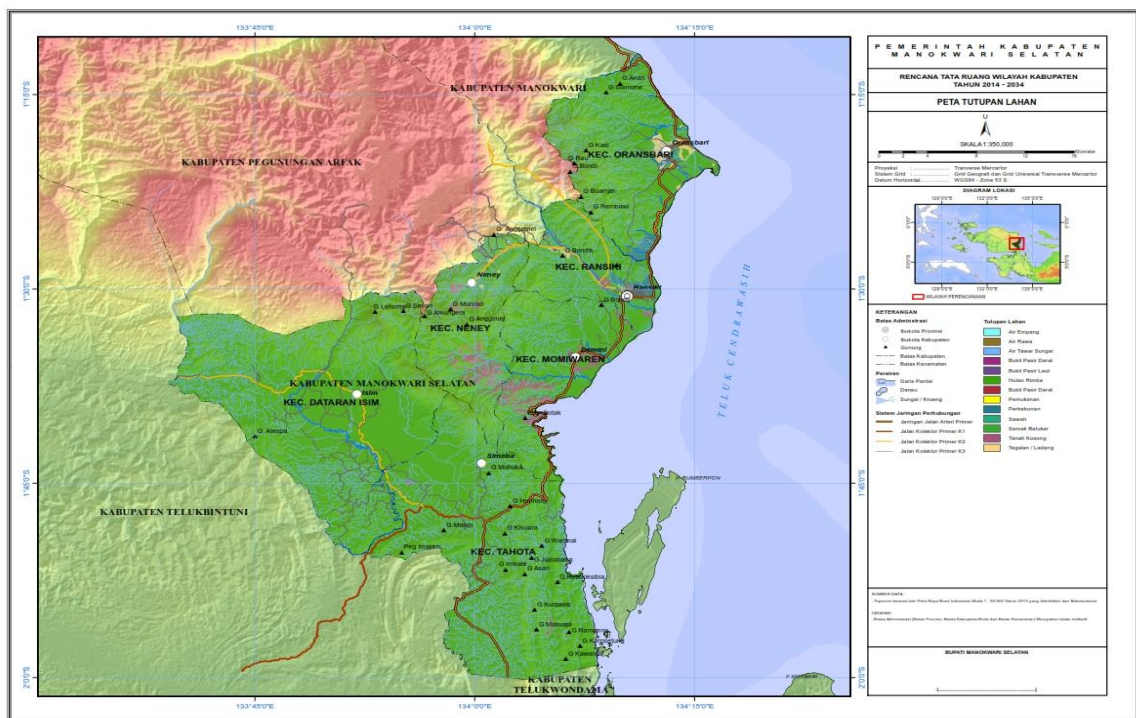


**o. Pembangunan berkelanjutan sebagai implementasi dariantisipasi degradasi lingkungan hidup**

Proses pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pembangunan daerah tentu saja dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) mengamanatkan, pemerintah dan seluruh unsur masyarakat wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber daya dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Sebagai wilayah yang memiliki cukup tinggi potensi sumber daya alamnya, Kabupaten Manokwari Selatan memegang peranan penting dalam kelanjutan kualitas lingkungan hidup utamanya penjagaan hutan sebagai paru-paru dunia. Tingginya kontribusi pertanian utamanya subsektor kehutanan memberikan kekhawatiran tersendiri bagi seluruh pihak dalam kerangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan cita-cita internasional. Oleh karena itu, penting adanya pengawasan dan monitoring yang melekat dan terpadu dalam memilah eksploitasi sumber daya alam Manokwari Selatan sehingga tidak ada kepentingan ekonomi yang berakibat pada menurunnya kualitas lingkungan hidup.

**Gambar 3.13**  
**Peta Tutupan Lahan Kabupaten Manokwari Selatan**





Kualitas lingkungan yang menurun dapat berimbas terhadap timbulnya bencana alam. Bencana ditimbulkan oleh suatu proses alami atau akibat dari perbuatan manusia. Bencana hanya bisa dihindari, kejadian suatu bencana tidak dapat diprediksi dengan tepat baik waktu maupun besarnya, manusia hanya dapat memperkirakan sebatas kemungkinannya saja (probabilitas). Yang dapat digolongkan suatu bencana adalah gerakan tanah, banjir, gempa, tsunami, badai gunung meletus, kerusakan pantai, kebakaran dan lain-lain.

#### **p. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)**

Pasar bebas ASEAN atau MEA terealisasi pada akhir 2015. Kini berbagai pihak, baik itu pemerintah, pelaku usaha, maupun kalangan profesional mulai bersiap menyambutnya. MEA merupakan singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN yang memiliki pola dalam mengintegrasikan ekonomi ASEAN dengan cara membentuk sistem perdagangan bebas atau *free trade* antara negara-negara anggota ASEAN. Pemerintahan Kabupaten Manokwari Selatan belum sepenuhnya bersiap menghadapi era perdagangan bebas mengingat masih minimnya tenaga kerja yang berkualitas sekaligus rendahnya daya saing perekonomian lokal. Hal ini akan menjadi berat, mengingat era perdagangan bebas membuat persaingan ekonomi semakin tinggi karena terbukanya persaingan dalam memasarkan produk dan komoditi yang dijual secara bebas.

Kabupaten Manokwari Selatan dalam capaian pembangunannya perlu memperkuat sektor ekonomi yang dimiliki terutama produk unggulan daerah sehingga mampu bersaing dengan produk luar daerah maupun luar negeri di ASEAN. Kebijakan lain yang bisa dilakukan melalui peningkatan mutu industri rumah tangga dan membangun sektor baik pertanian, perkebunan, peternakan maupun perikanan dengan menggunakan teknologi yang lebih maju. Petani, pengusaha, perajin dan pelaku usaha lainnya, diharapkan mampu membangun persaingan usaha yang sehat, menciptakan lapangan kerja baru dan turut andil meningkatkan perekonomian.

#### **q. Potensi Rawan Bencana**

Wilayah Kabupaten Manokwari Selatan merupakan kawasan rawan bencana alam (Gempa Bumi dan Tsunami) karena Wilayah Kabupaten Manokwari Selatan berada disekitar daerah patahan yang dikenal sebagai sesar Sorong dan Ransiki. Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Manokwari selatan terdiri dari bencana gempa bumi dan bencana tsunami. Kawasan rawan tsunami ditetapkan dengan kriteria pantai dengan elevasi rendah dan/atau berpotensi atau pernah mengalami tsunami. Penetapan daerah tsunami



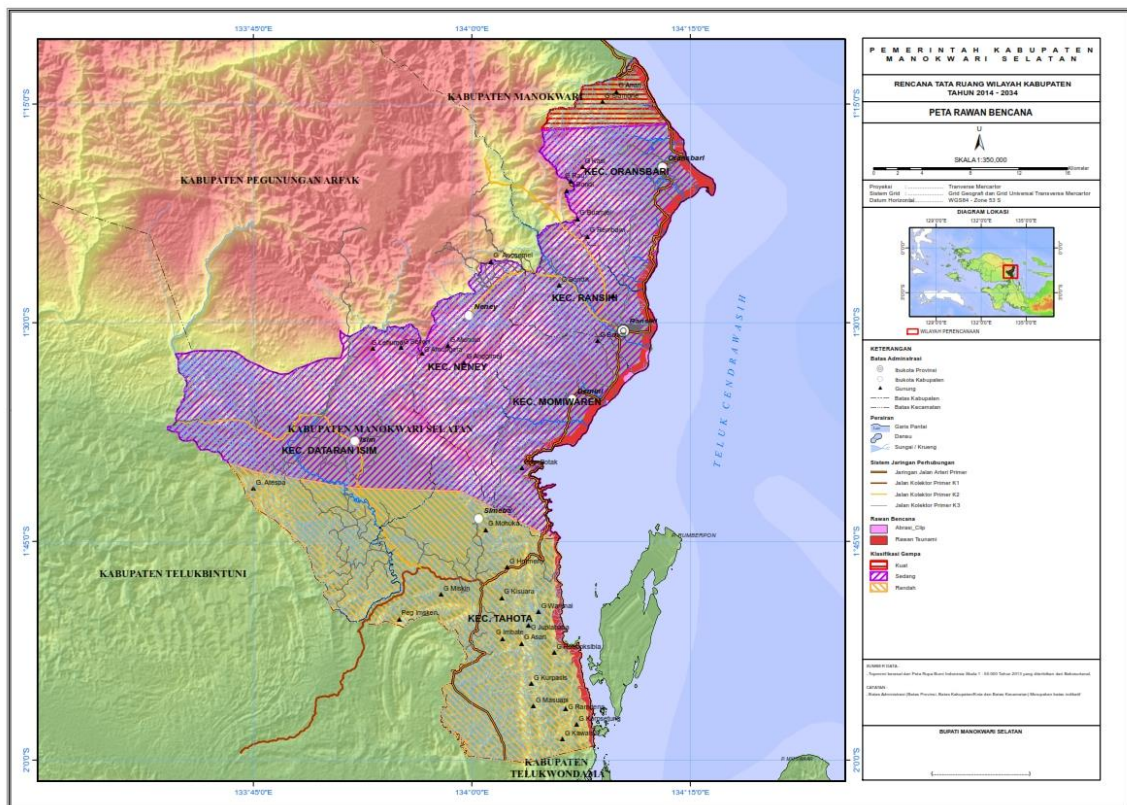
adalah daerah bahaya dengan jarak 3.500 meter dari garis pasang tertinggi. Pengembangan lokasi permukiman sebaiknya berada di belakang daerah bahaya yang terdiri dari beberapa zona yang berfungsi memecah gelombang tsunami dan memperlambat kecepatan gelombang serta revitalisasi ekosistem pesisir.

Sesuai dengan sifat dari bencana tsunami yang sampai saat ini masih merupakan bencana yang tidak dapat dihindari oleh manusia, sehingga perlu upaya dalam mengantisipasi teradap bencana yang mungkin akan terjadi dengan mengembangkan dan mengenalkan manajemen resiko melalui early warning system. Perencanaan mitigasi pada bencana tsunami harus bertujuan untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya yang dihadapi dan pengetahuan tentang perlindungan dini.

Berikut beberapa kawasan rawan bencana yang terdapat di Kabupaten Manokwari Selatan:

- d. Rawan tsunami, yang meliputi wilayah pesisir khususnya Distrik Oransbari, Ransiki, Momi Waren;
- e. Rawaan gempa bumi hanya berada di Distrik Ransiki, Dataran Isim dan Momi Waren;
- f. Rawan Banjir hanya berada pada Distrik Oransbari dan Ransiki.

**Gambar 3.14**  
**Peta Rawan Bencana Alam Kabupaten Manokwari Selatan**



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Manokwari Selatan, 2016-2035



## BAB IV

# VISI DAN MISI

Visi dan misi merupakan gambaran mengenai apa yang ingin dicapai oleh Kabupaten Manokwari Selatan dalam pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun mendatang. Untuk menyelenggarakan pembangunan jangka panjang, Kabupaten Manokwari Selatan perlu mengembangkan suatu arahan bagi penyelenggaraan sistem pembangunan, agar cita-cita masyarakat dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJPD tersebut memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional.

Konseptualisasi visi dan misi menjadi poin krusial bagi kesuksesan pembangunan suatu daerah. Pentingnya perencanaan yang berorientasi pada masa depan, dapat memaksimalkan interaksi organisasi secara efektif dalam usaha menghasilkan suatu perencanaan yang berkualitas, melalui optimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi. Dapat disimpulkan, kesinambungan antara visi dan misi menjadi salah satu kunci utama terlaksananya program dengan baik.

### 4.1 Visi RPJPD Kabupaten Manokwari Selatan

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan dijadikan pedoman dalam melaksanakan sasaran pembangunan jangka panjang. Visi dirumuskan dengan memerhatikan permasalahan daerah dan isu strategis Kabupaten Manokwari Selatan. Pada dasarnya, visi menjelaskan sasaran dan target dari capaian pembangunan jangka panjang Kabupaten Manokwari Selatan untuk periode Tahun 2005-2025. Berdasarkan kondisi obyektif dan permasalahan spesifik daerah seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Manokwari Selatan untuk periode Tahun 2005-2025 sebagai berikut:





## **“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MANOKWARI SELATAN YANG BERDIKARI, BERMARTABAT DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN”**

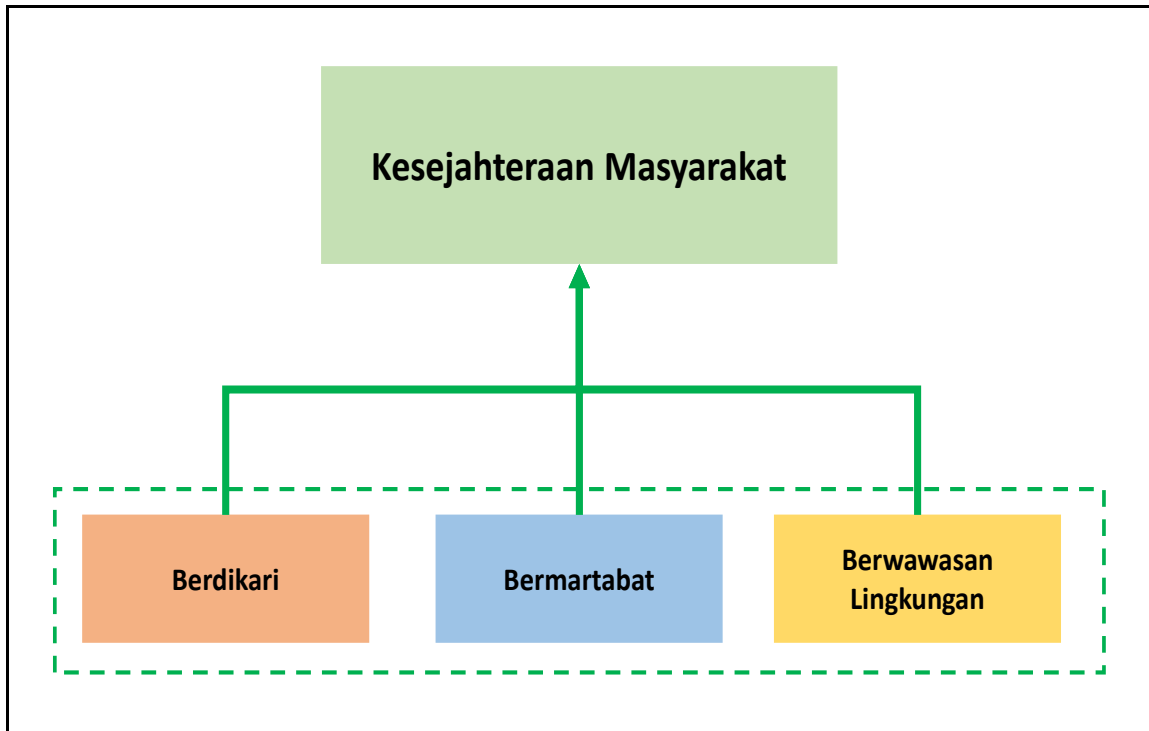
Di era otonomi, diharapkan daerah menjadi mandiri dalam menjalankan kewenangannya yang ditandai dengan makin kuatnya Kapasitas Fiskal atau PAD suatu daerah. Otonomi daerah merupakan salah satu instrumen yang dinilai efektif dalam pelaksanaan pemerataan pembangunan di tiap daerah. Dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan, diharapkan terjadi efisiensi dan keefektifan di daerah, serta mampu menjadi solusi atas ketimpangan antardaerah yang dianggap sebagai dampak dari sistem sentralistik yang kurang adil. Sementara itu, untuk beberapa hal yang mungkin masih kekurangan dana, daerah masih diberi bantuan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Perimbangan. Namun, tujuan awal pelaksanaan otonomi adalah mewujudkan Kapasitas Fiskal Daerah yang kuat dalam mendukung terciptanya kemandirian daerah.

Lingkungan hidup menjadi isu yang sedang diperhatikan oleh pemerintahan. Hal ini berkaitan dengan isu *global warming* yang melanda dunia, kemudian Indonesia merupakan salah satu wilayah yang mempunyai jumlah hutan yang luas. Sehingga diharapkan lingkungan hidup menjadi fokus utama pemerintah. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan benda serta kesatuan makhluk hidup termasuk manusia terlibat di dalamnya. Manusia harus menyadari bahwa lingkungan merupakan sarana pengembangan hidup yang harus dijaga kelestariannya. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling memengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

Konsep pembangunan jangka panjang Kabupaten Manokwari Selatan menitikberatkan pada pelestarian lingkungan hidup yang menjadikan masyarakat mandiri. Selain ketiga konsep tersebut, konsep pembangunan jangka panjang Kabupaten Manokwari Selatan juga memerhatikan kebudayaan dan wawasan lingkungan. Dimensi pembangunan jangka panjang dari ketiga konsep tersebut dijelaskan pada Gambar 4.1 sebagai berikut.



**Gambar 4.1**  
**Konsep Visi Kabupaten Manokwari Selatan**



Sebagai gambaran sederhana mengenai apa yang ingin dicapai dalam pembangunan jangka panjang Kabupaten Manokwari Selatan, ketiga elemen pokok yaitu berdikari, bermartabat dan berwawasan lingkungan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Manokwari Selatan. Pengertian dari masing-masing pokok Visi adalah, sebagai berikut:

#### ➤ **KESEJAHTERAAN**

Kesejahteraan adalah hal atau keadaan aman, sentosa dan makmur serta bebas dari segala macam gangguan. Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dalam pembangunan. Pemerintah pada setiap implementasi kebijakan selalu menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan yang hendak dicapai.

#### ➤ **BERDIKARI**

Berdikari mengandung pengertian tidak bergantung pada bantuan orang lain atau mandiri. Masyarakat yang mandiri adalah suatu kondisi masyarakat yang memiliki kapasitas dan akseptabilitas untuk berkembang berdasarkan potensi dan kreatifitas. Hal ini mengandung arti bahwa pola kemandirian daerah, selain memajukan daerah itu sendiri sekaligus menyejahterakan masyarakatnya. Kemandirian memberikan kesempatan kepada daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan dan pelaksanaan pembangunan dalam mengejar ketertinggalannya dari daerah lain sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.



### ➤ **BERMARTABAT**

Masyarakat yang bermartabat adalah masyarakat yang memiliki kebebasan dalam menentukan sikap dan tindakannya, memiliki kesadaran sosial tentang kesetaraan dan kesamaan. Upaya dalam membentuk masyarakat yang bermartabat merupakan tugas dari pemerintah. Pembentukan masyarakat yang bermartabat memerlukan pendidikan karakter yang kuat serta pengajaran tentang wawasan kebangsaan. Dengan masyarakat yang bermartabat maka pembangunan yang dilaksanakan akan menjadi tepat sasaran karena dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas.

### ➤ **BERWAWASAN LINGKUNGAN**

Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup. Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana merupakan tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup.

Disadari sepenuhnya bahwa kegiatan pembangunan apalagi yang bersifat fisik dan berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam jelas mengandung resiko terjadinya perubahan ekosistem yang selanjutnya akan mengakibatkan dampak, baik yang bersifat negatif maupun yang positif. Oleh karena itu, kegiatan pembangunan yang dilaksanakan seharusnya selain berwawasan sosial dan ekonomi juga harus berwawasan lingkungan.

## **4.2 Misi Kabupaten Manokwari Selatan**

Perwujudan visi pembangunan Kabupaten Manokwari Selatan ditempuh melalui misi pembangunan daerah. Misi pembangunan ini merupakan komitmen penentu keberhasilan visi pembangunan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Visi Kabupaten Manokwari Selatan yang **“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Manokwari Selatan yang Berdikari, Bermartabat dan Berwawasan Lingkungan”** dibangun sebagai usaha bersama pemerintah kabupaten dan masyarakatnya untuk menyamakan dan menyelaraskan pandangan, penilaian dan langkah pada pelaksanaan pembangunan. Pencapaian visi jangka panjang Kabupaten Manokwari Selatan yang sejahtera, berdikari, bermartabat dan berwawasan lingkungan membutuhkan upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh segenap pemangku kepentingan (*stakeholder*) secara sinergis. Upaya-upaya



yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi jangka panjang Kabupaten Manokwari Selatan dikenal dengan misi. Misi pembangunan Kabupaten Manokwari Selatan, sebagai berikut:

### **Misi Pembangunan Kabupaten Manokwari Selatan 2005-2025:**

1. Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing;
2. Mewujudkan Kesejahteraan Seluruh Lapisan Masyarakat;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*); dan
4. Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup yang Berkualitas.

Penjelasan dari masing-masing misi di atas adalah sebagai berikut:

#### **1. Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing**

Pembangunan pendidikan yang berkualitas akan menciptakan sumber daya manusia unggul dan merupakan aset utama pembangunan. Pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Manokwari Selatan dilaksanakan melalui peningkatan kualitas dan perluasan akses pendidikan, serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat yang diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan lingkungan. Peningkatan kualitas dan perluasan akses didukung oleh penguatan manajemen pelayanan pendidikan. Dengan demikian, diharapkan kompetensi, sistem nilai, karakter, dan sikap dasar masyarakat Manokwari Selatan akan terbentuk dengan baik dan sesuai dengan tantangan jaman. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat yang diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan lingkungan. Perwujudan masyarakat yang sehat ditempuh dengan meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan.

#### **2. Mewujudkan Kesejahteraan Seluruh lapisan Masyarakat**

Kunci dari pembangunan adalah kesejahteraan bersama. Pemerataan hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Tingkat pertumbuhan yang tinggi tanpa disertai pemerataan pembangunan hanyalah menciptakan perekonomian yang lemah dan eksploitasi sumber daya manusia. Oleh karena itu, hendaknya kesejahteraan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.



### 3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

*Good governance* memiliki pengertian segala hal yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia, *good governance* dapat diartikan sebagai pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Maksudnya baik yaitu pemerintahan yang berkaitan dengan sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi diatur sesuai dengan kekuasaan yang dilaksanakan masyarakat. Sedangkan pemerintahan yang bersih adalah pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur, dan bertanggung jawab. *Good governance* dapat terwujud secara maksimal apabila unsur pemerintahan dan masyarakat (yang di dalamnya terdapat sektor swasta) saling terkait. Syarat atau ketentuan agar pemerintahan bisa berjalan dengan baik yaitu: bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan atau berlawanan dan mendapat dukungan dari masyarakat, pembangunan dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam hal biaya dan waktu.

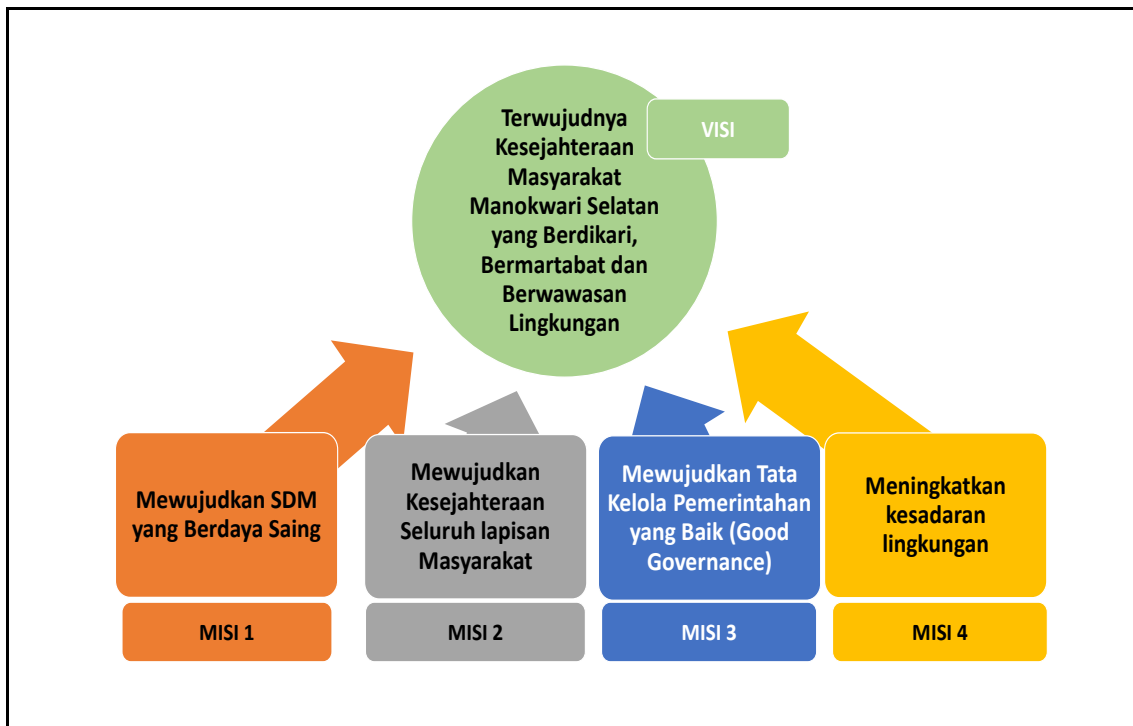
### 4. Meningkatkan kesadaran lingkungan

Pencemaran lingkungan menyebabkan menurunnya mutu lingkungan hidup, sehingga akan mengancam kelangsungan makhluk hidup, terutama ketenangan dan ketentraman hidup manusia, sehingga perlu adanya upaya peningkatan kesadaran lingkungan. Adanya pengertian dan persepsi yang sama dalam memahami pentingnya lingkungan hidup bagi kelangsungan hidup manusia akan dapat mengendalikan tindakan dan perilaku manusia untuk lebih mementingkan lingkungan hidup. Kemauan untuk saling menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup merupakan itikad yang luhur dari dalam diri manusia dalam memandang hakekat dirinya sebagai warga dunia. Niat untuk melindungi lingkungan merupakan hal yang paling penting demi meningkatkan kesadaran masyarakat atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup.

Dengan demikian, keterkaitan visi terhadap misi sebagaimana telah dijelaskan di atas, dapat dilihat secara ringkas pada Gambar 4.2 berikut ini.



**Gambar 4.2**  
Keterkaitan Visi terhadap Misi Kabupaten Manokwari Selatan





## BAB V

# ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Visi dan misi pembangunan daerah jangka panjang merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan bersama seluruh pemangku kepentingan daerah. Visi dan Misi ini menjadi komitmen dan akan dilaksanakan dalam pembangunan 20 tahun ke depan. Target kinerja dalam kurun waktu 20 tahun tersebut dicapai melalui *milestone* 5 (lima) tahunan, sesuai dengan arah kebijakan masing-masing tahap. Arah kebijakan pembangunan menunjukkan agenda/tema yang merupakan fokus utama pembangunan lima tahunan. Arah kebijakan pembangunan selanjutnya diterjemahkan ke dalam sasaran pokok pada tiap tahap pembangunan. Dengan demikian, pencapaian sasaran pokok dilakukan secara bertahap dalam empat periode lima tahunan pembangunan sesuai arah kebijakan pembangunan.

Arah pembangunan daerah diterjemahkan kedalam sasaran pokok dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Manokwari Selatan untuk periode tahun 2005-2025 mendatang. Arah pembangunan daerah pada dasarnya arah kebijakan yang secara rasional dapat menjelaskan fokus pembangunan berisikan kondisi masa depan yang diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 20 tahun sebagai hasil dari terlaksananya proses pembangunan daerah yang direncanakan dalam RPJPD ini.

Sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, kurun waktu RPJP Daerah mengikuti atau sesuai dengan kurun waktu RPJP Nasional. Sehubungan Kabupaten Manokwari Selatan merupakan kabupaten pemekaran baru maka pelaksanaan RPJP Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam dua tahap RPJMD yaitu RPJM Daerah Tahap III (2016-2021), dan RPJM Daerah Tahap IV (2021-2025).



### 5.1. Sasaran Jangka Panjang

Sasaran pembangunan jangka panjang pada dasarnya adalah kuantifikasi visi dan misi pada akhir periode ke 20. Sasaran menjelaskan target dari capaian pembangunan jangka panjang pada akhir tahun ke 20 Kabupaten Manokwari Selatan. Sasaran pembangunan jangka panjang Kabupaten Manokwari Selatan adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatnya Kualitas SDM Manokwari Selatan;**
2. **Meningkatnya daya saing perekonomian daerah;**
3. **Meningkatnya kinerja pemerintah daerah; dan**
4. **Terjaganya kualitas lingkungan hidup Manokwari Selatan.**

Penjelasan dari tiap-tiap sasaran, sebagai berikut:

#### 1. **Meningkatnya Kualitas SDM Manokwari Selatan**

Sumber Daya manusia merupakan penggerak dan atau pelaksana pembangunan. Pembangunan dapat dilaksanakan dengan maksimal membutuhkan SDM yang mampu melaksanakan pembangunan dengan maksimal. Oleh karena itu peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Manokwari Selatan perlu mendapatkan prioritas sebagai dasar pembangunan daerah. Pembangunan Sumber Daya Manusia ini dilakukan melalui pendidikan, hal ini dilakukan agar Manokwari Selatan mempunyai SDM yang berkualitas dan mampu menggiring pembangunan yang optimal dan berkualitas. Dalam kehidupan manusia salah satu faktor yang berpengaruh besar adalah kesehatan.

Kesehatan merupakan layanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kesehatan juga merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

#### 2. **Meningkatnya daya saing perekonomian daerah**

Pembangunan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan dan terciptanya pemerataan pembagian pendapatan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat dilihat dengan





nilai PDRB perkapita suatu daerah. PDRB per kapita ini dapat digunakan untuk menilai kemakmuran penduduk suatu wilayah. Dengan PDRB perkapita dan pendapatan regional perkapita menggambarkan rata-rata pendapatan yang diterima penduduk suatu wilayah pada tahun tertentu.

Dengan demikian, pembangunan jangka panjang ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian melalui PDRB perkapita masyarakat, sehingga Kabupaten Manokwari Selatan mampu setara dengan PDRB Provinsi Papua Barat. Dalam rangka meningkatkan perekonomian perlu adanya pengembangan ekonomi lokal yang berbasis kerakyatan. Hal ini merupakan salah satu proses yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Melalui pengembangan ekonomi lokal, pemerintah bersama dengan seluruh masyarakat dan *stakeholder* diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja pada tingkat lokal daerah.

### **3. Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah**

Dalam menyikapi kebijakan otonomi daerah dan implementasinya ini perlu segera dilakukan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good government*) pada saat ini merupakan prioritas utama dalam penegakkan citra pemerintah dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah yang sampai saat ini dianggap masih sangat rendah. Dalam rangka itu, sebagaimana dituangkan dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) maka tindak lanjutnya diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat dan jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari KKN.

### **4. Terjaganya kualitas lingkungan hidup Manokwari Selatan**

Dalam kehidupan manusia melakukan segala aktivitas, salah satunya pembangunan daerah. Pembangunan daerah beberapa aspek kehidupan yang perlu diperhatikan adalah lingkungan hidup. Kualitas lingkungan hidup adalah derajat kemampuan lingkungan untuk memenuhi



kebutuhan dasar manusia tersebut antara lain sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, keamanan, pekerjaan dan perlindungan hidup.

Lingkungan hidup yang dikenal sangat ramah dan hijau kini seakan mampu berubah menjadi ancaman bagi masyarakatnya. Hal ini dikarenakan tingkat kerusakan lingkungan di Indonesia sangat besar. Pencemaran lingkungan dan aktivitas penebangan hutan secara ilegal merupakan penyebab utamanya.

Banyaknya bencana yang sering terjadi di tanah air seperti banjir dan tanah longsor merupakan bukti betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan di era globalisasi. Dengan hal ini perlu adanya upaya pemeliharaan akan kualitas lingkungan hidup, agar keberlangsungan kehidupan manusia dapat diteruskan.

Berdasarkan sasaran pembangunan program sebagaimana dijelaskan di atas indikator makro jangka panjang yang ingin dicapai sebagai berikut:

**Tabel 5.1**  
**Indikator Makro Jangka Panjang Kabupaten Manokwari Selatan**

No	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal (2005)	Target akhir Tahun (2025)
1	Meningkatnya Kualitas SDM Manokwari Selatan	IPM		
2	Meningkatnya daya saing perekonomian daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi		
3	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah	Predikat kinerja pemerintah daerah		
4	Terjaganya kualitas lingkungan hidup Manokwari Selatan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		



**Tabel 5.2**  
**Visi, Misi, Sasaran dan Indikator sasaran RPJPD**

<b>VISI: TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MANSEL YANG BERDIKARI, BERMARTABAT DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN</b>				
<b>Misi/Tujuan</b>	<b>Sasaran / Sasaran pokok</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Target Tahap III (2016-2021)</b>	<b>Target Tahap IV (2021-2025)</b>
<b>Misi 1: Mewujudkan SDM yang berdaya saing</b>				
Terwujudnya kualitas SDM yang berdaya saing	1. Meningkatkan Kualitas SDM	IPM		
	1) Meningkatkan angka harapan lama sekolah	Angka Harapan Lama Sekolah		
	2) Meningkatkan rata-rata lama sekolah	Rata-rata Lama Sekolah		
	3) Menurunnya angka pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka		
	4) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup		
<b>Misi 2: Mewujudkan Kesejahteraan Seluruh Lapisan Masyarakat</b>				
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat	2. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi		
	8) Meningkatkan nilai tambah sektor pertanian	LPE sektor pertanian, kehutanan dan perikanan		



<b>VISI: TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MANSEL YANG BERDIKARI, BERMARTABAT DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN</b>						
<b>Misi/Tujuan</b>	<b>Sasaran / Sasaran pokok</b>		<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Target Tahap III (2016-2021)</b>	<b>Target Tahap IV (2021-2025)</b>	
			Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap struktur ekonomi daerah			
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	5)	Menurunnya kemiskinan masyarakat	Tingkat Kemiskinan			
			Jumlah wirausahawan baru			
	6)	Meningkatnya daya beli masyarakat	Pendapatan perkapita			
			Meningkatnya industri kreatif dan UMKM	Jumlah industri kreatif		
				Jumlah UMKM		
	7)	Meningkatnya infrastruktur dasar bagi masyarakat	Tingkat elektrifikasi			
			Panjang Jalan			
			Persentase permukiman layak huni			
			Persentase RT berakses air bersih			



<b>VISI: TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MANSEL YANG BERDIKARI, BERMARTABAT DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN</b>				
<b>Misi/Tujuan</b>	<b>Sasaran / Sasaran pokok</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Target Tahap III (2016-2021)</b>	<b>Target Tahap IV (2021-2025)</b>
<b>Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)</b>				
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	3. Meningkatnya kinerja pemerintah daerah	Predikat kinerja pemerintah daerah		
	9) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah		
	10) Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN	Opini BPK		
	11) Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat		
<b>Misi 4: Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup yang berkualitas</b>				
Meningkatnya kelestarian dan kualitas lingkungan hidup	4. Terjaganya kualitas lingkungan hidup	Indeks lingkungan hidup		
	12) Meningkatnya RTH dan luas tutupan lahan	Tutupan Lahan Persentase RTH		



## 5.2. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

Arah kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam mencapai sasaran pembangunan jangka panjang. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah menjabarkan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 tahun, guna mencapai sasaran jangka panjang dan memberikan arahan pada sasaran pokok tahapan lima tahunan RPJPD.

Visi mengarahkan kondisi daerah yang ingin dicapai dalam 20 tahun ke depan (*desired future*). Visi daerah dituangkan dalam RPJPD, dirumuskan, dibahas dan disepakati secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah secara partisipatif. Visi pembangunan jangka panjang daerah yang telah diterjemahkan dalam sasaran dan arah kebijakan RPJPD menjadi acuan bagi (calon) kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam merumuskan visinya pada periode lima tahun berkenaan.

Sasaran 20 tahunan dalam misi pembangunan jangka panjang daerah diterjemahkan prioritasnya masing-masing pada setiap tahapan pembangunan lima tahunan melalui penetapan sasaran pokok 5 (lima) tahunan. Sasaran pokok 5 (lima) tahunan dilakukan berdasarkan arah kebijakan pembangunan pada setiap periode lima tahunan. Arah kebijakan pembangunan pada dasarnya merupakan arahan fokus kebijakan lima tahunan yang memberi panduan kapan suatu indikator kinerja sasaran pokok harus dicapai.

Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka panjang daerah.

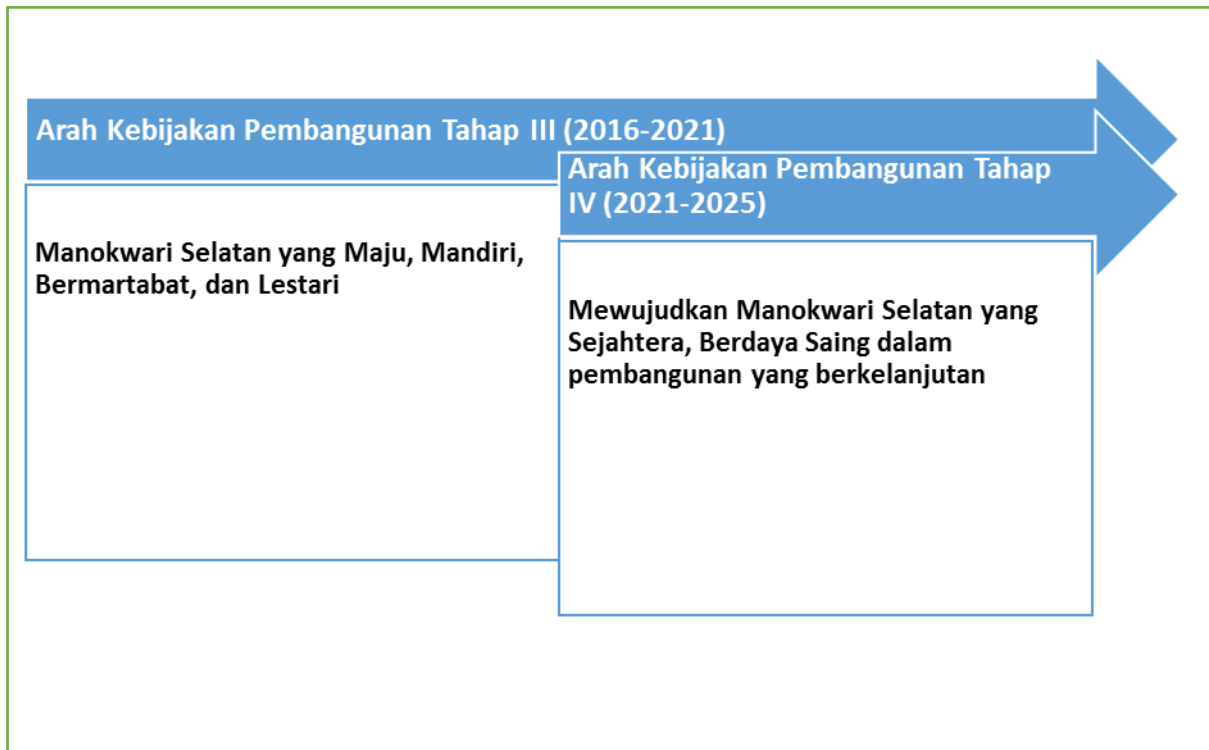
### 5.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Manokwari Selatan 2005–2025 dikelompokkan menjadi 2 (dua) tahapan bagi kabupaten Manokwari, sebagaimana dijelaskan di atas, yaitu tahap III dan IV. Setiap tahapan pembangunan di dalam pembangunan jangka panjang memiliki prioritas-prioritas dengan target tertentu setiap tahunnya. Prioritas tersebut tertuang dalam sasaran-sasaran pokok disertai dengan target pencapaian yang mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu.



Penekanan fokus atau tema pembangunan dalam setiap tahapan memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka panjang Manokwari Selatan. Tema tersebut untuk memudahkan pemahaman umum bahwa satu tahapan ke tahapan berikutnya saling terkait dan menjadi satu kesatuan yang utuh selama masa 20 tahun.

**Gambar. 4.1**  
**Agenda/Tema Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Manokwari Selatan 2005-2025**



Sebagaimana terlihat dalam **Gambar. 4.1** pencapaian visi dan misi pembangunan 20 tahun Kabupaten Manokwari Selatan ditempuh melalui 2 (dua) tema besar di masing-masing tahapan pembangunan lima tahunan. Peletakan dasar-dasar pembangunan menjadi fokus utama pada tahap pertama untuk menjadi landasan bagi keberhasilan tahap-tahap selanjutnya. Pembangunan 5 (lima) tahunan diharapkan menciptakan masyarakat Manokwari Selatan yang sejahtera dan mampu bersaing dengan daerah-daerah lain serta tercapainya Visi pembangunan jangka panjang: “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Mansel yang Berdikari, Bermartabat dan Berwawasan Lingkungan”.





Arah kebijakan pembangunan setiap tahapan beserta prioritasnya selama 20 tahun pembangunan di Kabupaten Manokwari Selatan, diuraikan sebagai berikut:

### **a. Arah Kebijakan Pembangunan Tahap III**

Arah kebijakan Tahap III merupakan pedoman pembangunan Kabupaten Manokwari Selatan selama 5 (lima) tahun yang menjabarkan sasaran pembangunan jangka panjang, sebagai rangkaian pentahapan pembangunan 20 tahun. Tema pembangunan Kabupaten Manokwari Selatan pada Tahap III adalah:

#### **Manokwari Selatan yang Maju, Mandiri, Bermartabat, dan Lestari**

Pada tahap ini arah kebijakan pembangunan diarahkan kepada upaya memperkuat pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik, terutama pada bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Pada periode pembangunan ini, juga dilakukan upaya melanjutkan pencapaian arah kebijakan sebelumnya. Pada tahap ini diharapkan Kabupaten Manokwari Selatan memiliki pertumbuhan pembangunan yang tinggi dan merata ke seluruh distrik.

Adapun arah kebijakan pembangunan Kabupaten Manokwari Selatan tahap III, sebagai berikut:

1. Regulasi pendidikan
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar
3. Peningkatan fasilitas guru di pedalaman distrik/kampung
4. Perbaikan manajemen pengelolaan penempatan guru maupun aspek kependidikan lainnya
5. Peningkatan keterampilan pada masyarakat
6. Peningkatan lapangan usaha bagi masyarakat
7. Penyediaan puskesmas inap di setiap distrik
8. penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit
9. Pemberian bantuan pembinaan keagamaan
10. Pemberian bantuan rumah ibadah
11. Penyaluran subsidi kebutuhan primer masyarakat kurang mampu
12. Pemerataan kegiatan perekonomian daerah ke seluruh distrik dan kampung-kampung
13. Pendampingan usaha bagi masyarakat asli papua
14. Pengembangan koperasi dan UMKM
15. Peningkatan daya saing berwirausaha bagi masyarakat asli papua
16. Pemerataan ketersediaan jaringan listrik di distrik dan kampung-kampung
17. Pemenuhan listrik 24 jam di ibukota
18. Penataan kawasan pemukiman layak huni
19. Pemenuhan ketersediaan air bersih di distrik dan kampung-kampung



20. Pemanfaatan teknologi dalam pengembangan komoditas unggulan
21. Pemberian kepastian jaminan berusaha/berinvestasi
22. Pengembangan industri kecil dalam pengelolaan komoditas unggulan
23. Peningkatan nilai tambah pada komoditas unggulan
24. Peningkatan kinerja aparatur pemda
25. Peningkatan kualitas perencanaan Perangkat Daerah (PD)
26. Penyediaan dan penyelenggaraan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan
27. penyediaan data dan informasi yang akurat dan update
28. peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
29. Pengendalian alih fungsi hutan
30. Penyediaan ruang terbuka publik bagi masyarakat
31. Peningkatan penegakan hukum lingkungan

#### **b. Arah Kebijakan Pembangunan Tahap IV**

Tahap IV ini merupakan akhir perodesasi pembangunan bertahap yang ada dalam perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Manokwari Selatan. Seluruh sasaran pembangunan jangka panjang dalam rangka perwujudan visi dan misi Kabupaten Manokwari Selatan sampai tahun 2025 diharapkan dapat tercapai. Fungsi strategis arah kebijakan pembangunan tahap IV ini menjadi penentu kinerja pembangunan Kabupaten Manokwari Selatan selama 20 tahun (2005-2025).

Mengingat pentingnya arah kebijakan tahap IV ini, maka arah kebijakan pembangunan pada periode lima tahun terakhir difokuskan pada:

**Mewujudkan Manokwari Selatan yang Sejahtera dan Berdaya Saing dalam Pembangunan yang Berkelanjutan**

Pada tahap ini pembangunan diarahkan untuk mencapai kesejahteraan yang hakiki yang diperoleh orang papua asli. Dengan mempunyai daya saing yang tinggi maka pembangunan akan dilakukan dengan lebih mudah tanpa mengindahkan kelestarian lingkungan hidup. Pada tahap, diharapkan seluruh sasaran pembangunan jangka panjang beserta target seluruh sasaran pokok pada setiap periode pembangunan dapat tercapai.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Manokwari Selatan pada tahap IV, yaitu:

1. Regulasi pendidikan
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar
3. Peningkatan fasilitas guru di pedalaman distrik/kampung
4. Peningkatan keterampilan pada masyarakat



5. Peningkatan lapangan usaha bagi masyarakat
6. Peningkatan dan Pengembangan lapangan pekerjaan yang berkualitas
7. Peningkatan kualitas, kuantitas dan akses kesehatan masyarakat
8. Penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit
9. Penyediaan puskesmas inap yang layak di setiap distrik
10. Pemberian bantuan rumah ibadah
11. Pengembangan produktivitas komoditas unggulan daerah
12. Pemanfaatan teknologi dalam pengembangan komoditas unggulan (kaka)o
13. Pengembangan industri kecil pada pengelolaan komoditas unggulan
14. Pemberian kepastian jaminan berusaha/berinvestasi
15. Peningkatan nilai tambah pada komoditas unggulan
16. Peningkatan dan Pemerataan pembangunan sektor ekonomi daerah
17. Penyaluran subsidi kebutuhan primer masyarakat kurang mampu secara tepat dan relevan
18. Pengembangan ekonomi kerakyatan
19. Peningkatan kemandirian dalam berwirausaha
20. Pendampingan usaha bagi masyarakat asli papua
21. Pengembangan Industri kreatif, koperasi dan UMKM
22. Peningkatan daya saing berwirausaha bagi masyarakat asli papua
23. Pemenuhan ketersediaan listrik 24 jam
24. Pembangunan akses antar distrik
25. Penataan kawasan pemukiman layak huni yang memperhatikan kearifan lokal/budaya setempat
26. Pemenuhan ketersediaan air bersih di distrik dan kampung-kampung
27. Peningkatan kinerja aparatur pemda
28. Penyelenggaraan pemerintahan lokal yang akuntabel
29. Peningkatan kualitas perencanaan Perangkat Daerah (PD)
30. peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
31. Penyediaan dan penyelenggaraan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan
32. Peningkatan performa pemerintahan daerah
33. Peningkatan kualitas aparatur pengelola keuangan daerah
34. Perbaikan manajemen pengelolaan asset daerah
35. Peningkatan pelayanan publik di distrik dan kampung-kampung
36. Pembenahan fasilitas pelayanan publik
37. Pengendalian alih fungsi hutan
38. Penyediaan ruang terbuka publik bagi masyarakat
39. Peningkatan penegakan hukum lingkungan



**Tabel 5.3**  
**Visi, Misi, Sasaran dan Arah Kebijakan**  
**Pembangunan Daerah Jangka Panjang Tahun 2005-2025, Kabupaten Manokwari Selatan**

Visi RPJPD MANSEL: TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MANSEL YANG BERDIKARI, BERMARTABAT DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN					
Misi/Tujuan	Sasaran / Sasaran pokok	Indikator Sasaran	Arah Kebijakan RPJPD Mansel	Manokwari Selatan yang Maju, Mandiri, Bermartabat, dan Lestari Tahap III (2016-2021)	Mewujudkan Manokwari Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing dalam pembangunan yang berkelanjutan Tahap IV (2021-2025)
<b>Misi 1: Mewujudkan SDM yang berdaya saing</b>					
Terwujudnya kualitas SDM yang berdaya saing	1. Meningkatkan Kualitas SDM	IPM			
	1) Meningkatkan angka harapan lama sekolah	Angka Harapan Lama Sekolah	Regulasi pendidikan		
			Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan		
			Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar		
			Peningkatan fasilitas guru di pedalaman distrik/kampung		



<b>Visi RPJPD MANSEL: TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MANSEL YANG BERDIKARI, BERMARTABAT DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN</b>						
<b>Misi/Tujuan</b>	<b>Sasaran / Sasaran pokok</b>		<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Arah Kebijakan RPJPD Mansel</b>	<b>Manokwari Selatan yang Maju, Mandiri, Bermartabat, dan Lestari Tahap III (2016-2021)</b>	<b>Mewujudkan Manokwari Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing dalam pembangunan yang berkelanjutan Tahap IV (2021-2025)</b>
	2)	Meningkatnya rata-rata lama sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	Perbaikan manajemen pengelolaan penempatan guru maupun aspek kependidikan lainnya		
	3)	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	Peningkatan lapangan usaha bagi masyarakat		
				Peningkatan keterampilan pada masyarakat		
				Peningkatan dan Pengembangan lapangan pekerjaan yang berkualitas		



**Visi RPJPD MANSEL: TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MANSEL YANG BERDIKARI, BERMARTABAT DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN**

Misi/Tujuan	Sasaran / Sasaran pokok	Indikator Sasaran	Arah Kebijakan RPJPD Mansel	Manokwari Selatan yang Maju, Mandiri, Bermartabat, dan Lestari Tahap III (2016-2021)	Mewujudkan Manokwari Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing dalam pembangunan yang berkelanjutan Tahap IV (2021-2025)
	4) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Peningkatan kualitas, kuantitas dan akses kesehatan masyarakat		
			Penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit		
			Penyediaan puskesmas inap yang layak di setiap distrik		
			Pemberian bantuan pembinaan keagamaan		
			Pemberian bantuan rumah ibadah		



<b>Visi RPJPD MANSEL: TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MANSEL YANG BERDIKARI, BERMARTABAT DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN</b>					
<b>Misi/Tujuan</b>	<b>Sasaran / Sasaran pokok</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Arah Kebijakan RPJPD Mansel</b>	<b>Manokwari Selatan yang Maju, Mandiri, Bermartabat, dan Lestari Tahap III (2016-2021)</b>	<b>Mewujudkan Manokwari Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing dalam pembangunan yang berkelanjutan Tahap IV (2021-2025)</b>
<b>Misi 2: Mewujudkan Kesejahteraan Seluruh Lapisan Masyarakat</b>					
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat	2. Meningkatnya daya saing perekonomian daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi			
	8) Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian	LPE sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Pengembangan produktivitas komoditas unggulan daerah		
			Pemanfaatan teknologi dalam pengembangan komoditas unggulan (kakao)		
			Pengembangan industri kecil pada pengelolaan komoditas unggulan		





<b>Visi RPJPD MANSEL: TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MANSEL YANG BERDIKARI, BERMARTABAT DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN</b>						
<b>Misi/Tujuan</b>	<b>Sasaran / Sasaran pokok</b>		<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Arah Kebijakan RPJPD Mansel</b>	<b>Manokwari Selatan yang Maju, Mandiri, Bermartabat, dan Lestari Tahap III (2016-2021)</b>	<b>Mewujudkan Manokwari Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing dalam pembangunan yang berkelanjutan Tahap IV (2021-2025)</b>
			Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap struktur ekonomi daerah	Pemberian kepastian jaminan berusaha/berinvestasi		
				Peningkatan nilai tambah pada komoditas unggulan		
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	5)	Menurunnya kemiskinan masyarakat	Tingkat Kemiskinan	Peningkatan dan Pemerataan pembangunan sektor ekonomi daerah		
				Penyaluran subsidi kebutuhan primer masyarakat kurang mampu secara tepat dan relevan		



**Visi RPJPD MANSEL: TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MANSEL YANG BERDIKARI, BERMARTABAT DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN**

Misi/Tujuan	Sasaran / Sasaran pokok	Indikator Sasaran	Arah Kebijakan RPJPD Mansel	Manokwari Selatan yang Maju, Mandiri, Bermartabat, dan Lestari Tahap III (2016-2021)	Mewujudkan Manokwari Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing dalam pembangunan yang berkelanjutan Tahap IV (2021-2025)
			Pengembangan ekonomi kerakyatan		
			Pemerataan kegiatan perekonomian daerah ke seluruh distrik dan kampung-kampung		
		Jumlah wirausahawan baru	Peningkatan kemandirian dalam berwirausaha		
	6) Meningkatnya daya beli masyarakat	Pendapatan perkapita	Pendampingan usaha bagi masyarakat asli papua		
	Meningkatnya industri kreatif dan UMKM	Jumlah industri kreatif	Pengembangan Industri kreatif, koperasi dan UMKM		



<b>Visi RPJPD MANSEL: TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MANSEL YANG BERDIKARI, BERMARTABAT DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN</b>						
<b>Misi/Tujuan</b>	<b>Sasaran / Sasaran pokok</b>		<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Arah Kebijakan RPJPD Mansel</b>	<b>Manokwari Selatan yang Maju, Mandiri, Bermartabat, dan Lestari Tahap III (2016-2021)</b>	<b>Mewujudkan Manokwari Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing dalam pembangunan yang berkelanjutan Tahap IV (2021-2025)</b>
			Jumlah UMKM	Peningkatan daya saing berwirausaha bagi masyarakat asli papua		
	7)	Meningkatkan infrastruktur dasar bagi masyarakat	Tingkat elektrifikasi	Pemerataan ketersediaan jaringan listrik di distrik dan kampung-kampung		
				Pemenuhan ketersediaan listrik 24 jam		
			Panjang Jalan	Pembangunan akses antar distrik		
			Persentase permukiman layak huni	Penataan kawasan pemukiman layak huni yang memperhatikan kearifan lokal/budaya setempat		



<b>Visi RPJPD MANSEL: TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MANSEL YANG BERDIKARI, BERMARTABAT DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN</b>						
<b>Misi/Tujuan</b>	<b>Sasaran / Sasaran pokok</b>		<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Arah Kebijakan RPJPD Mansel</b>	<b>Manokwari Selatan yang Maju, Mandiri, Bermartabat, dan Lestari Tahap III (2016-2021)</b>	<b>Mewujudkan Manokwari Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing dalam pembangunan yang berkelanjutan Tahap IV (2021-2025)</b>
			Persentase RT berakses air bersih	Pemenuhan ketersediaan air bersih di distrik dan kampung-kampung		
<b>Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (<i>Good Governance</i>)</b>						
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	3. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah		Predikat kinerja pemerintah daerah	Peningkatan kinerja aparatur pemda		
	9)	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan pemerintahan lokal yang akuntabel Peningkatan kualitas perencanaan Perangkat Daerah (PD)		



<b>Visi RPJPD MANSEL: TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MANSEL YANG BERDIKARI, BERMARTABAT DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN</b>						
<b>Misi/Tujuan</b>	<b>Sasaran / Sasaran pokok</b>		<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Arah Kebijakan RPJPD Mansel</b>	<b>Manokwari Selatan yang Maju, Mandiri, Bermartabat, dan Lestari Tahap III (2016-2021)</b>	<b>Mewujudkan Manokwari Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing dalam pembangunan yang berkelanjutan Tahap IV (2021-2025)</b>
				penyediaan data dan informasi yang akurat dan update		
				peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel		
				Penyediaan dan penyelenggaraan sistem perencanaan dan pengendalian pembangunan		
	10)	Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN	Opini BPK	Peningkatan performa pemerintahan daerah		
				Peningkatan kualitas aparatur pengelola keuangan daerah		



<b>Visi RPJPD MANSEL: TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MANSEL YANG BERDIKARI, BERMARTABAT DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN</b>						
<b>Misi/Tujuan</b>	<b>Sasaran / Sasaran pokok</b>		<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Arah Kebijakan RPJPD Mansel</b>	<b>Manokwari Selatan yang Maju, Mandiri, Bermartabat, dan Lestari Tahap III (2016-2021)</b>	<b>Mewujudkan Manokwari Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing dalam pembangunan yang berkelanjutan Tahap IV (2021-2025)</b>
				Perbaikan manajemen pengelolaan asset daerah		
	11)	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Peningkatan pelayanan publik di distrik dan kampung-kampung		
				Pembenahan fasilitas pelayanan publik		
				Peningkatan kedisiplinan dan kesadaran aparatur dalam melayani masyarakat		



<b>Visi RPJPD MANSEL: TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MANSEL YANG BERDIKARI, BERMARTABAT DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN</b>					
<b>Misi/Tujuan</b>	<b>Sasaran / Sasaran pokok</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Arah Kebijakan RPJPD Mansel</b>	<b>Manokwari Selatan yang Maju, Mandiri, Bermartabat, dan Lestari Tahap III (2016-2021)</b>	<b>Mewujudkan Manokwari Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing dalam pembangunan yang berkelanjutan Tahap IV (2021-2025)</b>
<b>Misi 4: Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup yang berkualitas</b>					
Meningkatnya kelestarian dan kualitas lingkungan hidup	4. Terjaganya kualitas lingkungan hidup	Indeks lingkungan hidup	Pengendalian alih fungsi hutan		
	12) Meningkatnya RTH dan luas tutupan lahan	Tutupan Lahan	Penyediaan ruang terbuka publik bagi masyarakat		
		Persentase RTH	Peningkatan penegakan hukum lingkungan		



## BAB VI

# KAJIDAH PELAKSANAAN

RPJP Kabupaten Manokwari Selatan adalah kerangka acuan bagi Pemerintah Daerah dengan dukungan seluruh lapisan masyarakat secara terpadu dan terarah untuk menjalankan program pembangunan. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya dibutuhkan kaidah pelaksanaan yaitu :

- a. Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan ber kewajiban untuk melakukan sosialisasi visi, misi dan arah pembangunan Kabupaten Manokwari Selatan kepada semua lapisan masyarakat agar diketahui, dipahami, diinternalisasi selanjutnya dieksternalisasi sehingga sadar fungsi dan tugas masing-masing.
- b. Bupati sebagai kepala pemerintahan daerah memiliki kewajiban dalam mengejawantahkan visi, misi dan arah pembangunan RPJP ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang akan dijadikan sebagai pedoman dan panduan bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra).
- c. Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Manokwari Selatan harus menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah dalam menyusun rencana strategis.
- d. Legislatif dan jajaran Eksekutif, serta seluruh elemen masyarakat memiliki kewajiban untuk menjamin konsistensi antara RPJPD, RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra SKPD dan Rencana Kerja SKPD.

Dalam RPJPD ini yang memuat visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Manokwari Selatan, terkandung semangat untuk mengaktualisasikan serta menyatukan langkah, sumberdaya dan karya serta karsa dalam mewujudkan-nyatakan masyarakat yang berpendidikan, maju terampil dan sejahtera. Semangat dan tekad sesuai dengan visi dan misi yang disepakati, akan berhasil apabila didukung oleh:

- a. Komitmen dari kepemimpinan pemerintahan daerah dan seluruh aparatur dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan.
- b. Konsistensi kebijakan.
- c. Keberpihakan kepada rakyat.
- d. Peran serta masyarakat dan peran aktif dunia usaha.